



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN:
PENDEKATAN ANALISIS SWOT DAN AHP**

TESIS

ASRI DWI ASMARANI

0806480492

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN:
PENDEKATAN ANALISIS SWOT DAN AHP**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

ASRI DWI ASMARANI

0806480492

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Juli 2010



Asri Dwi Asmarani

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Asri Dwi Asmarani
NPM : 0806480492
Tanda tangan : 
Tanggal : Juli 2010

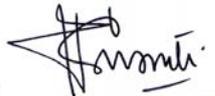
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Asri Dwi Asmarani
NPM : 0806480492
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten
Klaten: Pendekatan Analisis SWOT dan AHP

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Pembimbing : Hera Susanti, SE., MSc


(.....)

Penguji : Arindra A. Zainal, PhD


(.....)

Penguji : Soerjadi, M.A


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, karena Dia baik hati. Atas berkatNya pula penulis diberikan kesempatan untuk belajar di Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FEUI dan dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT dan AHP”. Penulis menyadari bahwa dalam masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian penulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, antara lain:

1. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, atas beasiswa dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Indonesia;
2. Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D dan Bapak DR. Andi Fahmi selaku ketua dan sekretaris program MPKP, serta seluruh jajaran dosen atas semua ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua;
3. Ibu Hera Susanti, SE., M.Sc selaku pembimbing tesis, yang dengan sangat sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Drs. Sutrisno selaku Tortama VI BPK-RI dan Bapak Drs. Muzakkir, selaku Kepala Perwakilan BPK RI di Sumatera Selatan, yang telah mengembalikan kepercayaan diri penulis dan selalu memberikan semangat untuk bisa menjalani masa perkuliahan dengan baik;
5. Pimpinan dan jajaran Bappeda Kabupaten Klaten, dinas-dinas terkait, dekan serta dosen-dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyadharma Kabupaten Klaten dan Bp FL. Tri Sumartanto, yang telah memberikan akses dan bantuan dalam penulisan sampai dengan penyelesaian tesis ini;
6. Kedua orang tua, Bapak Erik Eddy Djoko Soenarso dan Ibu Maria Magdalena Dyah Koesyanti, kakak dan adik terkasih, Dewi dan Sinyo, serta *my pretty little angel* Rezy Julian, yang selalu melimpahi penulis dengan kasih sayang yang luar biasa dalam segala keterbatasan yang ada;

7. Ivan Leonardo Hariandja, yang selalu menjadi inspirasi dan kekuatan dalam hidup penulis, terima kasih atas semua kekuatan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
8. Teman-teman di Perwakilan BPK RI di Sumatera Selatan, Palembang, khususnya sesama staf Kepala Perwakilan, Ibu Devina, Mbak Omay, Bekti, Kak Suhaidi, dan Anas, yang telah meyakinkan penulis untuk tidak melepaskan kesempatan belajar ini;
9. Teman-teman angkatan XIX pagi, yang telah menjadi teman-teman yang luar biasa bagi penulis, terima kasih atas persahabatan kita selama ini;
10. Mas Haris, Mbak Ira, Mbak Siti, Mbak Warni, serta seluruh staf sekretariat program MPKP yang selalu memberi dukungan penuh dan perhatian terhadap kelangsungan tugas belajar penulis di MPKP.

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkatNya kepada kita semua untuk membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat luas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juli 2010

Asri Dwi Asmarani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Dwi Asmarani
NPM : 0806480492
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul:

Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten:

Pendekatan Analisis SWOT dan AHP.

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif** ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Juli 2010

Yang menyatakan



(Asri Dwi Asmarani)

ABSTRAK

Nama : Asri Dwi Asmarani
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten:
Pendekatan Analisis SWOT dan AHP

Tesis ini berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Klaten dalam melakukan pembangunan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisisioner, yaitu kuisisioner SWOT dan kuisisioner AHP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.

Kata kunci: Strategi kebijakan, Pembangunan Daerah, SWOT, AHP.

ABSTRACT

Nama : Asri Dwi Asmarani
Program Studi : Master Degree of Planning and Public Policy
Judul : Regional Development Policy Strategies on Klaten Regency:
SWOT and AHP Analysis Approach

This thesis focuses on prioritizing regional development policy strategies on Klaten Regency with SWOT and AHP Analysis Approach. The research uses 2 instruments; those are SWOT questionnaires and AHP questionnaires. This research recommends Klaten Regional Government to increase economic growth by strengthening micro economies.

Keywords: Policies Strategy, Regional Development, SWOT, AHP.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6. Data dan Sumber Data	8
1.7. Metodologi Penelitian.....	8
1.8. Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pembangunan	11
2.2. Pembangunan Daerah	11
2.3. Strategi	13
2.4. Penelitian Sebelumnya.....	19
2.5. Analisis SWOT	21
2.6. Analytical Hierarchy Process (AHP).....	21
2.6.1. Prinsip Penyusunan Hirarki.....	24
2.6.2. Prinsip Menetapkan Prioritas	26
2.6.3. Prinsip Konsistensi Logis.....	28
2.6.4. Analisis Sensitivitas.....	30
2.6.5. Kelebihan dan kekurangan Model AHP.....	30
3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN	32
3.1. Kabupaten Klaten Selayang Pandang	32
3.2. Kondisi Geografis Kabupaten Klaten	33
3.3. Kondisi Topografi Kabupaten Klaten.....	34
3.4. Kondisi Demografi Kabupaten Klaten.....	34
3.5. Kondisi Infrastruktur Kabupaten Klaten.....	39
3.5.1. Sarana Kependidikan.....	39

3.5.2.	Sarana Kesehatan.....	41
3.5.3.	Prasarana Jalan dan Jembatan	43
3.5.4.	Prasarana Irigasi/Pengairan	44
3.5.5.	Kejadian Luar Biasa	45
3.6.	Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Klaten.....	46
3.6.1.	Produk Domestik Regional Bruto	46
3.6.2.	Struktur Ekonomi	48
3.6.3.	Pendapatan Daerah	52
3.6.4.	Belanja Daerah	53
3.6.5.	Penanaman Modal	55
3.7.	Potensi Kabupaten Klaten.....	56
3.7.1.	Potensi Sumber Daya Alam.....	56
3.7.2.	Potensi Pariwisata.....	58
3.8.	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010	60
3.8.1.	Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten	60
3.8.2.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	62
3.8.3.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	62
3.8.4.	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2010.....	64
4.	METODOLOGI	67
4.1.	Langkah Penggunaan Model.....	67
4.2.	Analisis SWOT	67
4.2.1.	Identifikasi Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal	67
4.2.2.	Penyusunan Kuisisioner	68
4.2.3.	Penentuan responden	68
4.2.4.	Analisis Data	69
4.2.5.	Perumusan Strategi	71
4.3.	Analytical Hierarchy Process.....	72
4.3.1.	Prinsip Penyusunan Hirarki.....	72
4.3.2.	Penyusunan Kuisisioner dan Responden	73
4.3.3.	Penilaian Kuisisioner AHP	74
4.3.4.	Perumusan Strategi.....	75
4.3.5.	Pengolahan Data.....	76
5.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	77
5.1.	Hasil dan Analisis SWOT.....	77
5.1.1.	Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal	77
5.1.2.	Pembobotan Internal Factor Analysis System (IFAS) dan External Factor Analysis System (EFAS).....	95
5.1.3.	Perumusan Strategi.....	98
5.2.	Perumusan Strategi kebijakan dengan AHP	103
5.2.1.	Penyusunan Hirarki	103
5.2.3.	Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten	112
5.2.4.	Analisis Sensitivitas.....	116

6. PENUTUP	122
6.1. Kesimpulan	122
6.3. Keterbatasan Studi	125
6.4. Penutup	126
DAFTAR REFERENSI	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Dengan Harga Konstan Tahun 2002 - 2006	5
Tabel 1.2	Prosentase Pertumbuhan PDRB Tahun 2003 – 2006	5
Tabel 1.3	Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun 2007 dan 2008	6
Tabel 2.1	Aksioma-aksioma dalam Analytical Hierarchy Process (AHP)	23
Tabel 2.2	Proses Penyusunan Hirarki	26
Tabel 2.3	Skala Perbandingan Secara Berpasangan	27
Tabel 3.1	Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2008..	35
Tabel 3.2	Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004 – 2008	36
Tabel 3.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2008	37
Tabel 3.4	Perbandingan IPM se-eks Karesidenan Surakarta Tahun 2007	38
Tabel 3.5	Persebaran dan Sarana Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2008..	39
Tabel 3.6	Perbandingan Rasio Murid per Kelas Tahun 2004 - 2008.....	40
Tabel 3.7	Rasio Murid Terhadap Guru di Kabupaten Klaten Tahun 2004 - 2008	40
Tabel 3.9	Sarana Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008.....	42
Tabel 3.10	Prasarana Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2004 – 2008.....	43
Tabel 3.11	Prasarana Pengairan/Irigasi Kabupaten Klaten Tahun 2006 - 2008	44
Tabel 3.12	Data Kerusakan Infrastruktur Akibat Gempa 27 Mei 2006.....	45
Tabel 3.13	PDRB dan PDRB per Kapita dengan Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2004 – 2008	47
Tabel 3.14	Prosentase Pertumbuhan PDRB dan PDRB per Kapita Tahun 2004 – 2008	47
Tabel 3.15	Perbandingan PDRB Per Kapita tahun 2004 – 2008	48
Tabel 3.16	Struktur Perekonomian Kabupaten Klaten Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.....	49
Tabel 3.17	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 dan 2008	54
Tabel 3.18	Penanaman Modal di Kabupaten Klaten Tahun 2008	55
Tabel 3.19	Potensi Pajak Galian C Kabupaten Klaten Tahun 2008	57
Tabel 4.1	Indikator Faktor dalam SWOT	70
Tabel 4.2	Matriks Faktor Internal dan Eksternal	71

Tabel 4.3	Matriks SWOT – Interaksi IFAS – EFAS	72
Tabel 4.4	Skala Perbandingan Secara Berpasangan	74
Tabel 4.5	Pembobotan Responden.....	75
Tabel 5.1	Perumusan Identifikasi Faktor Internal.....	78
Tabel 5.2	Perumusan Identifikasi Faktor Eksternal	78
Tabel 5.3	Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Internal	79
Tabel 5.4	Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Eksternal.....	80
Tabel 5.5	Ringkasan Pembobotan Faktor-Faktor Internal.....	82
Tabel 5.6	Ringkasan Pembobotan Faktor-Faktor Eksternal	89
Tabel 5.7	Penilaian Bobot IFAS – EFAS SWOT	96
Tabel 5.8	Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT	99
Tabel 5.9	Pembobotan Hasil Kuisisioner SWOT	101
Tabel 5.10	Urutan Alternatif Strategi SWOT	101
Tabel 5.11	Strategi Prioritas I: Strategi <i>Strength – Opportunity</i> (SO).....	102
Tabel 5.12	Hasil Penghitungan atas Penilaian Responden	107
Tabel 5.13	Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Optimis.....	110
Tabel 5.14	Urutan Prioritas Strategi Kebijakan Dengan Skenario Optimis	112
Tabel 5.15	Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Status Quo	117
Tabel 5.16	Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Pesimis	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Trend Pertumbuhan PDRB Tahun 2003 – 2006.....	6
Gambar 2.1	Dekomposisi (Penyusunan Hirarki).....	25
Gambar 3.1	Peta Kabupaten Klaten.....	33
Gambar 3.2	Komposisi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2008	53
Gambar 4.1	Penyusunan Hirarki Model AHP	73
Gambar 5.1	Hirarki Model AHP	106

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Responden Kuisisioner SWOT
- Lampiran 2. Kuisisioner SWOT
- Lampiran 3. Daftar Responden Kuisisioner AHP
- Lampiran 4. Kuisisioner AHP
- Lampiran 5. Hasil Pengolahan Data Analisis SWOT
- Lampiran 6. Hasil Pengolahan Data AHP

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi telah menempatkan daerah menjadi pemain inti dalam sebuah perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh Kenichi Ohmae (1934) dalam tulisannya “*The Borderless World*”, bahwa pemeran utama dalam kegiatan perekonomian pada era globalisasi adalah *corporation* dan *region*. Artinya, ketika berbicara tentang perekonomian China, sebenarnya kita hanya berbicara tentang perekonomian beberapa daerah maju di China, demikian juga ketika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, sebenarnya kita hanya berbicara tentang perekonomian pada beberapa daerah tertentu, seperti misalnya Jabodetabek, Medan dan Surabaya. Peran penting daerah ini tentu saja harus didukung dengan kesiapan daerah untuk bersaing dalam era globalisasi ekonomi ini.

Sangat jelas bahwa meskipun saat ini merupakan era globalisasi dimana pasar memegang peranan penting, namun bukan berarti segala sesuatunya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah masih memegang peranan penting dalam perekonomian pada umumnya, dan perencanaan pembangunan pada khususnya. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, dimana dapat diartikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. (Penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bervariasi secara geografis, mengakibatkan banyak terjadi kesenjangan pembangunan daerah karena beberapa daerah memiliki sumber daya yang lebih baik dari pada daerah yang lain. Susantono (2009) menyatakan bahwa masalah kesenjangan pembangunan ini menjadi

sangat penting karena akan menimbulkan dampak pada stabilitas pembangunan nasional, diantaranya:

- Kesenjangan antar wilayah akan menimbulkan standar hidup yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat di wilayah yang kurang diuntungkan;
- Masalah pengangguran yang terjadi pada wilayah yang diuntungkan dan memberi beban lebih yang harus ditanggung oleh negara;
- Kesenjangan antar wilayah menimbulkan dampak biaya ekonomi tinggi pada wilayah yang lebih pesat perkembangannya, seperti kota-kota besar dan kota-kota metropolitan, dan akan terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) untuk infrastruktur dan pelayanan publik.

Masalah kesenjangan pembangunan ini kemudian bermuara pula pada permasalahan kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Disinilah peran kebijakan yang tepat menjadi penting dalam keberhasilan pembangunan dan pemerataannya, karena tiap karakter wilayah memiliki pendekatan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. Terlebih lagi era globalisasi telah membawa dampak pasar bebas yang tentu saja menuntut kreativitas dan kesiapan pemerintah daerah. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara tepat dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan masalah pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Idie, 1999, dalam tesisnya *Konsep Perencanaan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Pemantapan Otonomi Daerah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Fakfak* menyatakan bahwa perencanaan yang baik perlu didasarkan pada suatu analisis keterpaduan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, masalah, dan peluang yang dimiliki dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, dapat terwujud penyusunan alternatif kebijakan pembangunan yang tepat dengan memadukan berbagai kegiatan dalam sektor pembangunan yang saling terkait maupun keterkaitan antar wilayah yang memiliki kondisi, potensi, masalah, dan peluang yang berbeda-beda untuk saling

mendukung dan perbedaan aspek-aspek antar wilayah terjadi karena adanya perbedaan potensi dari tiap-tiap wilayah.

Susantono (2009) menyatakan bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda-beda antar wilayah sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan yang ada di wilayah yang bersangkutan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa proses pengembangan wilayah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya migrasi manusia, penambahan penduduk alami, potensi sumber daya alam, dan aliran investasi dan teknologi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan wilayah adalah:

- Mengintegrasikan kapabilitas setiap wilayah dalam membangun tatanan perekonomian nasional yang kuat;
- Mengembangkan keunggulan daya saing wilayah melalui implementasi kebijakan dan strategi mikro dan makro;
- Mempercepat pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui kebijakan khusus, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kemampuan bersaing;
- Menciptakan iklim kondusif di setiap wilayah terutama untuk mendukung pengembangan dunia usaha dan investasi;
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparat pemerintah daerah, pengusaha lokal, maupun masyarakat;
- Mengembangkan setiap wilayah agar memiliki akses pada kemajuan dan inovasi teknologi serta membangun jejaring (*networking*) terhadap pasar global (*global market*).

Menurut Todaro (2006) tujuan inti dari pembangunan adalah peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. Tujuan kedua adalah

peningkatan standar hidup, yang tidak hanya diartikan sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga penyediaan lapangan pekerjaan, serta perbaikan kualitas pendidikan. Sedangkan tujuan ketiga adalah perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu secara keseluruhan. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan inti pembangunan, adalah mencapai kesejahteraan, perbaikan kondisi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Selama 10 tahun masa otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola daerahnya masing-masing, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten secara umum cenderung lambat apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Dari sisi pembangunan fisik maupun sisi keuangan daerah, Kabupaten Klaten cenderung tertinggal. Hal ini secara sederhana dapat dilihat dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran tunggal terbaik untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sebuah negara, karena dengan PDB yang tinggi memungkinkan kita untuk hidup lebih sejahtera. Sedangkan PDB per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan rata-rata individu dalam sebuah negara (Mankiw, 2003). Hal ini tentu saja juga berlaku untuk tingkat wilayah yang lebih kecil. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhannya sering kali dianggap sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan.

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 diketahui bahwa kenaikan PDRB Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten juga cenderung menurun. Pada tahun 2006, pertumbuhannya bahkan hanya sekitar 2,30%, padahal pada tahun yang sama, ketiga kabupaten/kota disekitarnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan PDRBnya di atas 4%.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Dengan Harga Konstan
Tahun 2002 - 2006

(Dalam Juta Rupiah)

No	Entitas	2002	2003	2004	2005	2006
1	Kab. Sukoharjo	3.490.382,02	3.629.051,38	3.786.212,72	3.941.788,46	4.120.437,35
2	Kab. Klaten	3.612.899,26	3.791.474,35	3.975.792,87	4.158.205,16	4.253.788,00
3	Kab. Boyolali	3.062.304,14	3.211.066,50	3.320.736,82	3.456.062,13	3.600.897,97
4	Kota Surakarta	3.268.559,54	3.468.276,94	3.669.373,45	3.858.169,65	4.067.529,95

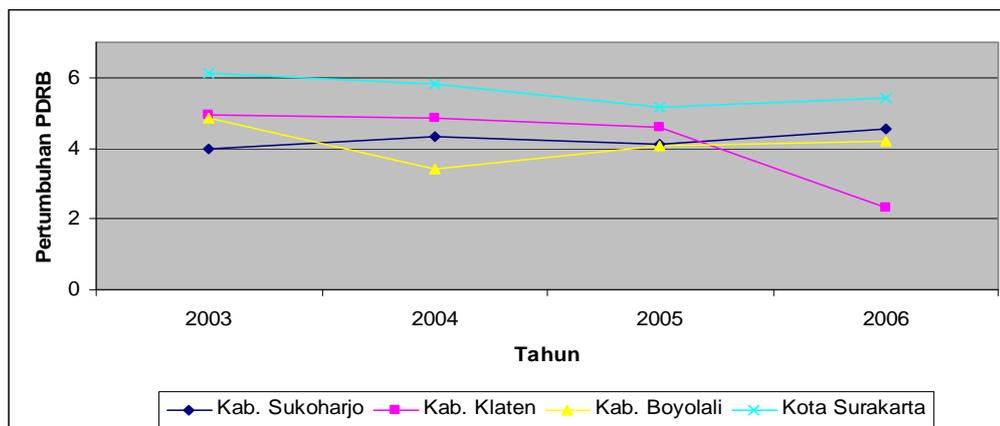
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diolah).

Tabel 1.2 Prosentase Pertumbuhan PDRB Tahun 2003 – 2006

No	Entitas	2003	2004	2005	2006
1	Kab. Sukoharjo	3,97	4,33	4,11	4,53
2	Kab. Klaten	4,94	4,86	4,59	2,30
3	Kab. Boyolali	4,86	3,42	4,08	4,19
4	Kota Surakarta	6,11	5,80	5,15	5,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diolah).

Secara teoritis, pengukuran kemandirian daerah diukur dari PAD, dimana penerimaan pajak dan retribusi merupakan elemen pokok dalam Pendapatan Asli Daerah suatu pemerintah daerah. Dari 2 komponen inilah dapat terlihat kemampuan suatu daerah untuk *men-generate income* dari potensi yang dimilikinya. Kemampuan ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah. Hal ini selaras dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tetap mendasarkan batas kewajaran (Haryanto, 2004).



Gambar 1.1 Trend Pertumbuhan PDRB Tahun 2003 – 2006

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diolah).

Tabel 1.3 Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun 2007 dan 2008

Nama Entitas	Pajak Daerah (Rp)		Retribusi (Rp)	
	2007	2008	2007	2008
Kabupaten Sukoharjo	14.532.971.616,00	NA	12.299.335.794,00	NA
Kabupaten Klaten	12.689.833.307,00	18.017.871.390,00	9.814.835.172,00	10.463.290.219,00
Kabupaten Boyolali	10.643.172.280,00	NA	40.020.935.424,00	NA
Kota Surakarta	41.404.082.034,00	46.855.622.021,00	33.359.233.949,00	39.325.240.832,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007 – 2008.

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten cenderung rendah, apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya, padahal Kabupaten Klaten memiliki potensi pajak daerah yang luar biasa, diantaranya potensi pajak daerah dari sumber air tanah dan Bahan Galian Golongan C, karena wilayah Kabupaten Klaten sangat kaya dengan potensi pertambangan pasir dan kapur.

Selain pertumbuhan PDRB dan PAD yang cenderung lambat, masih terdapat beberapa indikator yang mampu menunjukkan belum optimalnya pembangunan di Kabupaten Klaten. Diantara beberapa indikator tersebut adalah jumlah penduduk miskin, dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten paling banyak diantara 3 kabupaten lainnya, yaitu mencapai 23,38% pada tahun 2004. Indikator lainnya adalah kondisi infrastruktur (jalan), dimana 31,92% infrastruktur jalan di Kabupaten Klaten dalam kondisi rusak, dan 17,78% dalam kondisi rusak berat.

1.2. Rumusan Permasalahan

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang dapat diidentifikasi sebagai faktor kekuatan dan faktor kelemahan utama, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah Kabupaten Klaten?
2. Prioritas kebijakan apa yang secara tepat harus diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pembangunan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal berupa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) maupun ancaman (*threat*);
2. Merumuskan strategi-strategi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten;
3. Memilih prioritas strategi kebijakan berdasarkan pertimbangan potensi, kemampuan dan kendala yang ada.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Klaten, sehingga mampu membawa Kabupaten Klaten menjadi daerah yang mampu bersaing di era globalisasi ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil topik yang berkaitan, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis persepsi responden yang dianggap ahli (*expert*), sifatnya subyektif berdasarkan persepsi dan pengetahuan para ahli tersebut, yang didapatkan dengan cara menjangring persepsi para ahli di lingkungan pemerintahan, akademisi dan pengamat perkonomian di Kabupaten Klaten melalui kuisisioner model SWOT dan AHP.

1.6. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan untuk tujuan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil survey dan pengisian kuisisioner dan wawancara awal dengan para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Sedangkan data sekunder didapatkan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan bahan-bahan penelitian lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi antara analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Analisis SWOT dipilih karena analisis ini sangat bermanfaat dalam proses perencanaan strategi.

Setelah didapatkan opsi strategi, maka dapat dipilih opsi strategi terbaik dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process*. AHP dipilih karena AHP dapat membantu menentukan pilihan terbaik yang melibatkan banyak kriteria berdasarkan intuisi dan persepsi para ahli dengan tetap memperhatikan konsistensi.

Penelitian ini akan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- Analisis SWOT dibuat dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal untuk menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten melalui pemilihan strategi kebijakan oleh orang yang dianggap ahli;
- Menggunakan analisis interaksi IFAS-EFAS (*Internal Factor Analysis System – External Factor Analysis System*) dengan elemen-elemen yang berkaitan untuk menghasilkan alternatif strategi pilihan yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai;
- Pendekatan AHP dibuat dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan menyusunnya dalam suatu hirarki, kemudian dilakukan penilaian atas hirarki tersebut oleh orang yang dianggap ahli.

1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan tersusun dalam 6 bab. Bab pertama akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka akan menguraikan tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, termasuk teori tentang SWOT dan AHP.

Bab ketiga akan menguraikan gambaran umum Kabupaten Klaten dimana akan dijelaskan kondisi dan perkembangan Kabupaten Klaten.

Bab keempat adalah metodologi penelitian, yang akan menguraikan langkah-langkah penggunaan model.

Bab Kelima akan menguraikan strategi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, perumusan strategi kebijakan dengan menggunakan analisis

SWOT dan perumusan strategi kebijakan dengan AHP serta melakukan intepretasi atas hasil analisis tersebut.

Bab keenam adalah penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dalam rangka pengambilan kebijakan untuk merencanakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan secara lebih terperinci tentang kerangka teori dan peralatan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan berbagai kajian literatur yang ada.

2.1. Pembangunan

Stiglitz dalam tulisannya *Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes* menyatakan bahwa pembangunan melambangkan transformasi/perubahan masyarakat, pergerakan dari hubungan, cara berpikir (tentang kesehatan dan pendidikan), metode berproduksi yang masih tradisional menuju ke cara yang lebih “modern”, dan kunci dari perubahan tersebut adalah cara berpikir yang lebih “ilmiah”, mengidentifikasi variabel-variabel penting yang mempengaruhi *outcome*, berusaha untuk membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang tersedia, serta mengenali hal-hal yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Perubahan memberikan kesempatan pada masyarakat dan individu untuk mendapatkan kontrol atas diri mereka sendiri. Pembangunan memperkaya kehidupan masing-masing individu dengan cara memperluas wawasan mereka dan mengurangi perasaan terisolasi. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah bertujuan untuk memfasilitasi transformasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul pada saat menuju perubahan.

2.2. Pembangunan Daerah

Sadono Sukirno (1976) mendefinisikan pembangunan daerah menjadi dua pengertian, pertama, pembangunan dalam suatu daerah, misalnya daerah Jawa Barat, daerah Sumatera Utara, daerah Sulawesi dan sebagainya. Pengertian kedua adalah pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayah dan dalam konteks ini istilah yang lebih tepat adalah pembangunan wilayah. Dalam pengertian kedua ini,

strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional.

Khuldun Munji mendefinisikan pembangunan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembangunan daerah secara umum meliputi:

- Peningkatan keadaan ekonomi untuk mandiri;
- Peningkatan keadaan sosial daerah untuk kesejahteraan secara adil dan merata;
- Pengembangan setiap ragam budaya untuk kelestarian;
- Pemeliharaan keamanan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan;
- Membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Keadaan daerah, yang meliputi keadaan sosial, politik, budaya, keamanan, fisik daerah dan sarana umum;
- Rencana pembangunan, yang meliputi tujuan, sasaran, target pembangunan, strategi dan rencana pembangunan;
- Sarana pembangunan, yang meliputi kelembagaan, dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang tersedia;
- Pengaruh luar, yang meliputi keadaan sosial, politik, ekonomi, keamanan dunia dan kekuatan yang secara khusus mempengaruhi;
- Pelaksanaan, yang meliputi ketentuan-ketentuan serta pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan.

Secara umum, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan atau terjadinya pembangunan, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi meliputi variabel GDP per *capita*, *Growth* (pertumbuhan), GDP per kapita dengan

Purchasing Power Parity, perubahan struktur ekonomi (perubahan struktur produksi, antara sektor pertanian, manufaktur, dan jasa), kesempatan kerja, dan pengangguran. Sedangkan indikator sosial meliputi Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan indeks gabungan dari angka harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Indikator sosial lainnya adalah *Human Development Index* (HDI).

2.3. Strategi

Menurut Einsiedel dalam Soesilo (2002), strategi berasal dari kata Latin *strategia* yang artinya kantor dari jenderal, selain itu strategi bisa juga diartikan sebagai seni memperlalat atau memperkerjakan tindakan-tindakan yang berasal dari kata Perancis *strategos*, arti lain dari kata strategi adalah *strategems* atau menuju ke arah sebuah tujuan.

Kotler dalam Sitinjak (2000) menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, dan strategi adalah suatu pendekatan logis yang akan menentukan arah sebuah aksi.

Salusu dalam Sitinjak (2000) menyatakan bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi Pembangunan

Stiglitz (1998) menyatakan bahwa strategi pembangunan lebih ambisius daripada dokumen perencanaan, karena strategi pembangunan menyiapkan strategi bukan hanya untuk akumulasi modal dan penempatan sumber daya, tapi juga strategi untuk transformasi masyarakat. Strategi pembangunan memiliki peran penting sebagai pemercepat terjadinya transformasi masyarakat yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasi area keuntungan komparatif negara. Mengidentifikasi area ini dan mempublikasikannya sebagai barang publik adalah tanggung jawab pemerintah.

Strategi pembangunan perlu memajukan wacana (*vision*) tentang transformasi, akan seperti apa masyarakat kita 20 tahun mendatang. Wacana ini tentu mengandung tujuan-tujuan kuantitatif, seperti mengurangi kemiskinan (sebanyak setengah) dan memperhatikan pendidikan, namun hal tersebut merupakan elemen-elemen atau target dalam proses transformasi, bukan wacana dari transformasi itu sendiri. Strategi pembangunan kadang dilihat sebagai *blueprint*, sebuah peta yang menggambarkan kemana masyarakat akan menuju.

Dalam membuat strategi kebijakan perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya menetapkan prioritas, koordinasi, dan *consensus builders*. Semua masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya; apalagi bagi masyarakat pada negara miskin. Diatas keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat adalah keterbatasan kemampuan (*capacity*) pemerintah, oleh karena itu, strategi pembangunan perlu menetapkan prioritas. Kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan: hal apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain.

Dalam rangka keberhasilan pembangunan tidak hanya diperlukan koordinasi antara agen-agen didalam dan diantara level-level pemerintahan, tapi juga harus ada koordinasi antara sektor swasta dengan sektor publik.

Proses konstruksi strategi pembangunan memainkan peranan yang penting, untuk membantu membentuk konsensus tidak hanya tentang wacana luas tentang masa depan negara dan tujuan jangka pendek dan menengah, tapi juga merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pembangunan konsensus (*consensus building*) tidak hanya penting sebagai bagian untuk mencapai stabilitas sosial dan politik, tapi juga menggiring kepada "*ownership*" kebijakan dan institusi yang dapat meningkatkan kesuksesan.

Sebuah strategi harus memasukkan komponen-komponen yang bertujuan untuk mengembangkan sektor swasta, sektor publik, masyarakat, keluarga dan individu.

- a. *Pengembangan sektor swasta*. Tujuan utamanya adalah pembentukan sektor swasta yang kuat, kompetitif, stabil dan efisien. Diantara elemen-elemen strategi yang meningkatkan tujuan tersebut adalah:
- Infrastruktur hukum, memberikan hukum kompetisi, kebangkrutan dan hukum komersial lainnya;
 - *Framework* pengaturan yang mendorong swasta agar menyediakan infrastruktur, yang akan memaksimalkan kompetisi yang layak, dan yang menjamin bahwa kompetisi bisa dilaksanakan, dan bukan merupakan siksaan bagi *market power*;
 - Penyediaan pemerintah akan infrastruktur, dimana infrastruktur sektor tidak terjadi;
 - *Framework* makroekonomi yang stabil;
 - Sistem keuangan yang stabil dan efisien, memerlukan *framework* pengaturan yang tidak hanya memastikan keamanan tapi juga meningkatkan kompetisi, melindungi depositor, menciptakan kepercayaan diri dan mengidentifikasi kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat.

Jika sektor swasta berhasil, maka lingkungan akan menjadi lebih kondusif bagi perkembangan sektor swasta. Kunci utama dari lingkungan kondusif tersebut adalah tenaga kerja yang berkualitas – yang sehat dan berpendidikan.

- b. *Pembangunan sektor publik*. Strategi pembangunan harus memperhatikan sektor publik. Pertanyaan kunci dibalik strategi bagi sektor publik adalah mengidentifikasi peran pemerintah – tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan bagaimana pemerintah seharusnya melaksanakan hal tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sektor publik dan swasta dapat saling melengkapi, bekerja sama dalam usaha pembangunan. Hal-hal penting dalam strategi sektor publik adalah: (i) pemfokusan sektor publik pada fungsi unik yang harus dilaksanakan, misalnya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan sektor swasta, memastikan bahwa

kesehatan dan pendidikan dapat dinikmati masyarakat luas dan mengurangi kemiskinan; (ii) penguatan kemampuan sektor publik, termasuk pembangunan layanan masyarakat yang efektif dan merestruktur sektor publik untuk lebih mengefektifkan penggunaan insentif dan penggunaan mekanisme pasar; dan (iii) keserasian tanggung jawab dan modus operasi terhadap kemampuan negara.

- c. *Pembangunan komunitas*. Meskipun beberapa kegiatan dilaksanakan pada level nasional bahkan internasional, namun sering kali komunitas dianggap sebagai alat yang efektif untuk membawa transformasi masyarakat. Proyek pembangunan yang baik bisa menjadi pemercepat pembangunan komunitas. Partisipasi komunitas merefleksikan keinginan dan preferensi sebuah komunitas dan sebuah proyek yang didesain untuk merefleksikan informasi lokal, memastikan bahwa kondisi lokal, preferensi dan kondisi telah dipertimbangkan. Partisipasi dalam sebuah proyek merupakan bagian dari proses transformasi.
- d. *Pengembangan keluarga*. Penentu suksesnya kenaikan *income* per kapita adalah pertumbuhan penduduk. Penentu lainnya adalah tingkat pendidikan wanita. Keduanya merupakan keputusan yang diambil dari dalam keluarga. Keluarga tidak hanya bertanggungjawab atas pendidikan tapi juga atas nutrisi dan kesehatan.
- e. *Pengembangan individu*. Pada akhirnya, transformasi masyarakat mementingkan pada transformasi individu tentang cara berpikir dan bertindak. Pembangunan bermuara pada penambahan kekuatan pada individu, jadi individu akan memiliki kontrol yang lebih besar atas kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan mereka, jadi individu dapat menjadi lebih kaya, dan lebih sehat. Pendidikan dan kesehatan merupakan inti dari usaha pembangunan individu.

Pendekatan strategi pembangunan harus memiliki:

- a. *Sumber daya*. Sangat jelas bahwa sumber daya penting bagi pembangunan. Sebuah strategi pembangunan harus menggambarkan perencanaan untuk

mengembangkan modal fisik dan modal manusia, dan juga melestarikan sumber daya alam. Selain itu juga harus menggambarkan perencanaan untuk mendorong saving dan investasi, perencanaan untuk sekolah dan pembiayaannya, serta perencanaan untuk menggunakan dan memperbaharui sumber daya alam.

- b. *Manajemen ekonomi*. Salah satu ciri negara miskin adalah kurangnya sumber daya. Strategi pembangunan yang komprehensif harus dibentuk untuk mengidentifikasi distorsi utama dalam perekonomian, bagaimana hal tersebut diberikan, mempertimbangkan seluruh *social cost* dan pengaruh kebijakan.
- c. *Manajemen pengetahuan*. Pembangunan haruslah menghilangkan kesenjangan, baik kesenjangan modal manusia, tapi juga kesenjangan pengetahuan. Pengetahuan dan modal adalah komplementer; meningkatkan pengetahuan akan meningkatkan pengembalian modal, sementara tambahan modal memberikan kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan. Menggabungkan pengetahuan dalam strategi pembangunan memerlukan pembentukan kemampuan untuk menyerap dan mengadaptasi pengetahuan, berinvestasi pada teknologi untuk memfasilitasi diseminasi pengetahuan dan membentuk pengetahuan secara lokal. Jadi, strategi pembangunan harus mendeskripsikan sebuah strategi tentang manajemen pengetahuan.
- d. *Strategi sektoral dan sub-nasional*. Pada beberapa kasus, penyempitan fokus dari seluruh sektor ekonomi menjadi industri, kawasan, perkotaan atau daerah sub urban sangat berguna. Perkotaan merepresentasikan arena dimana sekumpulan ketertarikan saling bersinggungan – infrastruktur, lingkungan, kesehatan, keuangan. Perkotaan merupakan mikrokosmos dari sebuah perekonomian dan merupakan solusi yang terintegrasi untuk masalah yang biasa muncul. Lebih jauh, banyak kota lebih berhasil dalam mencapai modernisasi daripada wilayah sub urban, oleh karena itu, wajar apabila strategi pembangunan lebih banyak berfokus pada perkotaan dalam rangka mencapai transformasi sosial.

e. *Modal sosial dan organisasional*. Salah satu bentuk lain modal adalah modal sosial dan organisasional, yang melibatkan institusi dan hubungan yang menjembatani antara transaksi dan penyelesaian masalah. Masyarakat tradisional mempunyai tingkat modal sosial dan organisasional yang tinggi. Namun dalam proses pembangunan, modal sosial dan organisasional ini sering kali rusak. Transformasi kadang melemahkan hubungan otoritas tradisional. Masalahnya adalah bahwa proses perusakan ini mungkin terjadi sebelum modal sosial dan organisasional terbentuk. Modal sosial dan organisasional tidak bisa diberikan oleh pihak luar, namun harus tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, caranya dengan mengadaptasi tahapan-tahapan perubahan dan bentuk-bentuk reformasi. Namun kadang, hal tersebut memperlambat transformasi. Telah terdapat banyak diskusi tentang pembangunan kemampuan (*capacity building*). Bagian paling mudah dalam pembangunan kemampuan adalah menyediakan kemampuan manusia, pendidikan, ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pembangunan. Bagian paling berat dalam pembangunan kapasitas adalah pembangunan modal sosial/organisasional, termasuk institusi yang memungkinkan sebuah masyarakat bisa berfungsi dengan baik. Terdapat banyak dimensi akan hal ini:

- Lingkungan sektor swasta yang kondusif, yang memasukkan pasar dan infrastruktur hukum yang memungkinkan pasar agar berfungsi dengan baik;
- Lingkungan pengetahuan, yang memungkinkan penyerapan dan pengadaptasian pengetahuan baru;
- Lingkungan kebijakan, yang memasukkan kemampuan untuk membuat keputusan penting sehubungan dengan strategi pembangunan.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Winarto (2005) dalam penelitiannya mengenai analisis disparitas di Kabupaten Klaten menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan perhitungan indeks Williamson (CVw) selama kurun waktu 1993 – 2002, terjadi disparitas pendapatan yang terus meningkat di Kabupaten Klaten. Disparitas ini terjadi karena kuatnya pengaruh sektor perdagangan yang ternyata tidak berkembang secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten;
- Disparitas pendapatan di wilayah utara lebih rendah dibandingkan wilayah tengah dan selatan, hal ini diperkirakan karena kontribusi terbesar terhadap PDRB kecamatan-kecamatan di wilayah utara diperoleh dari sektor pertanian dan perdagangan;
- Terjadi disparitas pendapatan di semua sektor yang ada di Kabupaten Klaten;
- Hasil analisis menggunakan indeks Theil (Tw dan Tb) menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1993 – 2002, faktor antar wilayah memiliki pengaruh lebih besar daripada faktor di dalam wilayah dalam menimbulkan kesenjangan/disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten.

Asrori (1986), menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara tepat dan disertai dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah, karena hal tersebut sangat mempengaruhi atau mendorong pengembangan daerah di daerah tersebut. Perencanaan pembangunan daerah yang kurang tepat akan menyulitkan daerah tersebut untuk berkembang.

Amrullah (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa infrastruktur (jalan, listrik, telepon, dan air bersih), pendidikan, dan investasi berhubungan secara positif dengan output yang dihasilkan, output yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita.

Idhie (1999) menyimpulkan bahwa timbulnya tuntutan otonomi daerah pada intinya mengandung keinginan untuk mensejajarkan pembangunan antar daerah dan wilayah karena faktanya telah terjadi banyak kesenjangan dan kepincangan, khususnya antara kawasan Indonesia Barat dengan kawasan Indonesia Timur. Oleh

karena itu, perlu dilakukan perencanaan dengan pendekatan regionalisasi atau perwilayahan yang didasarkan pada suatu analisis keterpaduan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, masalah, dan peluang yang dimiliki dalam suatu wilayah. Perencanaan dengan pendekatan regionalisasi ini merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan dan kepincangan yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi yang seimbang antar daerah dan kawasan.

Mee Kam Ng menjelaskan hubungan antara perencanaan strategi dengan analisis SWOT, yang dimana dinyatakan bahwa proses perencanaan strategi meliputi langkah-langkah *environmental scanning, identification of strategic issues, strategic option, feasibility assessment and implementation*. Dalam melakukan proses tersebut, tehnik analisis SWOT sangat berguna bagi sebuah organisasi (atau pihak lain yang menggunakan alat analisis ini) untuk melakukan *scanning* terhadap lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi. Untuk melihat *external environment*, sebuah organisasi harus bisa melihat “*Opportunity*” dan “*Threat*” pada berbagai level yang berbeda (*international, national, regional, and local*) dan pada aspek-aspek yang berbeda juga (*demographic, economic, technological, cultural, political, etc.*). Sedangkan untuk melihat *internal environment*, sebuah organisasi harus bisa melihat “*Strength*” dan “*Weakness*” yang dilakukan dengan cara melakukan *critical examination* atas sumber daya yang dimiliki diantaranya kekuatan kepemimpinan, *information flow* dan faktor-faktor internal lainnya.

Proses berikutnya adalah *identification of strategic issues* dimana dalam proses ini diidentifikasi permasalahan yang mungkin mempengaruhi fungsi dari sebuah organisasi atau mempengaruhi kemampuan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Dengan langkah ini, maka *strength, weakness, opportunity* dan *threat* yang dihadapi oleh sebuah organisasi semakin jelas dan pada akhirnya dapat diambil aksi atau strategi yang dapat memperkuat *strength*, mengatasi *weakness*, memanfaatkan *opportunity* dan menghilangkan *threat*.

Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan,

yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

2.5. Analisis SWOT

Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan, sebuah organisasi harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Analisis SWOT memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- Tidak hanya dapat membuat ekstrapolasi masa depan, analisis SWOT dapat dipakai untuk membuat masa depan;
- Bersifat multiguna dan sederhana;
- Cocok dengan tehnik lain, antara lain *Delphi*, *Brainstroming*, *time series*, *regression* (ekonometri), dan AHP;
- Dapat dipakai membangun untuk konsensus berdasarkan kebutuhan dan keinginan (Soesilo, 2002).

2.6. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi kekurangan dari model pengambilan keputusan yang lainnya. Alat utama dalam model AHP ini adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya berupa persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terukur dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi sebuah bentuk hirarki (Brojonegoro, 1992).

Analytical Hierarchy Process memberikan kemungkinan bagi para pembuat keputusan untuk merepresentasikan interaksi faktor-faktor yang berkesinambungan di dalam situasi yang kompleks dan tidak terstruktur. Alat analisis ini membantu para pembuat keputusan untuk mengidentifikasi dan sekaligus membuat prioritas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan yang dimiliki, dan pengalaman yang mereka miliki untuk masing-masing masalah yang dihadapi (Saaty, 2000). Kelebihan model AHP dibandingkan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuan AHP untuk memecahkan masalah yang *multiobjectives* dan *multicriterias*. Hal ini disebabkan karena metode ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, terutama dalam pembuatan hirarkinya, sehingga model AHP dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau sebuah hirarki. Bahkan AHP mampu memecahkan masalah-masalah yang memiliki tujuan-tujuan yang berlawanan, kriteria-kriteria yang berlawanan, dan tujuan serta kriteria yang berlawanan dalam sebuah model. Karenanya, keputusan yang diambil melalui model AHP sudah akan mempertimbangkan berbagai tujuan dan berbagai kriteria yang berbeda atau bahkan saling bertentangan (Saaty, 2000). Kelebihan lain yang dimiliki AHP adalah, dalam hal perencanaan pembangunan, model ini dapat memungkinkan terjaringnya aspirasi masyarakat melalui pengisian kuisisioner, sehingga diharapkan aspirasi masyarakat ini dapat ditangkap oleh para pembuat kebijakan dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Namun, model AHP ini juga memiliki kelemahan. Model ini sangat tergantung dengan input yang berupa persepsi ahli, sehingga apabila persepsi ahli keliru tentang sebuah permasalahan, maka hasil dari metode AHP ini tidak akan berguna.

Menurut Bambang PS. Brojonegoro (1992), dalam melakukan analisis dengan menggunakan AHP terdapat 4 aksioma yang harus diperhatikan, yaitu aksioma resiprokal (*reciprocal comparison*), aksioma homogenitas (*homogeneity*), aksioma ketergantungan (*independence*), dan aksioma ekspektasi (*expectation*). Aksioma-aksioma tersebut dapat dijelaskan secara ringkas dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.1 Aksioma-aksioma dalam Analytical Hierarchy Process (AHP)

No	Aksioma	Keterangan
1.	Reciprocal Comparison	Pengambil keputusan bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Kalau A disukai dari B dengan skala x kali, maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$ kali. Jadi $A_{ij} = 1/A_{ji}$.
2.	Homogeneity	Preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas, elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya.
3.	Independence	Kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, tapi alternatif dipengaruhi oleh kriteria.
4.	Expectation	Struktur hirarki diasumsikan lengkap. Ekspektasi dan persepsi manusia lebih menonjol daripada rasionalitas.

Sumber: Raksaka Mahi (1991) dan Bambang PS. Brojonegoro (1992)

Tabel 2.1 tersebut dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Aksioma Resiprokal (*Reciprocal Comparison*): matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk haruslah bersifat kebalikan. Artinya harus bisa dibuat perbandingan dan dinyatakan preferensinya, dimana preferensi tersebut harus memenuhi syarat resiprokal, yaitu kalau A lebih disukai daripada B dengan skala x , maka B lebih disukai daripada A dengan skala $1/x$;
2. Aksioma Homogenitas (*Homogeneity*): aksioma ini memiliki arti bahwa preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas, atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat diperbandingkan satu sama lain. Apabila aksioma ini tidak terpenuhi, maka elemen-elemen yang diperbandingkan tersebut tidak homogen, dan harus dibentuk suatu “cluster” (kelompok elemen-elemen) yang baru;

3. Aksioma Ketergantungan (*Independence*): preferensi harus dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, melainkan oleh obyektif secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah ke atas. Artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya;
4. Aksioma Ekspektasi (*Expectations*): dalam proses AHP yang dituntut bukanlah rasionalitas, tapi yang menonjol adalah ekspektasi dan persepsi manusia. Dalam kaitan ini penilaian yang irasional dapat diterima, asalkan konsisten. Untuk tujuan pengambilan keputusan struktur hirarki diasumsikan lengkap, apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau obyektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap (berbagai sumber).

2.6.1. Prinsip Penyusunan Hirarki

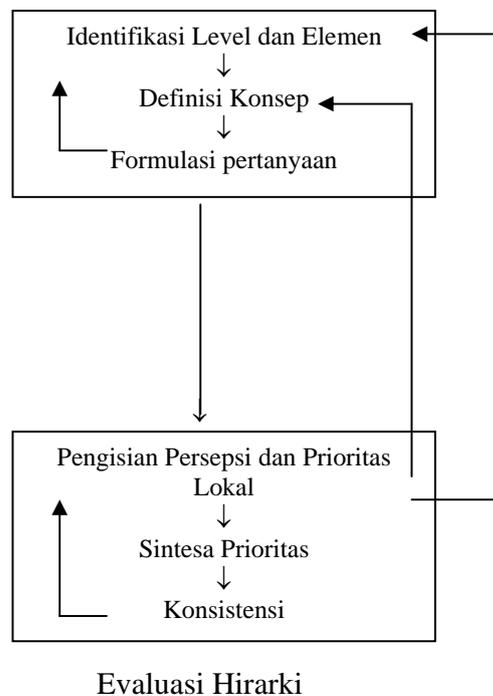
Dalam proses penyusunan model AHP, terdapat 2 tahapan yang utama, yaitu:

1. Penyusunan Hirarki (Dekomposisi)
2. Evaluasi Hirarki

Penyusunan hirarki atau dekomposisi mencakup 3 proses berurutan yang merupakan proses iterasi, yaitu (a) identifikasi level dan elemen, (b) definisi konsep, dan (c) formulasi pertanyaan.

Proses penyusunan hirarki secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki atau yang lazim disebut '*goal*', yang disebutkan disini adalah masalah yang akan dicari pemecahannya lewat model AHP. Setelah itu, menentukan **kriteria-kriteria** yang diperlukan atau sesuai dengan tujuan keseluruhan tersebut. Kriteria ini biasanya terdiri dari syarat-syarat atau keadaan yang kiranya dapat menunjang tercapainya sebuah '*goal*' dan biasanya masih bersifat umum (*general*). Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan penambahan sub-sub kriteria di bawah setiap kriteria. Subkriteria merupakan penjabaran lebih dari kriteria yang

masih bersifat umum tersebut dan hal ini biasanya diperlukan bagi para pengambil keputusan yang menyukai hal-hal yang lebih detail. Terakhir, identifikasikan **alternatif-alternatif** yang akan dievaluasi di bawah sub-sub kriteria. Kalau subkriteria-subkriteria yang ada dirasakan terlalu luas maka perlu ditambahkan sebuah level di atas alternatif-alternatif yang mengidentifikasi atribut-atribut dari alternatif-alternatif tersebut dalam proses evaluasi (Brojonegoro, 1992). Variasi pembuatan hirarki ini terus berkembang dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada di dunia, sehingga tidak ada bentuk hirarki yang baku untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.



Gambar 2.1 Dekomposisi (Penyusunan Hirarki)

Keterangan: Langkah pengujian konsistensi sering dipisahkan dari evaluasi hirarki tetapi penulis berpendapat bahwa langkah tersebut akan sangat mempengaruhi prioritas lokal, global dan analisa sensitivitas.

Sumber: Brojonegoro (1992)

Proses penyusunan hirarki sebenarnya merupakan proses iterasi dimana konsep-konsep, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya menentukan elemen dan level dari suatu hirarki. Ketidakjelasan atau kesalahan dalam proses menjawab pertanyaan akan membuat para pengambil keputusan memilih kriteria atau alternatif yang salah, oleh karena itu semua pertanyaan seharusnya dijawab dan konsisten dengan informasi yang ada. Proses dekomposisi merupakan langkah terpenting dalam penyusunan model AHP, karena dari langkah inilah sebuah validitas dan kemampuan model dapat diuji (Brojonegoro, 1992).

Tabel 2.2 Proses Penyusunan Hirarki

Tahap Pertama	Identifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki yang biasa disebut dengan Goal (tujuan), yaitu masalah yang akan dicari pemecahannya melalui model AHP.
Tahap Kedua	Menentukan kriteria yang diperlukan untuk mendukung tujuan keseluruhan.
Tahap Ketiga	Identifikasi strategi-alternatif yang akan dievaluasi dibawah kriteria.

Sumber: Brojonegoro (1992)

2.6.2. Prinsip Menetapkan Prioritas

Setelah proses penyusunan hirarki, proses berikutnya adalah proses menetapkan kriteria. Proses ini merupakan proses yang penting dalam penggunaan model AHP, dimana dalam proses ini dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar berbagai kriteria yang telah ditetapkan, yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Menentukan mana diantara dua yang dianggap penting/disukai/mungkin terjadi;
- Menentukan berapa kali lebih penting/disukai/mungkin terjadi.

Seluruh prioritas yang ada dibandingkan satu sama lain secara berpasangan dan diberi bobot berupa skala dari 1 sampai dengan 9. Setelah hirarki dapat tersusun, selanjutnya dilakukan pengisian persepsi ahli dengan cara membandingkan antara elemen-elemen di dalam satu level dengan tetap memperhatikan pengaruh pada level di atasnya.

Tabel 2.3 Skala Perbandingan Secara Berpasangan

Skala	Artinya	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya (<i>equal importance</i>)	Kedua elemen yang diperbandingkan memberikan kontribusi yang sama besar untuk mencapai tujuan.
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>moderate importance</i>)	Pengalaman dan penilaian agak sedikit menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya.
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>essential/ strong importance</i>)	Pengalaman dan penilaian lebih kuat menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya.
7	Elemen yang satu sangat lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>very strong importance</i>)	Sebuah elemen sangat lebih disukai daripada elemen yang lainnya, dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>extreme importance</i>)	Sebuah elemen mutlak lebih kuat disukai dari yang lainnya dan berada pada tingkat tertinggi.
2,4,6,8	Merupakan angka kompromi diantara penilaian diatas	Bila kompromi diperlukan diantara dua pertimbangan/penilaian.

Sumber: Saaty (1986)

Hasil pengisian perbandingan berpasangan berdasarkan persepsi ahli ini kemudian disusun dalam sebuah matriks perbandingan (*pairwise comparision matrix*)

dan dilakukan perhitungan vektor eigen (*eigen vector*) dan nilai eigen (*eigen value*) yang disertai penghitungan konsistensi yang akan menentukan prioritas pilihan.

Karena model AHP menghendaki satu persepsi dalam satu perbandingan, maka dari n persepsi harus dihasilkan satu persepsi yang mewakili persepsi seluruh ahli. Cara umum yang biasa dipakai adalah dengan cara mencari nilai rata-rata. Penghitungan nilai rata-rata ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu; (i) rata-rata hitung, dan (ii) rata-rata ukur. Rata-rata ukur lebih tepat digunakan untuk deret bilangan yang sifatnya perbandingan (rasio) dan mampu mengurangi gangguan yang ditimbulkan salah satu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil.

Setelah matriks perbandingan selesai diisi, kemudian dilakukan penetapan prioritas yang akan dilakukan dengan metode *eigen vector* dan *eigen value*. Dari *eigen vector* yang diperoleh, ditentukan *local priority*, yaitu prioritas untuk satu level. *Global priority* diperoleh dengan mengalikan prioritas elemen pada level di atasnya sampai level terakhir.

2.6.3. Prinsip Konsistensi Logis

Pengukuran konsistensi dalam model AHP dapat dilakukan dalam dua tahap, (i) mengukur konsistensi setiap matriks perbandingan, dan (ii) mengukur konsistensi keseluruhan hirarki. Konsistensi mengandung dua arti, menunjukkan pemikiran atau obyek yang serupa yang dikelompokkan menurut homogenitas relevansinya, dan intensitas relasi antar gagasan saling membenarkan secara logis. Setiap perbandingan dinyatakan konsisten 100% apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

$$a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$$

setiap angka dalam matriks perbandingan pada dasarnya adalah sebuah rasio, karena angka yang timbul didasarkan atas perbandingan antara dua elemen. Apabila tertulis angka atau skala 9 dalam sebuah matriks perbandingan, maka itu tidak lain adalah 9/1. dengan dasar tersebut dapat dijelaskan bahwa:

$$a_{ij} = w_i/w_j \dots\dots\dots i, j = 1 \dots\dots n$$

karena itu, $a_{ij} \cdot a_{jk} = (w_i/w_j) \cdot (w_j/w_k) = w_i/w_k = a_{ik}$

dan dapat juga dibuktikan bahwa $a_{ji} = w_j/w_i = 1/(w_i/w_j) = 1/a_{ij}$

Konsistensi dalam sebuah matriks perbandingan diukur melalui:

$$A.W = \lambda_{\max}. W$$

Indeks konsistensi (CI) diperoleh dari: $\frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$

Rasio konsistensi (CR) diperoleh dari:

$$CR = CI/RI, \text{ dimana } RI = \text{Random indeks}$$

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Dalam hirarki tiga level, akan diperoleh indeks konsistensi untuk matriks perbandingan level dua dan indeks konsistensi dari setiap matriks perbandingan pada level tiga dengan memperhatikan hubungan dengan setiap unsur-unsur level dua. Dengan demikian pada level tiga tersebut akan diperoleh sejumlah angka indeks konsistensi yang banyaknya sama dengan unsur-unsur dalam level dua. Langkah selanjutnya adalah melakukan perkalian vektor antara vektor prioritas level dua sebagai vektor baris dengan vektor indeks konsistensi dari level tiga sebagai vektor kolom. Hasil perkalian ini merupakan satu angka yang kemudian ditambah dengan indeks konsistensi level dua dan hasilnya disebut M, selanjutnya dihitung indeks random secara keseluruhan dengan cara yang sama, hanya setiap indeks konsistensi diganti dengan indeks random yang besarnya tergantung ukuran matriks. Dari operasi ini diperoleh indeks random hirarki secara keseluruhan yang dilambangkan dengan M', dengan demikian akan diperoleh rasio konsistensi secara keseluruhan dengan membagi indeks konsistensi keseluruhan (M) dengan indeks random keseluruhan (M'), yang secara singkat dapat ditulis:

$$CRH = M/M'$$

Dimana:

M = CI level dua + (bobot prioritas level dua)(CI level tiga)

M' = RI level tiga + (bobot prioritas level dua)(CI level tiga)

RI = Random Indeks

Setelah melalui tahap penyusunan hirarki, menetapkan prioritas dan menghitung konsistensi, langkah selanjutnya dapat dilakukan analisa sensitivitas.

2.6.4. Analisis Sensitivitas

Dalam perjalanannya, sering kali muncul pertanyaan bagaimana sensitivitas dari prioritas yang dihitung dengan metode eigenvector apabila ada sedikit perubahan pada penilaian. Yang diharapkan adalah prioritas yang tidak terlalu berfluktuasi apabila ada perubahan kecil dalam penilaian.

Menurut Brojonegoro (1992:31), analisis sensitivitas dapat dipakai untuk memprediksi keadaan apabila terjadi suatu perubahan yang cukup besar. Misalnya terjadi perubahan bobot prioritas atau urutan prioritas dari kriteria karena ada perubahan kebijakan. Maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana urutan prioritas alternatif yang baru dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Dalam suatu hirarki tiga level, level dua dari hirarki tersebut dapat disebut sebagai variabel eksogen, sedangkan level tiganya adalah variabel endogen. Analisis sensitivitas dari hirarki tersebut adalah melihat pengaruh pada variabel eksogen terhadap kondisi variabel endogen.

Apabila dikaitkan dengan suatu periode waktu, maka dapat dikatakan bahwa analisis sensitivitas adalah unsur dinamis dari sebuah hirarki. Artinya, penilaian yang dilakukan pertama kali dipertahankan untuk suatu jangka waktu tertentu dan adanya perubahan kebijakan atau tindakan, cukup dilakukan dengan analisis sensitivitas untuk melihat efek yang terjadi. Kestabilan suatu hirarki juga dapat ditentukan berdasarkan analisis sensitivitas. Makin besar deviasi atau perubahan prioritas yang terjadi, makin tidak stabil hirarki tersebut. Sensitivitas hirarki, penting untuk implementasi kebijakan karena pengambil keputusan dapat membuat antisipasi apabila ada sesuatu yang terjadi di luar perkiraan.

2.6.5. Kelebihan dan kekurangan Model AHP

Kelebihan metode AHP adalah sederhana dan tidak banyak menggunakan asumsi, dan sangat cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis

dan makro. Kekuatannya terletak pada struktur hirarkinya yang memungkinkan seseorang memasukkan semua faktor-faktor penting, baik yang nyata maupun yang abstrak, dan mengaturnya dari atas ke bawah mulai dari yang terpenting ke tingkat yang berisi alternatif, untuk dipilih mana yang terbaik. AHP juga adalah suatu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya (Brojonegoro, 1992). Secara sederhana, kelebihan model AHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Model AHP mampu melakukan analisis dari data yang kuantitatif diolah menjadi kualitatif;
- AHP mempertimbangkan analisis permasalahan yang melibatkan banyak pelaku (*multi actor*), banyak kriteria (*multi criterias*), dan banyak obyek (*multi object*);
- AHP menghasilkan output perencanaan yang diinginkan;
- AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Proses ini bergantung pada imajinasi pengalaman dan pengetahuan untuk menyusun hirarki suatu masalah dan bergantung pada logika intuisi dan pengalaman untuk memberi pertimbangan;
- AHP menunjukkan bagaimana menghubungkan elemen-elemen dari bagian lain untuk memperoleh hasil penggabungan.

Sementara, AHP juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

- Permodelan AHP sulit dikerjakan secara manual, terutama bila matriksnya terdiri dari tiga elemen atau lebih, sehingga harus dibuat suatu program komputer untuk memecahkannya;
- Belum adanya batasan expert sebagai responden pada masing-masing kasus juga dapat merupakan kelemahan dari metode AHP, namun hal ini dapat diantisipasi dengan pemberian bobot yang berbeda dalam tabulasi kuisisioner hasil isian responden.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

3.1. Kabupaten Klaten Selayang Pandang

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Klaten memiliki visi untuk menciptakan Klaten yang *Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo*. Sedangkan misi yang hendak diwujudkan adalah:

1. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat;
2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spirituil dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta pelibatan masyarakat dalam mengaktualisasi diri dalam pembangunan;
4. Menumbuhkan perekonomian rakyat yang dinamis, berbasis sumber daya lokal dan berpikiran global untuk mengurangi angka kemiskinan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi pemerintahan;
6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pelaku pembangunan;
7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai;
8. Mendorong pelaksanaan otonomi desa dengan menjadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan kawasan.

Kabupaten Klaten memiliki wilayah seluas 665,56km² dan secara administratif terbagi dalam 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan.

3.2. Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak pada $110^{\circ}30'$ – $110^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ – $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Disebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY). Kabupaten Klaten berada diantara 3 kota besar, yaitu Kota Yogyakarta (30km), Kota Surakarta (36km), dan Kota Semarang (100km), dan telah dihubungkan dengan jalur transportasi yang cukup memadai. Ketiga kota tersebut memiliki berbagai fasilitas berstandar internasional, seperti Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto, Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Bandar Udara Ahmad Yani, dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas, yang tentu saja memberikan berbagai dampak terhadap pertumbuhan Kabupaten Klaten baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kependudukan, maupun aspek lainnya.



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Klaten

Sumber: www.klaten.go.id

3.3. Kondisi Topografi Kabupaten Klaten

Secara topografi, Kabupaten Klaten terletak diantara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu yang membagi Kabupaten Klaten menjadi 4 wilayah, yaitu:

- Wilayah dengan ketinggian <100 mdpal, meliputi Kecamatan Juwiring, Karangdowo dan Camas;
- Wilayah dengan ketinggian 100-200 mdpal, meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat);
- Wilayah dengan ketinggian 200-400 mdpal, meliputi Kecamatan Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karanganom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);
- Wilayah dengan ketinggian 400-1000 mdpal, meliputi Kecamatan Kemalang, sebagian besa Manisrenggo, sebagian kecil Jatinom, dan sebagian kecil Tulung.

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang selain menjadi kendala dalam dalam sistem transportasi dan komunikasi, tapi juga telah memberikan berbagai manfaat bagi Kabupaten Klaten. Keuntungan yang dimaksud disini adalah bervariasinya jenis tanaman pangan yang bisa tumbuh di wilayah Kabupaten Klaten dan banyaknya sumber daya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Bahkan, potensi sumber daya air ini telah mampu memberikan pasokan air minum bagi masyarakat Kota Surakarta, lewat kerjasama dengan PDAM setempat.

3.4. Kondisi Demografi Kabupaten Klaten

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2008 adalah 1.300.494 jiwa, yang tersebar pada 26 wilayah kecamatan.

Tabel 3.1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2008

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jenis Kelamin		Kepadatan per Wilayah (jiwa/km ²)
				Pria	Wanita	
1	Prambanan	24,43	49.277	23.563	25.714	2.017
2	Gantiwarno	25,64	40.994	19.530	21.464	1.599
3	Wedi	24,38	55.516	26.826	28.690	2.277
4	Bayat	39,43	63.852	31.231	32.621	1.619
5	Cawas	34,47	66.132	32.297	33.835	1.919
6	Trucuk	33,81	82.291	40.799	41.492	2.434
7	Kalikotes	12,98	37.389	18.372	19.017	2.881
8	Kebonarum	9,67	21.343	10.257	11.086	2.207
9	Jogonalan	26,70	57.877	28.820	29.057	2.168
10	Manisrenggo	26,96	41.766	20.125	21.641	1.549
11	Karangnongko	26,74	38.157	18.516	19.641	1.427
12	Ngawen	16,97	44.420	22.043	22.377	2.618
13	Ceper	24,45	63.835	31.411	32.424	2.611
14	Pedan	19,17	48.862	23.899	24.963	2.549
15	Karangdowo	29,23	51.020	25.196	25.824	1.745
16	Juwiring	29,79	61.216	29.945	31.271	2.055
17	Wonosari	31,14	62.663	30.108	32.555	2.012
18	Delanggu	18,78	44.516	22.075	22.441	2.370
19	Polanharjo	23,84	46.047	22.556	23.491	1.932
20	Karanganom	24,06	49.080	24.011	25.069	2.040
21	Tulung	32,00	54.576	26.781	27.795	1.706
22	Jatinom	35,53	57.338	27.919	29.419	1.614
23	Kemalang	51,66	34.681	17.075	17.606	671
24	Klaten Selatan	14,43	41.527	20.257	21.270	2.878
25	Klaten Tengah	8,92	43.878	21.379	22.499	4.919
26	Klaten Utara	10,38	42.241	20.537	21.704	4.069
	Jumlah	655,56	1.300.494	635.528	664.966	1.984

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dalam Klaten Dalam Angka 2008.

Persebaran penduduk menurut kecamatan paling banyak berada di Kecamatan Trucuk dengan penduduk sebanyak 82.291 jiwa (6,33%), sedangkan paling sedikit berada di kecamatan Kebonarum dengan penduduk sebanyak 21.343 jiwa (1,64%). Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Klaten pada Tahun 2008 adalah 1.984 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan paling tinggi di Kecamatan Klaten Tengah, yaitu 4.919 jiwa/km², dan paling rendah di Kecamatan Kemalang, yaitu 671 jiwa/km².

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak dari penduduk pria dan kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Tabel 3.2 Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004 – 2008

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Pria	Wanita	
1	2004	625.173	656.613	1.281.786
2	2005	627.751	658.307	1.286.058
3	2006	631.231	662.011	1.293.242
4	2007	633.552	663.435	1.296.987
5	2008	635.528	664.966	1.300.494

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2008

Berdasarkan penelitian pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bekerja sama dengan Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, didapatkan beberapa kesimpulan antarlain prosentase tenaga kerja migran wanita setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2005, perbandingan antara tenaga kerja migran wanita dan tenaga kerja migran pria adalah 23:77, dan pada tahun 2006 menjadi 10:90. Keadaan ini antara lain karena semakin banyak wanita yang lebih memilih bekerja tanpa bermigrasi, dengan alasan lebih

dekat dengan keluarga dan anak-anaknya. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa penduduk wanita di Kabupaten Klaten lebih banyak daripada penduduk pria.

Kondisi semacam ini tidak jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta. Di daerah-daerah tersebut jumlah penduduk wanitanya juga lebih banyak daripada penduduk prianya dengan rata-rata prosentase terbesar adalah Kota Surakarta yaitu sebesar 51,93%, diikuti dengan Kabupaten Klaten sebesar 51,18%, Kabupaten Boyolali sebesar 51,09%, dan Kabupaten Sukoharjo dengan prosentase sebesar 50,56%.

Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia menuntut terjadinya pembangunan atas kemampuan manusia yang terjadi melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan, serta daya beli, sehingga memperoleh manfaat dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai alat pemantauan pembangunan manusia, dan menjadi sangat penting dalam proses manajemen pembangunan, karena Indeks Pembangunan Manusia mampu menunjukkan dampak pembangunan yang dilakukan pada masa sebelumnya. Indeks ini juga dapat digunakan sebagai suatu ukuran yang mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas fisik untuk menggambarkan tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan.

Tabel 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2006 – 2008

No	Komponen	2006	2007	2008
1	Indeks Harapan Hidup	70,38	70,51	70,72
2	Indeks Pendidikan	75,02	75,02	77,77
3	Indeks Kemampuan Daya Beli	70,06	71,91	72,63
		71,82	72,48	73,71

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2008

IPM Kabupaten Klaten mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik secara umum, maupun masing-masing komponennya. Hal ini dikarenakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran di bidang sosial budaya Kabupaten Klaten adalah untuk mengatasi permasalahan di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas SDM. Komponen-komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia selalu dijadikan sasaran program-program pemerintah, seperti misalnya program Jamkesda yang ditujukan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan sumber daya manusia sangat penting, karena pemerintah Kabupaten Klaten menyadari bahwa selain sebagai modal pembangunan, sumber daya manusia juga merupakan pelaku pembangunan.

Tabel 3.4 Perbandingan IPM se-eks Karesidenan Surakarta Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	IPM	Rangking Regional	Rangking Nasional
1	Klaten	72,48	2	118
2	Boyolali	69,63	6	240
3	Sukoharjo	72,46	3	121
4	Wonogiri	70,11	5	218
5	Sragen	69,98	7	282
6	Karanganyar	71,59	4	159
7	Surakarta	76,58	1	20

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2008

Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten menduduki peringkat 2 di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta.

3.5. Kondisi Infrastruktur Kabupaten Klaten

3.5.1. Sarana Kependidikan

Pendidikan merupakan indikator yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan karena sumber daya manusia yang berkualitas lewat pendidikan merupakan tujuan umum dari pembangunan. Oleh karena itu perlu diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk menunjang terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 3.5 Persebaran dan Sarana Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2008

No	Kecamatan	Sekolah Negeri				Jumlah	Sekolah Swasta				Jumlah	Jumlah Negeri dan Swasta
		TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA		TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA		
1	Prambanan	0	32	3	2	37	30	1	1	1	33	70
2	Gantiwarno	0	26	4	1	31	27	2	2	1	32	63
3	Wedi	0	31	2	1	34	33	3	3	0	39	73
4	Bayat	0	36	3	1	40	36	4	3	2	45	85
5	Cawas	1	48	4	1	54	46	3	2	2	53	107
6	Trucuk	0	40	4	0	44	56	9	3	0	68	112
7	Kalikotes	0	21	1	0	22	18	3	0	0	21	43
8	Kebonarum	0	11	1	0	12	15	1	1	0	17	29
9	Jogonalan	0	31	2	1	34	37	1	2	2	42	76
10	Manisrenggo	0	28	3	0	31	28	4	2	0	34	65
11	Karangnongko	0	25	2	1	28	27	0	1	0	28	56
12	Ngawen	1	24	1	0	26	37	6	2	0	45	71
13	Ceper	0	35	4	1	40	48	11	2	2	63	103
14	Pedan	0	25	4	0	29	32	2	2	2	38	67
15	Karangdowo	0	33	4	1	38	33	5	2	0	40	78
16	Juwiring	0	36	2	0	38	41	9	3	1	54	92
17	Wonosari	0	41	4	1	46	50	1	2	1	54	100
18	Delanggu	0	29	5	0	34	29	3	3	3	38	72
19	Polanharjo	0	31	3	1	35	37	5	0	0	42	77
20	Karanganom	0	37	6	1	44	45	4	2	1	52	96
21	Tulung	0	34	4	0	38	38	0	1	0	39	77
22	Jatinom	0	38	4	1	43	48	1	1	1	51	94

(Sambungan)

No	Kecamatan	TK	SD/ MI	SMP /MTs	SMA /MA	Jumlah	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA /MA	Jumlah	Jumlah Negeri dan Swasta
23	Kemalang	0	28	2	0	30	18	0	3	0	21	51
24	Klaten Selatan	0	20	1	2	23	23	2	2	2	29	52
25	Klaten Tengah	0	20	4	0	24	29	5	3	6	43	67
26	Klaten Utara	0	15	4	3	22	31	6	4	7	48	70
	Jumlah	2	775	81	19	877	892	91	52	34	1.069	1.946

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008

Tabel 3.6 Perbandingan Rasio Murid per Kelas Tahun 2004 - 2008

No	Keterangan	Kabupaten Klaten				2008		
		2004	2005	2006	2007	Klaten	Sukoharjo	Surakarta
1	SD	25	23	24	22	20	21	61
2	SMP	30	31	29	30	29	35	34
3	SMA	42	34	33	34	33	34	35

Ket: Angka dirata-ratakan antara sekolah negeri dan swasta

Sumber: Berbagai sumber (Diolah)

Tabel 3.7 Rasio Murid Terhadap Guru di Kabupaten Klaten Tahun 2004 - 2008

No	Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
1	TK Negeri	13	11	10	9	9
2	TK Swasta	12	13	11	11	10
3	SD Negeri	14	13	12	12	12
4	SD Swasta	22	17	17	15	13
5	SMP Negeri	14	14	14	13	13
6	SMP Swasta	12	11	11	10	10
7	SMA Negeri	13	12	12	12	12
8	SMA Swasta	12	9	9	8	7
9	SMK Negeri	12	12	12	12	13
10	SMK Swasta	NA	NA	13	13	14

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2008

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten telah tersebar di seluruh kecamatan dengan cukup merata, sedangkan berdasarkan tabel 3.6 dan 3.7, dapat terlihat bahwa rasio antara jumlah murid dengan jumlah kelas, dan rasio murid terhadap guru tidak terlalu tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Klaten relatif cukup baik apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di sekitar Kabupaten Klaten, dimana jumlah murid dalam satu kelas rata-rata hampir sama untuk tiap tingkat pendidikan di masing-masing kabupaten/kota, demikian juga dengan jumlah guru di Kabupaten Klaten, bisa dikatakan mencukupi.

Selain memiliki infrastruktur pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, Kabupaten Klaten juga memiliki sarana pendidikan tinggi sebanyak 7 perguruan tinggi, baik berupa akademi maupun berupa universitas. Sasaran bidang pendidikan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan cagar budaya, serta pengembangan dan pembinaan atlet berbakat, pengembangan budaya prestasi.

3.5.2. Sarana Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan. Luasnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dan sekaligus keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.

Sasaran bidang kesehatan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah peningkatan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat, kemitraan antar pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pelayanan

kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan dan pemukiman, peningkatan penanganan penyakit menular, perbaikan manajemen pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan melalui sarana medis dan pengobatan, serta penyediaan obat-obatan yang terjangkau masyarakat, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Klaten sendiri telah memiliki beberapa sarana kesehatan, seperti rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, balai pengobatan paru-paru dan puskesmas. Sarana kesehatan ini telah didukung dengan banyaknya tenaga teknis di bidang kesehatan, yang tersebar diseluruh sarana kesehatan yang ada.

Tabel 3.9 Sarana Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008

No	Sarana Kesehatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	1	6	7
2	Rumah Sakit Jiwa	1	0	1
3	Rumah Bersalin	0	19	19
4	Puskesmas	134	0	134
5	Balai Pengobatan Paru-paru	1	0	1
6	Balai Pengobatan	0	28	28
7	Apotek	1	16	17
8	Toko Obat Berijin	3	0	3
9	Dokter Praktek	0	222	222
	Jumlah	141	291	432

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2008

Berdasarkan data persebaran sarana kesehatan tersebut, tidak seluruh sarana tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Klaten. Seperti misalnya apotik, dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, hanya 13 kecamatan yang memiliki apotik di wilayahnya. Sehingga masyarakat pada beberapa kecamatan harus menempuh perjalanan yang lebih jauh untuk membeli kebutuhan obat-obatan. Selain sarana kesehatan yang disebutkan diatas, di Kabupaten Klaten juga terdapat 2.166 unit Pos

Pelayanan terpadu (Posyandu) yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

3.5.3. Prasarana Jalan dan Jembatan

Infrastruktur jalan memegang peranan yang sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, karena infrastruktur jalan menunjang mobilitas perekonomian. Oleh karena itu kondisi dan kualitas jalan, apalagi jalan pada jalur-jalur perekonomian harus tetap pada kondisi dan kualitas yang baik.

Prasarana jalan kabupaten di Kabupaten Klaten sampai dengan semester I 2008 sepanjang 777 km. Sedangkan jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Klaten masing-masing sepanjang 36,43 km dan 46 km.

Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2008 sebanyak 264 buah, yang secara total sepanjang 2.501 km.

Tabel 3.10 Prasarana Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2004 – 2008

(Dalam %)

No	Kondisi Jalan	2004	2005	2006	2007	2008
1	Baik	28,82	14,10	27,69	39,36	39,36
2	Sedang	27,58	25,19	22,50	19,59	19,59
3	Rusak	22,14	41,10	32,03	25,41	25,41
4	Rusak Berat	21,45	19,61	17,78	15,65	15,65
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Klaten Dalam Angka Tahun 2004 - 2008

Dari tabel 3.10 dapat diketahui bahwa lebih dari 41% kondisi jalan di Kabupaten Klaten dalam kondisi rusak, baik rusak sedang maupun rusak berat. Perbaikan-perbaikan atas kondisi jalan di lingkungan Kabupaten Klaten masih menemui kendala biaya, dimana banyak wilayah dengan kondisi jalan yang rusak, namun anggaran perbaikan kualitas jalan ini juga terbatas (Berita Daerah kabupaten Klaten No. 16 Tahun 2009). Kondisi jalan yang rusak ini tentu saja sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi di Kabupaten Klaten, karena sarana jalan dan

transportasi memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah. Namun demikian, setidaknya seluruh wilayah di Kabupaten Klaten telah terhubung dengan fasilitas jalan kabupaten, meskipun dengan kualitas yang belum cukup baik.

3.5.4. Prasarana Irigasi/Pengairan

Mengingat air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, maka prasarana air bersih yang baik merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kabupaten Klaten memiliki sumber air yang melimpah dan saat ini telah dimanfaatkan sebagai sumber pengairan/irigasi dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Untuk itu, diperlukan prasarana pengairan yang memadai.

Gempa tektonik pada tahun 2006 telah mengakibatkan kerusakan sarana irigasi (bendungan dan saluran) di sekitar 56 lokasi, dan sampai dengan tahun 2007 Pemerintah Daerah baru mampu melakukan normalisasi sungai di 15 lokasi, rehabilitasi bendungan sebanyak 15 buah, normalisasi sarana irigasi di 15 lokasi, dan melakukan rehabilitasi kantor irigasi sebanyak 5 lokasi (Berita Daerah kabupaten Klaten No. 16 Tahun 2009).

Tabel 3.11 Prasarana Pengairan/Irigasi Kabupaten Klaten Tahun 2006 - 2008

No	Prasarana Irigasi	Satuan	2006	2007	2008
1	Sumber Air	Buah	134	134	134
2	Waduk	Unit	1	1	1
3	Sarana Pengairan teknis				
	a. Saluran Primer	km	144.586	144.586	144.586
	b. Saluran Sekunder	km	635.993	635.993	635.993
	c. Saluran Tersier	km	734.471	734.471	734.471

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008

Namun, berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 3 tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak menambah jumlah sarana

pengairan teknis. Padahal, sarana air bersih sangat penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus sebagai faktor penting dalam pengembangan wilayah. Seperti diketahui bahwa setidaknya terdapat 134 sumber air di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, namun sumber air tersebut tersebar secara tidak merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, pada tahun 2008 terdapat kurang lebih 10 kecamatan yang rawan kekurangan air bersih, dan 4 kecamatan secara permanen kekurangan air bersih.

3.5.5. Kejadian Luar Biasa

Salah satu kejadian luar biasa yang terjadi dan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Klaten, adalah gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa berkekuatan 5,9 SR ini berpusat di 25 km selatan-barat daya Yogyakarta pada koordinat 8,26°LS dan 110,31° BT pada kedalaman 33 km. Walaupun pusat gempa berada di Yogyakarta, namun kerusakan parah juga terjadi di wilayah Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari www.klaten.go.id tercatat terdapat banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Tabel 3.12 Data Kerusakan Infrastruktur Akibat Gempa 27 Mei 2006

No	Item Kategori	Satuan	Jumlah	No	Item Kategori	Satuan	Jumlah
1	Korban jiwa			7	Prasarana Irigasi		
	Meninggal	jiwa	1.046		Rusak berat	m2	3.351
	Luka-luka	jiwa	18.127		Rusak Sedang	m2	0
2	Rumah Penduduk				Rusak ringan	m2	0
	Roboh	unit	30.605	8	Pasar		
	Rusak berat	unit	62.755		Rusak berat	unit	298
	Rusak ringan	unit	95.031		Rusak Sedang	unit	6
3	Prasarana Pemerintahan				Rusak ringan	unit	4
	Roboh/rusak berat	unit	19	9	Prasarana Kesehatan		
	Rusak Sedang	unit	89		Rusak berat	unit	10
	Rusak ringan	unit	54		Rusak Sedang	unit	32

(Sambungan)

No	Item Kategori	Satuan	Jumlah
4	Prasarana Pendidikan		
	Roboh/rusak berat	unit	53
	Rusak Sedang	unit	324
	Rusak ringan	unit	63
5	Prasarana Jalan		
	Rusak berat	km	0
	Rusak Sedang	km	16
	Rusak ringan	km	0
6	Prasarana Jembatan		
	Rusak berat	buah	0
	Rusak Sedang	buah	19
	Rusak ringan	buah	0

No	Item Kategori	Satuan	Jumlah
	Rusak ringan	unit	25
10	Tempat Ibadah		
	Rusak berat	unit	37
	Rusak Sedang	unit	255
	Rusak ringan	unit	182
11	Candi		
	Rusak berat	unit	0
	Rusak Sedang	unit	1
	Rusak ringan	unit	0

Sumber: www.klaten.go.id

Atas musibah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Klaten telah merealisasikan Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 sebesar kurang lebih 18 milyar rupiah, yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi beberapa fasilitas umum yang rusak akibat gempa.

3.6. Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Klaten

3.6.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai faktor produksi/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian, secara agregat menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam produksi di wilayah tersebut, sehingga PDRB menjadi tolok ukur yang paling umum dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah.

Tabel 3.13 PDRB dan PDRB per Kapita dengan Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2004 – 2008

PDRB	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008
PDRB Harga Konstan	Juta Rupiah	3.975.792,87	4.158.205,16	4.253.788,00	4.394.688,02	4.567.200,96
PDRB per Kapita	Rupiah	3.107.333,54	3.238.691,91	3.290.470,00	3.392.004,66	3.516.704,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Klaten Dalam Angka 2008 (diolah).

Tabel 3.14 Prosentase Pertumbuhan PDRB dan PDRB per Kapita Tahun 2004 – 2008

No	PDRB	2004	2005	2006	2007	2008
1	PDRB dengan Harga Konstan	4,86	4,59	2,30	3,31	3,93
2	PDRB per Kapita	4,47	4,23	1,60	3,09	3,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Klaten Dalam Angka 2008 (diolah).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan, terutama pada tahun 2006, ketika terjadi gempa tektonik pada tanggal 27 Mei 2006. Selanjutnya pada tahun 2007 dan 2008, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mulai mengalami peningkatan sehingga mencapai angka pertumbuhan sebesar 3,31% dan 3,93%. Peningkatan ini antara lain terjadi karena kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian masyarakat pasca bencana gempa bumi, yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, maupun pemerintah Kabupaten Klaten, serta berbagai lembaga donor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga mampu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.

Dengan kondisi Kabupaten Klaten dengan jumlah PDRB dan PDRB per kapita seperti yang tergambar dalam tabel diatas, secara umum, Kabupaten Klaten tergolong daerah dengan PDRB per kapita yang cukup rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten memiliki nilai PDRB Per

kapita yang lebih tinggi. Dari tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Kabupaten Klaten memiliki nilai PDRB per Kapita yang paling rendah di antara daerah-daerah yang terdekat dengan Kabupaten Klaten.

Tabel 3.15 Perbandingan PDRB Per Kapita tahun 2004 – 2008

(dalam rupiah)

No	Entitas	2004	2005	2006	2007	2008
1	Prov Jawa Tengah	4.284.047,89	4.484.910,42	4.689.985,08	4.913.801,20	5.140.000,00*
2	Kab. Sukoharjo	4.645.152,54	4.698.135,14	4.986.678,18	5.222.570,00	5.440.420,00
3	Kabupaten Klaten	3.107.333,54	3.238.691,91	3.290.470,00	3.392.004,66	3.516.704,93
4	Kabupaten Boyolali	3.542.803,26	3.675.934,47	3.822.175,15	3.963.578,22	4.113.171,39
5	Kota Surakarta	7.184.833,40	7.217.737,96	7.930.485,11	8.351.806,79	8.699.633,71

*Angka perkiraan dari BPS

Sumber: berbagai sumber

3.6.2. Struktur Ekonomi

Kemampuan suatu daerah atas suatu sektor dapat dilihat dari keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sektor tertentu tersebut dalam suatu wilayah. Artinya sektor tersebut bisa memproduksi lebih daripada yang dibutuhkan oleh daerahnya, sehingga memiliki potensi untuk menjadi daerah pengekspor. Dengan menggunakan metode *Location Quotient*, maka kemampuan Kabupaten Klaten dapat diketahui pada tabel 3.16.

Location Quotient memberikan indikasi sebagai berikut:

$LQ > 1$, memiliki arti bahwa suatu sektor tertentu memiliki keunggulan komparatif, atau cukup efisien dalam berproduksi, dan daerah tersebut memiliki potensi untuk mengekspor produk dalam sektor yang sedang diteliti;

$LQ=1$, memiliki arti bahwa daerah yang diteliti hanya mampu memenuhi sendiri kebutuhan akan produk dalam sektor yang sedang diteliti;

$LQ < 1$, memiliki arti bahwa suatu sektor tertentu tidak memiliki keunggulan komparatif, atau kurang efisien dalam berproduksi, dan daerah yang diteliti memiliki potensi untuk mengimpor produk dalam sektor yang sedang diteliti.

Tabel 3.16 Struktur Perekonomian Kabupaten Klaten
Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

(Dalam juta)

	Sektor	Tahun 2006		LQ	Tahun 2007		LQ
		Nilai	%		Nilai	%	
1	Pertanian	943.060,85	22,17	1,08	957.297,31	21,78	1,09
2	Pertambangan/Penggalian	53.338,31	1,25	1,13	55.826,27	1,27	1,13
3	Industri Pengolahan	841.653,96	19,79	0,62	869.903,33	19,79	0,62
4	Listrik dan Air Minum	27.849,31	0,65	0,79	30.423,64	0,69	0,82
5	Bangunan/Konstruksi	365.824,54	8,60	1,53	398.079,88	9,06	1,59
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.191.778,73	28,02	1,33	1.230.415,46	28,00	1,31
7	Angkutan dan Komunikasi	113.985,64	2,68	0,54	119.386,12	2,72	0,54
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan	148.969,69	3,50	0,98	156.907,22	3,57	0,99
9	Jasa-jasa	567.326,97	13,34	1,30	576.448,79	13,12	1,27
	PDRB	4.253.788,00	100,00		4.394.688,02	100,00	

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka dan Klaten Dalam Angka tahun 2007 dan 2008 (diolah)

Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah sektor bangunan dan konstruksi, dengan nilai sebesar 1,53 pada tahun 2006, dan 1,59 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *share* sektor ini terhadap PDRB hanya sekitar 8%, namun ternyata sektor ini merupakan sektor unggulan Kabupaten Klaten. Pada bulan Mei 2006, Kabupaten Klaten mengalami bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah pada kondisi infrastruktur di lingkungan Kabupaten Klaten. Setelah bulan Mei, pemerintah Kabupaten Klaten dibantu dengan pihak-pihak lain mulai membangun kembali infrastruktur dasar dalam rangka restrukturisasi kondisi fisik Kabupaten Klaten. Pembangunan infrastruktur pasca gempa bumi tersebut menyebabkan LQ sektor bangunan dan konstruksi Kabupaten Klaten selama 2 tahun memiliki LQ yang cukup tinggi.

Sedangkan sektor lain yang juga dapat dijadikan sektor unggulan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan LQ sebesar 1,33 pada tahun 2006, dan

sebesar 1,31 pada tahun 2007. Selain memiliki LQ yang nilainya cukup tinggi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan sektor yang paling mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Klaten. Dari ketiga elemen tersebut (perdagangan, hotel, dan restoran), nampaknya sektor perdagangan dan restoran yang memberikan sumbangan lebih besar daripada sektor perhotelan. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya ijin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Sementara jumlah penjualan kamar hotel di lingkungan Kabupaten Klaten memiliki kecenderungan menurun.

Sektor pertambangan/penggalian dinilai cukup efisien dalam berproduksi, dengan nilai LQ sebesar 1,13. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini juga memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, sehingga mampu menyumbang lebih banyak bagi PDRB Kabupaten Klaten. Saat ini, sektor pertambangan hanya menyumbang rata-rata sebesar 1,26% terhadap PDRB Kabupaten Klaten, sementara menurut pihak DPPKAD, sektor pertambangan/penggalian ini memiliki potensi besar yang belum dikelola secara optimal oleh pihak-pihak terkait. Namun demikian, berdasarkan nilai LQ-nya, sektor pertambangan/penggalian dinilai cukup efisien, artinya dengan kondisi yang ada sekarang Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhannya dari sektor pertambangan, bahkan mampu memenuhi kebutuhan daerah lain.

Sementara sektor pertanian yang oleh beberapa pihak luar (diantaranya pihak Bank Indonesia Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) diakui sebagai sektor unggulan di Kabupaten Klaten, memiliki nilai LQ pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 1,08 dan 1,09, sehingga bisa disimpulkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Klaten memiliki potensi yang cukup baik, dan sektor ini menyumbang rata-rata sebesar 21% terhadap total PDRB Kabupaten Klaten. Berdasarkan tata guna lahannya, 51,41% tanah di lingkungan Kabupaten Klaten digunakan sebagai lahan persawahan dengan kondisi tanah yang cukup subur. Selama bertahun-tahun, Kabupaten Klaten merupakan penyangga pangan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dengan produk unggulannya berupa beras Delanggu (www.jatengprov.go.id). Dua kondisi ini merupakan alasan mengapa pihak Provinsi Jawa Tengah

memprediksikan bahwa Kabupaten Klaten sangat potensial untuk dijadikan kawasan agropolitan, yaitu kawasan yang berbasis pertanian yang berkelanjutan.

Namun, meskipun memiliki potensi yang baik, ternyata *share* sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Klaten memiliki kecenderungan menurun. Bupati Klaten dalam Harian Solo Pos tanggal 27 Juli 2007 menyatakan pada tahun 2007, diakui bahwa produksi sektor pertanian mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya jenis hama yang menyerang tanaman padi. Selain itu, gempa tektonik yang terjadi pada tahun 2006 menyebabkan kerusakan pada sistem irigasi di Kabupaten Klaten, yang secara tidak langsung mempengaruhi produksi padi. Masalah lain yang menyebabkan turunnya hasil produksi sektor pertanian, masih menurut Bupati Klaten, adalah rusaknya ekosistem lahan pertanian karena pengolahan lahan yang tidak memperhatikan lingkungan.

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya *share* sektor pertanian dalam PDRB adalah karena berkurangnya lahan pertanian/persawahan. Selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa banyak terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan/pemukiman, untuk lahan industri, dan lahan perdagangan. Pada tahun 2006, lahan pertanian berkurang seluas 27 ha, pada tahun 2007 berkurang lagi seluas 32 ha, dan pada tahun 2008 berkurang lagi seluas 12 ha (Berita Daerah Kabupaten Klaten). Mengingat potensi pertanian yang cukup baik, sektor pertanian dapat terus dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Klaten.

Sektor industri pengolahan mendapatkan nilai LQ sebesar 0,62, dan sehingga dikategorikan sebagai sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi mengimpor dari daerah lain. Meskipun berdasarkan perhitungan LQ sektor industri pengolahan bukan merupakan sektor yang efisien, namun sebenarnya Kabupaten Klaten memiliki modal dasar yang cukup baik dalam rangka pengembangan sektor ini. Beberapa produk unggulan yang direkapitulasi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM antara lain adalah industri pengecoran logam, industri pande besi, industri mebel, industri tembakau, industri konveksi, dan industri keramik/genteng (www.jatengprov.go.id). Dan, industri pengolahan menyumbang rata-rata sebesar 19% terhadap PDRB Kabupaten Klaten.

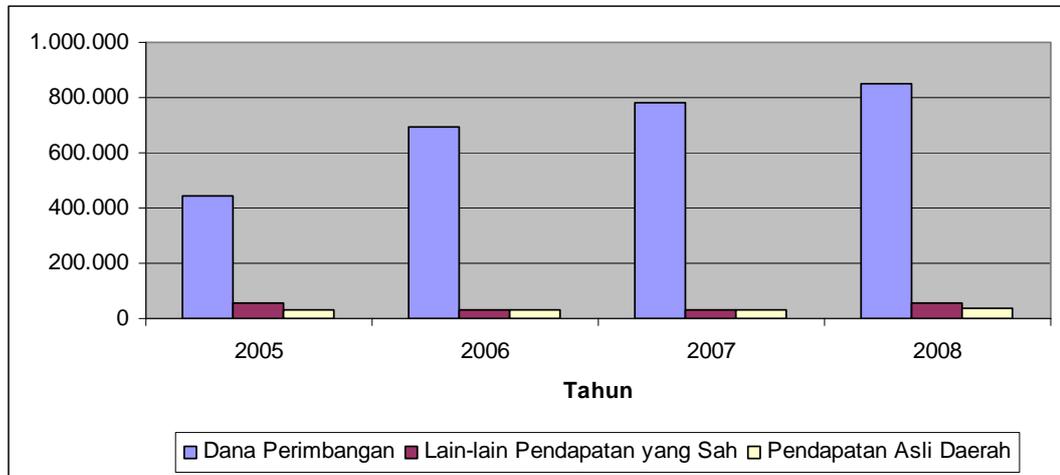
Industri kecil lain yang saat ini mulai berkembang kembali di Kabupaten Klaten adalah kerajinan kain Lurik, kain khas Klaten. Kain lurik, pada masanya dahulu pernah menjadi industri yang berkembang pesat, namun lambat laun mengalami kemerosotan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengrajin kain lurik. Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, melalui instruksi Bupati, telah menggalakkan kembali kerajinan kain lurik dan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memakai baju dari kain lurik setiap hari Kamis dan Jumat. Dengan adanya instruksi ini, tentu saja membangkitkan kembali kerajinan kain lurik yang telah lama mati suri, ditambah lagi kabupaten-kabupaten sekitar juga banyak memesan kain lurik untuk dijadikan seragam PNS di lingkungan mereka.

3.6.3. Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Secara umum pendapatan daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 total pendapatan daerah sebesar Rp529.739.191.842,00, dan mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi Rp760.141.004.532,00, tahun 2007 menjadi sebesar Rp845.758.146.077,00, dan tahun 2008 menjadi sebesar Rp948.449.016.821,00.

Dari grafik 3.1 dapat terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat dijadikan sumber pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2005, PAD hanya menyumbang sekitar 5,49% terhadap total penerimaan, sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan 2008, sumbangan PAD terhadap total penerimaan daerah adalah sebesar 4,46%, 3,96%, dan 4,04%. Dampak otonomi daerah pada Kabupaten Klaten masih terlihat stagnan, karena pada kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten Klaten belum mampu mencukupi kebutuhan belanja melalui PAD, dan masih sangat tergantung dengan transfer pemerintah pusat.

(Dalam Juta)



Gambar 3.2 Komposisi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2008

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2005 – 2008.

3.6.4. Belanja Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008, belanja daerah Tahun 2008 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan tersebut ditempuh dengan cara:

- Meningkatkan proporsi belanja modal dan investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- Meningkatkan efisiensi dan fektifitas belanja daerah melalui penyusunan Standar Analisis Belanja, Standar Harga, dan Tolok Ukur Kinerja serta intensifikasi pengawasan, baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
- Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan setiap pimpinan;

- Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menjamin alokasi belanja daerah dengan memberikan skala prioritas belanja yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 dan 2008
(Dalam juta)

No	Keterangan	2007	2008
1	Belanja Operasional	727.169.222.260	854.309.519.194
2	Belanja Modal	138.749.673.852	144.478.226.483
3	Belanja Tak Terduga	187.226.000	645.400.000
4	Belanja Transfer	603.226.207	701.653.358
	Total Belanja	866.709.348.319	1.000.134.799.035

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2007 dan 2008

Pada tahun 2007, sekitar 58,74% dari APBD Kabupaten Klaten digunakan belanja pegawai dan hanya 41,26% APBD yang dialokasikan sebagai anggaran publik. Salah satu faktor yang menyebabkan dominannya belanja pegawai adalah karena jumlah PNS di lingkungan Kabupaten Klaten yang sangat banyak, yang tentu saja membebani dan menyedot Dana Alokasi Umum (DAU). Dana anggaran publik yang hanya sekitar 40% ini tentu saja masih sangat perlu ditambah karena masih banyak wilayah yang masih harus dibangun, karena pengembangan wilayah untuk kepentingan publik tidak semuanya bisa diakomodir karena keterbatasan dana. Bahkan menurut beberapa pihak, selama 4 tahun terakhir pembangunan di pusat kota dianggap cenderung stagnan, dan tidak ada pembangunan yang berarti. Tetapi pada kenyataannya, pada tahun 2008 jumlah belanja pegawai justru naik menjadi 63,97%, sehingga porsi untuk kepentingan publik semakin berkurang.

3.6.5. Penanaman Modal

Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten akan dana perimbangan dari pemerintah pusat sangat besar, dan menyebabkan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sangat lemah. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten belum mampu menjadi penopang pembiayaan pembangunan. Untuk itulah sangat diperlukan penggalan potensi pajak dan retribusi daerah, dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dalam rangka menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Klaten.

Namun pada kenyataannya, belum banyak investor yang mau berinvestasi di lingkungan Kabupaten Klaten. Permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh rumitnya proses birokrasi. Sistem birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dinilai rumit dan berbelit-belit, sehingga para investor harus berpikir dua kali sebelum bersedia menanamkan investasi ke Kabupaten Klaten. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus berani melakukan reformasi birokrasi, dan memotong jalur birokrasi sehingga para investor tidak merasa dipersulit dalam mengurus segala keperluan investasinya.

Tabel 3.18 Penanaman Modal di Kabupaten Klaten Tahun 2008

No	Bidang Usaha	Jumlah Usaha	Nilai Investasi (milyar)	Total Tenaga Kerja	Status
1	Perikanan	1	31.334	79	PMA
2	Mesin dan Logam	1	9.519	62	PMA
3	Air Minum Dalam Kemasan	2	15.150	1.500	PMDN
4	Furniture	11	132.830	891	PMA/PMDN
5	Sarung Tangan Olahraga	4	9.940	1.148	PMA
6	Pertanian/agro	3	107.480	131	PMA
7	Textile	1	7.500	911	PMDN
8	Bubur Bayi dan Susu	1	250.636	794	PMA
9	Jasa Rekreasi/entertainer	2	124.650	1.647	PMA/PMDN
10	Jasa perdagangan	5	55.938	674	PMA/PMDN
11	Perdagangan Logistik	1	3.150	100	PMA
12	Pendidikan/Ketrampilan	1	1.500	25	PMA

(Sambungan)

No	Bidang Usaha	Jumlah Usaha	Nilai Investasi (milyar)	Total Tenaga Kerja	Status
13	Penyamakan Kulit	1	2.250	200	PMA
14	Industri Rokok	1	4.150	100	PMDN

Sumber: Klaten Dalam Angka 2008

3.7. Potensi Kabupaten Klaten

3.7.1. Potensi Sumber Daya Alam

Karena kondisi wilayah Kabupaten Klaten yang bervariasi, banyak potensi sumber daya alam yang sangat menguntungkan bagi Kabupaten Klaten, diantaranya:

a. Potensi Pajak Galian Gol. C

Sebagai daerah yang sebagian besar daerahnya merupakan dataran rendah dan pegunungan kapur dan wilayah utaranya merupakan wilayah pegunungan, Kabupaten Klaten memiliki banyak keuntungan dan potensi. Potensi wisata pegunungan, potensi penambangan pasir di daerah barat laut, dan potensi penambangan kapur di wilayah tengah.

Dengan potensi sebesar itu, namun berdasarkan fakta pada tabel 3.17 tampaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten belum dapat memaksimalkan potensi yang ada. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Klaten masih belum optimal, hal ini berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada bulan Mei 2008, yang menyimpulkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki potensi penerimaan pajak dari bahan galian golongan C yang sangat luar biasa.

Tabel 3.19 Potensi Pajak Galian C Kabupaten Klaten Tahun 2008

(dalam ribu)

No	Pos Pemungutan	Potensi Pajak per Triwulan (Rp)				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	Mipitan	382.680	765.360	1.148.040	1.148.040	3.444.120
2	Depan Koramil Manisrenggo	104.760	209.520	314.280	314.280	942.840
3	Tambakan/Joton	60.480	120.96	181.440	181.440	544.320
4	Leses Manisrenggo	25.200	50.400	75.600	75.600	226.800
5	Ngemplak Karangnongko	66.240	132.480	198.720	198.720	596.160
6	Surowono Kemalang	116.640	233.280	349.920	349.920	1.049.760
	total	756.000	1.512.000	2.268.000	2.268.000	6.804.000

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008.

Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak bahan galian golongan C selama tahun 2005 sampai tahun 2008 tidak bisa mencapai hasil seperti yang dihasilkan dalam survey tersebut diatas. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menyatakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak bahan galian Golongan C tersebut dikarenakan adanya keberatan dari para penambang apabila tarif pajak disesuaikan. Selain itu, belum tercapainya target pendapatan di Kabupaten Klaten dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan pajak dan retribusi.

b. Sumber Air Tanah

Aset berharga lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten adalah sumber mata air Cokro di Desa Ponggok kecamatan Polanharjo, dan sumber mata air Cokro Tulung di Kecamatan Tulung. Kedua sumber mata air ini, saat ini dikerjasamakan dengan dua pihak, yaitu PT. Tirta Investama (produsen air minum kemasan) untuk sumber mata air Cokro di Desa Ponggok kecamatan Polanharjo dengan surat kesepakatan bersama tanggal 20 Maret 2002 dan diperbaharui dengan surat kesepakatan bersama tanggal 12 Mei 2005. Sedangkan sumber mata air Cokro

Tulung di Kecamatan Tulung dimanfaatkan oleh PDAM Kota Surakarta sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 503/1021/2000 tanggal 24 November 2000 tentang Penggunaan/Pengambilan Air Bersih di Sumber Mata Air Cokro Tulung.

Kerjasama ini menunjukkan adanya pengelolaan aset yang baik. Dengan potensi yang dimiliki, pemerintah daerah telah memperoleh keuntungan dari kerja sama yang dilakukan dengan kedua pihak tersebut diatas. PT. Tirta Investama setiap tahun memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dan pada tahun 2008 PT. Tirta Investama telah menyumbangkan dana sebesar Rp4.422.049.940,00.

3.7.2. Potensi Pariwisata

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pembinaan/Pengembangan Obyek Wisata Kabupaten Klaten Tahun 1986, Kabupaten Klaten memiliki berbagai macam jenis obyek wisata, baik berupa wisata alam maupun wisata budaya. Obyek wisata alam di lingkungan Kabupaten Klaten berupa keindahan alam dan pemandian/sendang, setidaknya terdapat 4 obyek keindahan alam dan 10 obyek wisata pemandian/sendang. Untuk wisata budaya, Kabupaten Klaten memiliki setidaknya 7 candi, 12 tempat ziarah, 5 upacara tradisional, dan 9 kesenian tradisional khas Kabupaten Klaten. Namun, tidak seluruh obyek wisata tersebut bisa dinikmati lagi saat ini, karena beberapa dari obyek wisata tersebut telah rusak, khususnya yang berupa pemandian/sendang.

Dari aset yang ada dan telah dimanfaatkan potensinya, berikut ini adalah beberapa aset lain yang sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

a. Kompleks Candi Sewu

Candi Sewu adalah kompleks Candi Budha terbesar kedua setelah Candi Borobudur, dan berada tidak jauh dari kompleks Candi Prambanan. Sebagai aset budaya sekaligus aset daerah, ternyata kompleks Candi Sewu ini kurang mendapatkan perhatian, dan menjadi “anak tiri” karena pemerintah daerah Kabupaten Klaten cenderung lebih memperhatikan Candi Prambanan, sehingga kompleks Candi Sewu dan candi-candi yang lain (seperti Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubah,

Candi Asu, Candi Sojiwan dan Candi Merak) kurang mendapat kesempatan untuk dipromosikan sebagai tempat wisata yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Dengan kesadaran bahwa pemerintah daerah memiliki potensi wisata yang luar biasa, dan dengan dukungan yang cukup kepada Kompleks Candi Sewu ini, maka diharapkan potensi ini akan menjadi kekuatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk menggerakkan perekonomian sekitar sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.

b. Yaqowiyu

Selain memiliki aset yang nyata, Pemerintah daerah Kabupaten Klaten juga memiliki *intangible asset*, yaitu tradisi Yaqowiyu. Tradisi Yaqowiyu adalah upacara adat yang diadakan di kecamatan Jatinom, yang diadakan setiap bulan Jawa pada bulan Sapar, sehingga oleh penduduk setempat sering disebut tradisi Saparan. Upacara Yaqowiyu ditandai dengan penyebaran kue apem, kue tradisional di kabupaten Klaten, yang disebarkan dari atas menara masjid untuk kemudian diperebutkan oleh masyarakat yang sudah menunggu disekitarnya. Kue apem ini dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang membawa kesejahteraan bagi yang berhasil mendapatkannya (www.wikipedia.co.id). Tradisi ini sama uniknya dengan tradisi lompat batu di Nias, atau tradisi syawalan di Keraton Surakarta.

c. Rawa Jombor

Masyarakat Klaten dan sekitarnya tentu sudah tidak asing dengan obyek wisata Rowo Jombor, yang merupakan salah satu obyek wisata andalan yang dimiliki Kabupaten Klaten. Rowo jombor adalah semacam danau yang memiliki fasilitas rumah makan apung di atasnya.

Dalam situs pariwisata milik Departemen Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa rawa Jombor merupakan daerah tujuan wisata alam yang sangat menarik dengan hamparan air rawa yang jernih. Daerah tersebut dikelilingi oleh pegunungan kapur yang sangat indah. Oleh penduduk sekitar, rawa tersebut dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan dan budidaya ikan dalam terumbu. Selain itu juga difungsikan sebagai tempat penampungan air untuk irigasi daerah-daerah sekitarnya.

d. Umbul Ingas

Umbul Ingas adalah obyek wisata keluarga terbaru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten secara *multi years* dari tahun 2007, dan pada tahun 2010, Umbul Ingas direncanakan akan mulai dibuka untuk umum. Umbul Ingas berbentuk *water boom* dengan luas mencapai 495m², dan dilengkapi dengan *water slide* (luncuran air) dengan ketinggian mencapai 8m dan panjang lintasan mencapai 50m.

e. Desa Kerajinan Gerabah Bayat

Kabupaten Klaten merupakan daerah penghasil kerajinan yang cukup besar. Berbagai jenis kerajinan yang dihasilkan seperti lukis payung, lukis kaca, dan gerabah merupakan komoditi yang mampu meningkatkan dan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Klaten. Salah satu diantara kerajinan tersebut adalah gerabah, dimana Desa Bayat merupakan salah satu penghasil gerabah yang sangat besar.

Sebenarnya hasil kerajinan gerabah di Bayat tidak kalah unik dengan kerajinan gerabah milik Desa Kasongan di Bantul, Yogyakarta. Jika gerabah Kasongan lebih cenderung bernuansa China seperti guci dan vas bunga berbentuk guci, kerajinan gerabah di Bayat justru lebih indah dengan tema etnis yang lebih rumit. Gerabah dari Bayat ini banyak diekspor keluar negeri untuk memenuhi pesanan para wisatawan yang sebelumnya datang ke Bayat. Namun krisis yang melanda perekonomian Indonesia serta peristiwa bom Bali, sangat mempengaruhi produksi gerabah di Bayat ini. Sekarang ekspor menurun drastis, dan pesanan lebih banyak dari dalam kota, seperti untuk keperluan kafe atau semacamnya, itupun jumlahnya tidak seberapa (<http://komboran.blogspot.com> dan <http://pariwisata.solonet.co.id>).

3.8. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010

3.8.1. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Komitmen merupakan kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya

Peraturan Daerah), maupun karena ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga.

a. Program Jaminan Kesehatan Daerah

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di rumah sakit, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program ini dijalankan sejak Tahun Anggaran 2008 sebagai pendamping dari Program Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah pusat.

Tujuan Jamkesda adalah untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Klaten atas beban biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Sasaran program adalah penduduk miskin di Kabupaten Klaten yang tidak masuk dalam daftar peserta Jamkesmas. Program ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran, bekerja sama dengan 7 (tujuh) rumah sakit di Kabupaten Klaten, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.

Jumlah penduduk miskin yang diikutsertakan dalam Program Jamkesmas tahun 2008 sebanyak 396.488 orang, dan peserta Jamkesda sebanyak 26.080 orang, diluar peserta program Jamksesmas atau seluruhnya sebanyak 422.568 orang, yaitu 32,58% dari jumlah penduduk Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten).

b. Kerjasama antar pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “*Subosukawonosraten*” yang dibentuk bersama dengan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

Forum tersebut telah mendirikan usaha bersama bernama PT. Solo Raya Promosi yang berdiri pada tanggal 12 Juli 2006. PT Solo Raya Promosi bergerak dibidang jasa, yang memberikan jasa promosi kepada pemerintah daerah yang menjadi anggotanya untuk mempromosikan daerah dan produk-produk unggulan daerahnya masing-masing, termasuk lokasi wisata.

3.8.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010, dinyatakan bahwa perekonomian Kabupaten Klaten di masa yang akan datang diarahkan menjadi perekonomian daerah yang mandiri dan kreatif, sehingga diperlukan landasan dan struktur perekonomian yang kokoh. Struktur ekonomi tidak hanya didominasi oleh sektor primer, tetapi juga didukung dengan sektor sekunder dan tersier, terutama melalui sektor dan sub sektor andalan dan alternatif pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki. Pada aspek pendapatan daerah, diusahakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat menjadi kekuatan potensial Kabupaten Klaten di masa yang akan datang. Selain itu, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Klaten juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat daya beli masyarakat, serta tetap menjaga stabilitas harga dalam rangka meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat.

Untuk mencapai target tersebut, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dapat dicapai dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong kebijakan investasi di sektor industri, pertanian, dan perdagangan yang berorientasi ekspor serta pengembangan pariwisata.

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi tersebut, maka sasaran ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2010 adalah:

- Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka;
- Terjaganya stabilitas harga;
- Tersedianya investasi untuk pembiayaan pembangunan.

3.8.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Guna mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Klaten, maka beberapa kebijakan dapat dilakukan, antara lain:

- 1). Meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah (pajak dan retribusi) dengan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan sesuai standar baku;
- 2). Meningkatkan ekstensifikasi pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) sesuai kewenangan kabupaten secara optimal;
- 3). Melakukan deregulasi dan RIA (*Regulatory Investment Assessment*) atas berbagai kebijakan peraturan daerah dan pelaksanaannya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
- 4). Memberikan rangsangan ataupun insentif dan meningkatkan pengawasan kepada para pemungut pajak dan retribusi untuk menurunkan inefisiensi dan kebocoran;
- 5). Meningkatkan komunikasi dengan dunia usaha ataupun swasta dalam rangka membangun pemahaman bersama mengenai kewajiban CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan hibah swasta dalam pembangunan daerah;
- 6). Mengoptimalkan pendapatan hasil usaha BUMD terhadap PAD pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya.

b. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Klaten antarlain diarahkan untuk:

- 1). Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan apabila terjadi defisit anggaran diusahakan dapat ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA);
- 2). Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pihak ketiga.

c. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, Belanja Daerah Kabupaten Klaten diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Untuk itu, kebijakan-kebijakan yang ditempuh antara lain:

- 1). Meningkatkan proporsi Belanja Langsung pada pos belanja modal dan investasi yang dapat memberikan dampak besar dalam peningkatan roda perekonomian masyarakat dan mempunyai efek ganda (multiplier effect) terhadap aktivitas pada kegiatan-kegiatan kehidupan produktif lainnya;
- 2). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam belanja daerah melalui penyusunan Analisa Standar Harga dan Belanja Daerah (ASHBD) dan tolok ukur kinerja serta intensifikasi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga yang berwenang;
- 3). Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan laporan akuntabilitas keuangan oleh setiap SKPD dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan kegiatan oleh setiap pimpinan SKPD maupun lembaga yang berwenang;
- 4). Meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD sesuai dengan tupoksinya guna menghindari terjadinya duplikasi anggaran;
- 5). Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 6). Menjamin alokasi belanja daerah dengan memberikan skala prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

3.8.4. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2010

Pada akhir tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006 – 2010, pemerintah daerah Kabupaten Klaten masih menghadapi beberapa permasalahan strategis seperti berikut ini,

- a. Masih banyaknya penduduk yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial dan berada di bawah garis kemiskinan;
- b. Ketersediaan lapangan kerja belum memadai sehingga angka pengangguran masih cukup tinggi;
- c. Masih rendahnya sumber anggaran yang berasal dari PAD;
- d. Kondisi infrastruktur daerah terutama bidang irigasi masih banyak yang belum memadai;
- e. Pertumbuhan ekonomi antar wilayah masih belum merata;
- f. Masih rendahnya daya saing daerah;
- g. Belum optimalnya pelayanan publik sebagai perwujudan atas supremasi hukum dan perlindungan hukum;
- h. Implementasi dari berbagai peraturan perundangan belum sepenuhnya mampu dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program otonomi daerah;
- i. Menurunnya kualitas sumber daya alam (SDA) terutama untuk tingkat kesuburan tanah pertanian.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

- a. Meningkatkan upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah;
- b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat daya tahan ekonomi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya bidang irigasi, pertanian, industri, dan pariwisata;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Peningkatan kualitas SDM dan SDA guna mendukung kualitas dan kuantitas pembangunan daerah;
- e. Peningkatan pelayanan publik;
- f. Peningkatan peraihan dana dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunan daerah serta menjadikan tahun kreatif di masa mendatang dalam rangka penggalan sumber dana dan akselerasi pembangunan daerah.

Dalam rangka penjabaran atas kebijakan umum tersebut diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2010 diarahkan untuk:

- a. Mempertajam prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Peningkatan pelaksanaan program pertanian terpadu melalui revitalisasi pertanian;
- c. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- d. Memantapkan pelaksanaan program-program otonomi daerah;
- e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Peningkatan daya tarik, daya tahan, dan daya saing daerah;
- g. Peningkatan peran serta stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat;
- h. Peningkatan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB 4

METODOLOGI

4.1. Langkah Penggunaan Model

Langkah pertama diawali dengan analisis faktor internal dan eksternal. Kemudian dilakukan pendekatan analisis SWOT dengan interaksi matriks IFAS-EFAS, untuk memperoleh beberapa alternatif strategi yang paling sesuai/dominan menurut skala prioritasnya. Terhadap beberapa alternatif strategi yang dihasilkan tersebut, kemudian dilakukan pemilihan skala prioritas kepentingan, diantara permasalahan yang dikemukakan pada setiap levelnya, dengan menggunakan analisis model AHP.

Langkah kedua adalah memilih alternatif strategi kebijakan mana yang harus diprioritaskan dengan menggunakan pendekatan AHP. Hasil analisis AHP inilah yang akan menjadi rekomendasi alternatif strategi kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

4.2. Analisis SWOT

Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis SWOT dilakukan sebagai berikut:

4.2.1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal

Tahap pertama dalam analisis SWOT adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang dianggap berpengaruh secara positif maupun secara negatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting karena hasil dari identifikasi ini akan menjadi dasar untuk kegiatan analisis berikutnya. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, kajian literatur, berita-berita yang dimuat di media lokal, dan melakukan survey pendahuluan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

4.2.2. Penyusunan Kuisisioner

Setelah faktor-faktor internal dan eksternal telah teridentifikasi, kemudian disusun sebuah kuisisioner sebagai sarana untuk mendapatkan penilaian dari responden terhadap faktor-faktor yang telah dirumuskan. Penilaian terhadap faktor-faktor yang telah diidentifikasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Penilaian terhadap prestasi faktor.

Penilaian pada tahap ini diberikan skala antara 1 sampai dengan 9, yang mempunyai arti sebagai berikut:

- Skala 1 berarti amat sangat buruk;
- Skala 2 berarti sangat buruk;
- Skala 3 berarti buruk;
- Skala 4 berarti sedikit buruk;
- Skala 5 berarti sedang/netral;
- Skala 6 berarti sedikit baik;
- Skala 7 berarti baik;
- Skala 8 berarti sangat baik;
- Skala 9 berarti amat sangat baik.

2. Penilaian urgensi (tingkat kepentingan) terhadap penanganan faktor-faktor.

Penilaian pada tahap ini diberikan skala a sampai dengan d, yang mempunyai arti sebagai berikut:

- Skala a berarti sangat penting untuk dilakukan penanganan;
- Skala b berarti penting untuk dilakukan penanganan;
- Skala c berarti kurang penting untuk dilakukan penanganan;
- Skala d berarti tidak penting untuk dilakukan penanganan.

4.2.3. Penentuan responden

Setelah kuisisioner selesai disusun, maka tahap berikutnya adalah penentuan responden yang akan mengisi kuisisioner tersebut. Penentuan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan keterkaitan calon responden dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pemilihan responden ditetapkan secara *purposive*, atau ditetapkan langsung berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Adapun responden yang diminta melakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal dalam kuisisioner SWOT dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Dari sisi pemerintah daerah. Dari kelompok ini, responden yang mengisi kuisisioner adalah dari SKPD Bappeda sebanyak 5 responden, Sekretariat Daerah 2 responden, Dinas Perindagkop 7 responden, DPPKAD 3 responden;
2. Dari sisi akademisi. Dari kelompok ini terdapat 3 responden yang mengisi kuisisioner, yaitu Dekan dan 2 orang dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Widyadharma

Jumlah total responden yang melakukan penilaian/pengisian kuisisioner adalah sebanyak 20 responden, yang apabila dilihat dari segi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pendidikan S2 : 15 responden
- Pendidikan S1 : 5 responden

Dari ke dua puluh responden tersebut, terdiri dari 15 responden pria, dan 5 responden wanita (Daftar responden dapat dilihat pada lampiran 1).

4.2.4. Analisis Data

Setelah pengisian kuisisioner, maka akan didapatkan persepsi ahli atas faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, sehingga kemudian akan didapatkan tabel indikator faktor-faktor intern dan ekstern, seperti yang dijelaskan pada tabel 4.1.

Dari penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan dan peluang (*opportunity*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

Tabel 4.1 Indikator Faktor dalam SWOT

Penilaian Terhadap Indikator-Indikator Faktor Internal dan Eksternal	
Faktor Internal	Faktor eksternal
Faktor 1	Faktor 1
Faktor 2	Faktor 2
Faktor 3, dst	Faktor 3, dst

Sumber: Soesilo (2002)

Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan IFAS – EFAS elemen-elemen SWOT dengan cara sebagai berikut:

- Setiap nilai rata-rata horizontal dikurangi nilai 5 (lima) sebagai nilai dari persepsi/pendapat responden yang lebih adil atas pembagian faktor internal menjadi *strength* dan *weakness*, dan faktor eksternal menjadi *opportunity* dan *threat*. Nilai 5 (lima) diambil sebagai patokan (*benchmark*) yang berkorelasi netral terhadap sasaran. Nilai yang dihasilkan kemudian disebut sebagai penyesuaian nilai rata-rata;
- Nilai penyesuaian bersifat nilai mutlak;
- Penentuan bobot dari masing-masing elemen SWOT untuk setiap faktornya dengan mengambil bobot masing-masing faktor = 100%. Bobot total dari setiap elemen SWOT menggambarkan total nilai penyesuaian rata-rata terhadap nilai total faktornya masing-masing;
- Pembobotan yang dipakai sebagai bahan penilain prioritas adalah bobot tertimbang yang diperoleh dari perkalian antara bobot x rating. Rating diperoleh dari nilai urgensi penanganan/skala prioritas kepentingan, sesuai dengan urutan level: huruf a = 4; b = 3; c = 2; d = 1.

4.2.5. Perumusan Strategi

Untuk mendapatkan prioritas dan keterkaitan antar strategi, maka dari hasil pembobotan IFAS-EFAS kuisisioner SWOT untuk masing-masing indikator tersebut, dilakukan interaksi kombinasi dari strategi yang meliputi kombinasi internal-eksternal, yang terdiri dari:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (SO); Interaksi kombinasi strategi SO: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi *Strength-Threat* (ST); Interaksi kombinasi strategi ST: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
3. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO); Interaksi kombinasi strategi WO: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
4. Strategi *Weakness-Threat* (WT) Interaksi kombinasi strategi WT: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Tabel 4.2 Matriks Faktor Internal dan Eksternal

		FAKTOR EKSTERNAL	
		OPPORTUNITY (O)	THREAT (T)
FAKTOR INTERNAL	STRENGTH (S)	Strategi SO	Strategi ST
	WEAKNESS (W)	Strategi WO	Strategi WT

Sumber: Nining I. Soesilo, 2002

Dari matriks tersebut akan diperoleh 4 pilihan strategi yang dapat diambil oleh *decision maker* sebagai strategi pilihan yang tentu saja ditentukan setelah mempertimbangkan potensi, kondisi dan kendala yang ada.

Kemudian dari interaksi strategi tersebut akan didapatkan Matriks SWOT – Interaksi IFAS – EFAS seperti yang dijelaskan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Matriks SWOT – Interaksi IFAS – EFAS

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada; ▪ Strategi agresif; ▪ Keunggulan komparatif. 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang; ▪ Strategi orientasi putar balik; ▪ Investasi/disvestasi.
Ancaman (T)	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman; ▪ Strategi diversifikasi; ▪ Mobilisasi. 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman; ▪ Strategi defensif; ▪ Kontrol kerusakan/Strategi riskan.

Sumber: Nining I. Soesilo, 2002

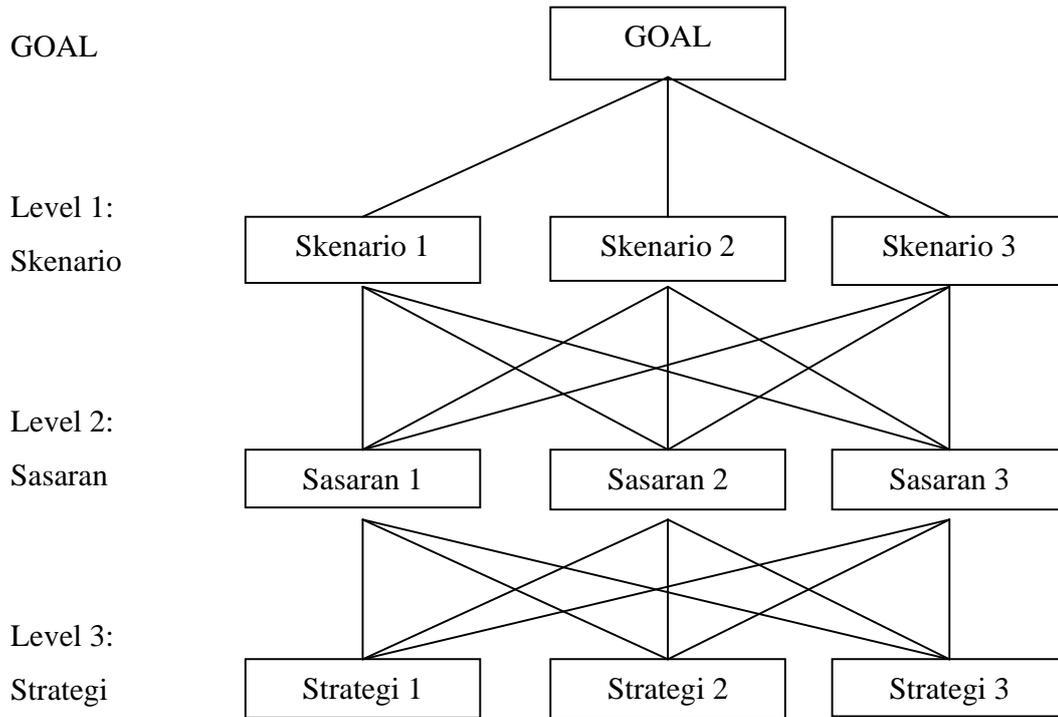
4.3. Analytical Hierarchy Process

Ciri pemecahan model AHP adalah menggunakan hirarki yang menguraikan permasalahan yang kompleks menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana. Hirarki dari metode ini dapat dibagi menjadi Goal, Skenario, Sasaran, dan Strategi.

4.3.1. Prinsip Penyusunan Hirarki

Dalam penelitian ini, hirarki yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang terbaik adalah hirarki yang terdapat pada

diagram 4.1. Alternatif strategi yang digunakan merupakan hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya.



Gambar 4.1 Penyusunan Hirarki Model AHP

4.3.2. Penyusunan Kuisisioner dan Responden

Pengisian kuisisioner bertujuan untuk menjangkau persepsi responden sebagai *expert* untuk menghasilkan data primer. Penggunaan kuisisioner ini dipilih karena cara konsensus, yaitu dengan mengumpulkan para responden secara bersamaan dalam tempat dan waktu yang sama, sangat sulit untuk dilakukan. Responden dipilih berdasarkan partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan, dan pengetahuan serta pemahaman responden terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Penentuan jumlah *expert* yang disyaratkan sebagai responden untuk memberikan penilaian pada kuisisioner AHP sebenarnya sangat relatif. Satu orang yang benar-benar menguasai permasalahan bisa saja memberikan hasil yang lebih baik

daripada penilaian banyak responden yang tidak terlalu memahami permasalahan. Namun, apabila respondennya terlalu sedikit, dan apabila penilaian yang diberikan bias, maka hasil analisis secara keseluruhan akan menjadi kurang baik. Untuk menghindari hal tersebut, maka *expert* yang dipilih jumlahnya tidak terlalu sedikit, sehingga apabila ada penilaian yang agak janggal dapat dinetralkan dengan penilaian rata-rata sejumlah *expert*.

Pada penelitian ini, *expert* yang diminta untuk menjadi responden kuisisioner AHP sebanyak 7 orang, yaitu, pejabat-pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, dosen-dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, dan tokoh masyarakat. (Daftar responden AHP dapat dilihat pada lampiran 3).

4.3.3. Penilaian Kuisisioner AHP

Penilaian responden atas kuisisioner AHP dilakukan dengan memberikan penilaian dari skala 1 sampai 9, dengan penjelasan seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Skala Perbandingan Secara Berpasangan

Skala	Artinya	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya (<i>equal importance</i>)	Kedua elemen yang diperbandingkan memberikan kontribusi yang sama besar untuk mencapai tujuan.
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>moderate importance</i>)	Pengalaman dan penilaian agak sedikit menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya.
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>essential/ strong importance</i>)	Pengalaman dan penilaian lebih kuat menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya.

(Sambungan)

Skala	Artinya	Keterangan
7	Elemen yang satu sangat lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>very strong importance</i>)	Sebuah elemen sangat lebih disukai daripada elemen yang lainnya, dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>extreme importance</i>)	Sebuah elemen mutlak lebih kuat disukai dari yang lainnya dan berada pada tingkat tertinggi.
2,4,6,8	Merupakan angka kompromi diantara penilaian diatas	Bila kompromi diperlukan diantara dua pertimbangan/penilaian.

Sumber: Saaty (1986)

4.3.4. Perumusan Strategi

Pengolahan data dengan metode AHP ini dilakukan dengan memberikan bobot kepada masing-masing responden. Pemberian bobot ini didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman para responden dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Klaten. Adapun pemberian bobot masing-masing responden dijelaskan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Pembobotan Responden

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Bobot
Responden 1	Kabid. Perencanaan Ekonomi	Bappeda	0,20
Responden 2	Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana	Bappeda	0,20
Responden 3	Kabid. Pendapatan, Evaluasi, dan Litbang	Bappeda	0,20
Responden 4	Kasubid Pemerintahan dan kependudukan	Bappeda	0,20
Responden 5	Dekan Fakultas Ekonomi	Univ. Widya Dharma	0,08
Responden 6	Dosen Fakultas Ekonomi	Univ. Widya Dharma	0,08
Responden 7	Tokoh Masyarakat/pengamat pembangunan	NA	0,04
	Total		1,00

Responden yang berasal dari unit kerja Bappeda diberi pembobotan paling besar karena mereka adalah orang-orang yang berperan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dan dianggap memiliki pengetahuan yang cukup mendetail mengenai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Klaten dalam rangka melaksanakan pembangunan.

4.3.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam metode AHP ini akan dilakukan dengan menggunakan *software Expert Choice 2000 2nd edition*.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka pemilihan strategi kebijakan pembangunan yang paling tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Analisis SWOT digunakan untuk menjangring persepsi dan penilaian ahli (*expert*) terhadap faktor internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, sehingga pada akhirnya didapatkan faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman. Dari penilaian bobot IFAS (*Internal Factor Analysis System*) dan EFAS (*External Factor Analysis System*), didapatkan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan dalam upaya pembangunan daerah Kabupaten Klaten.

Setelah didapatkan beberapa alternatif strategi, maka perlu dilakukan pemilihan prioritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Penentuan prioritas ini perlu dilakukan karena untuk melakukan seluruh strategi yang telah diperoleh melalui analisis SWOT akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan tidak semuanya bisa diakomodir oleh pihak pemerintah daerah. Untuk melakukan pemilihan prioritas strategi, maka digunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

5.1. Hasil dan Analisis SWOT

Analisis SWOT dalam rangka pemilihan alternatif kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten dilakukan dengan tahapan berikut:

5.1.1. Perumusan Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Berdasarkan dokumen-dokumen, kajian literatur, berita-berita yang dimuat di media lokal, survey pendahuluan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, serta gambaran umum yang telah diungkapkan dalam Bab 3, maka diperoleh elemen faktor-faktor internal dan eksternal seperti yang disajikan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2

Tabel 5.1 Perumusan Identifikasi Faktor Internal

<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Kabupaten Klaten 2. Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang bervariasi (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda); 3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Klaten; 4. Ketersediaan infrastruktur dasar; 5. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian; 6. Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten; 7. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro; 8. Kapasitas dan kinerja kelembagaan di Kabupaten Klaten; 9. Potensi Sumber Daya Alam; 10. Tingkat partisipasi masyarakat; 11. Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah; 12. Potensi pariwisata; 13. Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah; 14. Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor); 15. Penentuan skala prioritas pembangunan; 16. Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten; 17. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Klaten

Tabel 5.2 Perumusan Identifikasi Faktor Eksternal

<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 2. Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009;

3. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
4. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia;
5. Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China dan ASEAN lainnya (ACFTA);
6. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional;
7. Kondisi sosial politik di tingkat nasional;
8. Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten;
9. Berbagai program pemerintah pusat;
10. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer;
11. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat;
12. Kemajuan teknologi;
13. Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah;
14. Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Klaten;
15. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten.

Berdasarkan penilaian responden, maka faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal tersebut dapat dikategorikan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, seperti yang tercantum pada lampiran 3, yang secara ringkas dapat dijelaskan pada tabel 5.3 dan tabel 5.4.

Tabel 5.3 Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Internal

	Faktor Internal	Bobot	Kriteria
1	Posisi geografis	7,75	S
2	Kondisi topografi	6,70	W
3	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia	7,55	S
4	Ketersediaan infrastruktur dasar	6,95	S
5	Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian	7,90	S
6	Sarana dan prasarana perekonomian	7,00	S

(Sambungan)

	Faktor Internal	Bobot	Kriteria
7	Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro	7,35	S
8	Kapasitas dan kinerja kelembagaan	6,40	W
9	Potensi Sumber Daya Alam	7,00	S
10	Tingkat partisipasi masyarakat	6,30	W
11	Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan	6,55	W
12	Potensi pariwisata	6,90	S
13	Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah	6,60	W
14	Upaya mensosialisasikan potensi daerah	6,20	W
15	Penentuan skala prioritas pembangunan	6,40	W
16	Sistem birokrasi	6,05	W
17	Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD	6,00	W
	Rata-rata	6,80	

Sumber: penilaian responden atas kuisioner SWOT

Tabel 5.4 Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Eksternal

	Faktor Eksternal	Bobot	Kriteria
1	Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan keseimbangan keuangan pusat dan daerah	6,60	O
2	Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009	6,70	O
3	Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	6,95	O
4	Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia	6,05	T
5	Ditandatangani kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China	5,40	T
6	Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional	6,60	O
7	Kondisi sosial politik di tingkat nasional	6,30	T
8	Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten	6,45	O
9	Berbagai program pemerintah pusat	6,85	O
10	Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer	6,75	O

(Sambungan)

	Faktor Eksternal	Bobot	Kriteria
11	Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat	6,25	T
12	Kemajuan tehnologi	6,65	O
13	Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah	6,40	T
14	Investasi swasta	6,15	T
15	Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten	6,45	O
	Rata-rata	6,44	

Sumber: penilaian responden atas kuisisioner SWOT

Dari tabel 5.3 dan tabel 5.4 dapat terlihat bahwa hasil pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal relatif rapat, dalam artian selisih antara faktor-faktor yang dibobotkan sangat kecil dan hampir semua berkisar diantara bobot 6 dan 7. Hal ini mengimplikasikan bahwa apabila dilakukan penilaian ulang pada responden, bisa jadi didapatkan hasil yang berbeda.

5.1.1.1. Faktor-faktor Internal

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai *benchmark* atau rata-rata dari seluruh faktor internal adalah sebesar 6,80. Faktor-faktor internal tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal yang nilai rata-ratanya diatas nilai *benchmark*, dikelompokkan sebagai kekuatan (*strength*), dan faktor internal yang nilai rata-ratanya dibawah nilai *benchmark*, yang dikelompokkan sebagai kelemahan (*weakness*).

Tabel 5.5 Ringkasan Pembobotan Faktor-Faktor Internal

	Strength	Rata2
1	Posisi geografis Kabupaten Klaten dalam menunjang terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa	7,75
3	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Klaten	7,55
4	Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, dan infrastruktur jalan	6,95
5	Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian	7,9
6	Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten	7
7	Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro	7,35
9	Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten sebagai sumber PAD dan pembangunan	7
12	Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata	6,9
	Weakness	Rata2
2	Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang bervariasi (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda)	6,7
8	Kapasitas dan kinerja kelembagaan di Kabupaten Klaten	6,4
10	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	6,3
11	Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah	6,55
13	Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah	6,6
15	Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor)	6,2
16	Penentuan skala prioritas pembangunan	6,4
17	Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten dalam upaya penciptaan investasi di Kabupaten Klaten	6,05
18	Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Klaten	6

Sumber: Hasil penilaian responden atas kuisisioner SWOT

a. Faktor Kekuatan (strength)

Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian seluruh responden, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. *Posisi geografis Kabupaten Klaten.* Posisi geografis Kabupaten Klaten mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,75. Kabupaten Klaten terletak diantara daerah-daerah yang sudah maju dan memiliki fasilitas-fasilitas yang telah berstandar internasional. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Klaten, karena bagaimanapun pasti terdapat efek limpahan dari fasilitas tersebut, seperti misalnya bandar udara, maupun fasilitas jalan yang dapat mempermudah aktivitas perekonomian di Kabupaten Klaten. Posisi yang sangat strategis tersebut, menunjang terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten.
2. *Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.* Faktor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Kabupaten Klaten mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,55. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang cukup banyak tentu saja dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Dari sisi kualitas, sumber daya manusia di Kabupaten Klaten juga sangat mendukung pembangunan, karena pembangunan manusia di Kabupaten Klaten bisa dikatakan berhasil, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia-nya yang terus meningkat dan IPM Kabupaten Klaten menduduki peringkat kedua diantara daerah-daerah se-eks Karesidenan Surakarta. Dengan kondisi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten memiliki modal dasar yang cukup baik, yaitu sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas.
3. *Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, dan infrastruktur jalan,* faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,95. Sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial lainnya, sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Infrastruktur dasar

di Kabupaten Klaten, secara umum telah tersedia secara merata dan mencukupi di seluruh wilayah, walaupun dengan kualitas yang masih beragam.

4. *Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,9. Kabupaten Klaten selama bertahun-tahun dikenal sebagai lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah. Meskipun secara umum sektor pertanian bukan lagi menjadi sektor utama bagi perekonomian Kabupaten Klaten, namun saat ini pemerintah Kabupaten Klaten sedang menggalakkan peningkatan pelaksanaan program pertanian terpadu melalui revitalisasi pertanian.
5. *Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7. Pasar dan kawasan ekonomi lainnya di lingkungan Kabupaten Klaten telah cukup tersedia secara merata. Pemerintah daerah Kabupaten Klaten banyak membangun pasar untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian masyarakat setempat.
6. *Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7,35. Kabupaten terkenal dengan beberapa industri yang mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Industri tersebut antara lain, industri mebel, cor logam, keramik/gerabah, dan konveksi. Banyaknya industri dan beberapa produk *home made* yang dihasilkan oleh Kabupaten Klaten menunjukkan tingginya keuletan dan jiwa kewirausahaan masyarakat Kabupaten Klaten. Bahkan, produk kain khas Kabupaten Klaten yang sempat tidak diproduksi lagi dalam beberapa tahun, saat ini mulai kembali diproduksi. Selain terkenal dengan berbagai industrinya, Kabupaten Klaten juga mulai memperkuat sektor perekonomian melalui koperasi. Saat ini, jumlah koperasi dan anggota koperasi berkembang dengan sangat pesat, yang tentu saja menjadi kekuatan tersendiri bagi perekonomian Kabupaten Klaten secara umum.

7. *Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 7. Secara topografi, Kabupaten Klaten memang memiliki kendala dalam pembangunan fisik, namun sebenarnya, kondisi topografi Kabupaten Klaten juga memberikan berbagai keuntungan, diantaranya memungkinkan berbagai jenis tanaman pangan untuk tumbuh di wilayah Kabupaten Klaten, dan memberikan beberapa sumber air yang sangat berguna bagi Kabupaten Klaten, maupun daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Klaten saat ini sedang menggalakkan peningkatan kualitas SDA guna mendukung kualitas pembangunan daerah.
8. *Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,9. Kabupaten Klaten memiliki berbagai jenis obyek wisata, baik yang sifatnya alami maupun buatan manusia. Dari seluruh obyek wisata tersebut, masih banyak obyek pariwisata yang belum secara optimal dikembangkan potensinya, misalnya, Desa Keramik Melikan, Bayat, yang sangat potensial sebagai desa wisata. Dengan potensi sebesar itu, Kabupaten Klaten memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Klaten.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian seluruh responden, faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. *Kondisi topografi Kabupaten Klaten*. Faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,7. Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang bervariasi, (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda), tentu saja menjadi salah satu kendala pembangunan secara fisik. Untuk melakukan pembangunan fisik, seperti misalnya pembangunan fasilitas jalan, di daerah dataran tinggi tentu saja tidak semudah pembangunan fisik di dataran rendah yang secara topografi daerahnya lebih rata. Sehingga pada

akhirnya akan menjadi kendala pada sistem transportasi dan komunikasi di Kabupaten Klaten.

2. *Kapasitas dan kinerja kelembagaan*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,4. Secara organisasi, Kabupaten Klaten terdiri dari 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang terbagi menjadi 2 SKPD berbentuk sekretariat, 4 SKPD berbentuk badan, 7 SKPD berbentuk dinas, 13 SKPD berbentuk kantor, dan 26 kecamatan. Beberapa responden menyatakan bahwa kinerja lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Klaten belum cukup baik untuk menunjang pembangunan daerah. Sebagai salah satu bukti adalah masih rendahnya pendapatan daerah, yang oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2008, salah satunya disebabkan karena kurang optimalnya penanganan pemungutan pajak/retribusi. Dari sini tampak bahwa memang kinerja beberapa lembaga atau dinas-dinas daerah Kabupaten Klaten belum bekerja secara optimal.
3. *Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,3. Komunikasi dan koordinasi antara para pelaku ekonomi merupakan hal yang juga sangat penting, sehingga pemerintah tahun apa saja yang menjadi kebutuhan dari para pelaku ekonomi, termasuk diantaranya masyarakat dan pengusaha. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sehingga pemerintah dapat membuat prioritas pembangunan secara tepat. Namun, sampai saat ini, partisipasi masyarakat ini masih dianggap kurang untuk dapat menangkap keinginan dan kebutuhan para pelaku ekonomi. Selain karena minimnya biaya pembangunan, kurangnya partisipasi masyarakat ini juga mengakibatkan tidak terakomodirnya keinginan masyarakat.
4. *Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,55. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih untuk bisa semakin menggali potensi daerah yang dimiliki.

Namun, kewenangan ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, hal ini terbukti dengan belum optimalnya pencapaian PAD untuk pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, sehingga akibatnya sampai saat ini Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat.

5. *Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang cenderung variatif menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah masih belum merata dan masih banyak penduduk yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial dan berada di bawah garis kemiskinan.
6. *Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor)*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,2. Kabupaten Klaten memiliki potensi daerah yang cukup beragam, dari potensi pariwisata sampai potensi sumber daya alam, yang dapat dijadikan faktor-faktor produksi, seperti misalnya potensi sumber air, yang saat ini telah dikerjasamakan dengan PT. Tirta Investama dan PDAM Kota Surakarta. Namun, oleh para responden (yang dianggap ahli) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten masih kurang melakukan upaya-upaya sosialisasi dan promosi potensi daerah, sehingga belum banyak potensi yang terekspos, dan belum banyak investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Klaten.
7. *Penentuan skala prioritas pembangunan*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,4. Penentuan skala prioritas adalah hal yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah, dan ada saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Klaten sedang berusaha untuk mempertajam prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh para ahli, penentuan skala prioritas pembangunan belum semuanya telah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan belum banyaknya perbaikan fasilitas dan sarana umum yang sebelumnya telah mengalami

kerusakan, seperti sarana jalan di daerah penambangan pasir yang kerusakannya semakin parah.

8. *Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten*; faktor ini mendapat nilai rata-rata sebesar 6,05. Birokrasi berkaitan sangat erat dengan investasi, sistem birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten oleh beberapa pihak dianggap rumit dan berbelit-belit, sehingga para investor harus berpikir dua kali sebelum bersedia menanamkan investasi ke Kabupaten Klaten. Padahal, sistem birokrasi yang sederhana dan transparan dapat mendorong penanaman modal di lingkungan Kabupaten Klaten.
9. *Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD*; faktor PAD dan struktur APBD Kabupaten Klaten mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, secara keuangan, masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat dijadikan sumber pembiayaan tunggal untuk pembangunan daerah, dan hanya menyumbang sekitar 4,04% terhadap total penerimaan. Demikian juga dari sisi belanja daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membelanjakan kurang lebih 60% dari total belanjanya untuk belanja pegawai setiap tahunnya. Proporsi belanja pegawai ini terus meningkat, sehingga pada tahun 2008 porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah mencapai 63,97%. Hal ini tentu saja kurang mendukung pembangunan daerah Kabupaten Klaten, karena belanja publik untuk pembangunan hanya mendapat porsi kurang dari 40%.

5.1.1.2. Faktor-faktor Eksternal

Nilai rata-rata (*benchmark*) untuk faktor eksternal adalah 6,44. Faktor-faktor yang mendapatkan nilai rata-rata di atas nilai *benchmark* akan dikelompokkan menjadi kesempatan (*Opportunity*), sementara yang nilai rata-ratanya di bawah *benchmark* dikelompokkan menjadi ancaman (*Threat*).

Tabel 5.6 Ringkasan Pembobotan Faktor-Faktor Eksternal

	Opportunity	Rata2
1	Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah	6,6
2	Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009	6,7
3	Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	6,95
6	Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional	6,6
8	Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten	6,45
9	Berbagai program pemerintah pusat	6,85
10	Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah	6,75
12	Kemajuan tehnologi yang sangat pesat	6,65
15	Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten	6,45
	Threat	Rata2
4	Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia	6,05
5	Ditandatangani kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China	5,4
7	Kondisi sosial politik di tingkat nasional	6,3
11	Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat	6,25
13	Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik sekitar Kabupaten Klaten	6,4
14	Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Klaten	6,15

Sumber: Hasil penilaian responden atas kuisisioner SWOT

a. Faktor peluang/kesempatan (*Opportunity*)

Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian seluruh responden, faktor-faktor yang menjadi peluang dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. *Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk

mengembangkan segala potensi yang dimiliki, dan menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk semakin mengembangkan dirinya.

2. *Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,7. Undang-undang pajak sebelumnya No. 18 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dianggap merusak iklim investasi karena terlalu banyak obyek pajak yang ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah. Undang-undang pajak baru memberikan beberapa kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk menetapkan besaran pajak yang menjadi hak pemerintah daerah, meskipun tarif maksimal dan jenis-jenis pajaknya telah dibatasi. Misalnya, Pajak Air Tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dengan adanya undang-undang baru, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan tersendiri, karena selain pemerintah kabupaten memiliki kewenangan lebih, Kabupaten Klaten memiliki beberapa sumber air yang tentu saja bisa menjadi obyek pajak bagi pemerintah daerah.
3. *Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,9. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 diatur tentang pemerintah dan pemerintah daerah yang harus menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik. Hal ini merupakan peluang besar bagi pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Klaten yang mulai bangkit untuk mendapatkan iklim yang kondusif bagi usaha yang mereka jalankan.
4. *Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,6. Krisis ekonomi global sudah menjadi isu utama yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Bagaimanapun, kondisi ini mempengaruhi perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, keberhasilan Indonesia dalam melewati masa krisis ini, menjadikan kondisi perekonomian dunia ini menjadi peluang bagi Indonesia secara umum, dan Kabupaten Klaten secara khusus untuk berusaha meningkatkan

ekspor. Masalah sosial yang saat ini berkembang di dunia internasional adalah masalah kemiskinan dan pemanasan global. Kondisi ini juga merupakan cambuk bagi pemerintah daerah untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan dan menghentikan atau minimal mengurangi pemanasan global.

5. *Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,45. Kondisi politik di Kabupaten Klaten cenderung stabil, dan tidak ada gejolak yang berarti. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menarik minat investor, agar menanamkan modal ke Kabupaten Klaten, dengan jaminan bahwa kondisi politik di Kabupaten Klaten cenderung stabil dan kondusif. Kabupaten Klaten juga belum terbebas dari masalah-masalah sosial, masih banyak masyarakat miskin yang harus segera diantarkan dari permasalahan kebutuhan dasar mereka. Kondisi sosial ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk menunjukkan tanggung jawab konstitusi, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.
6. *Berbagai program pemerintah pusat*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,85. Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan berbagai program yang diharapkan bisa langsung menyentuh masyarakat luas, seperti jamkesmas dan BOS. Program-program pemerintah pusat ini, sekaligus bisa menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk memperluas pelayanan publik dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan, bagi masyarakat Kabupaten Klaten, mengingat tidak semua program atau agenda pembangunan daerah bisa diakomodir dengan biaya daerah.
7. *Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,75. Sampai saat ini, Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat. Sementara Kabupaten Klaten belum dapat mengoptimalkan kewenangan otonomi daerah, maka dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ini merupakan peluang besar dalam rangka melaksanakan pembangunan, sehingga harus dimanfaatkan sesuai dengan prioritas yang telah disusun.

8. *Kemajuan teknologi yang sangat pesat*; faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,65. Kemajuan teknologi merupakan faktor penting dalam pembangunan. Seperti dilansir oleh media Solo Pos tahun 2001, teknologi pengecoran logam di Kabupaten Klaten ketinggalan lebih dari 100 tahun apabila dibandingkan dengan Jepang. Dengan adanya kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Klaten diharapkan dapat menyesuaikan diri secara bertahap sehingga mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dengan produk daerah atau negara lain.
9. *Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,45. Kabupaten Klaten saat ini sedang mengevaluasi keberlanjutan kerjasama dengan daerah-daerah se-eks Karesidenan Surakarta. Kerjasama yang bernama “Subosukawonosraten” tersebut dibentuk bersama dengan pemerintah daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Menurut responden, kerjasama ini merupakan peluang daerah, sehingga layak untuk dipertahankan, namun dengan tetap melakukan penyempurnaan-penyempurnaan program yang telah disepakati bersama.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

Berdasarkan rekapitulasi dari penilaian seluruh responden, faktor-faktor yang menjadi ancaman dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. *Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,05. Pada masa globalisasi, peran daerah menjadi sangat penting, dan menjadi pemeran utama dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan daerah untuk ikut berperan serta dalam perekonomian global. Apabila Kabupaten Klaten tidak dengan segera meningkatkan daya saingnya, maka Kabupaten Klaten tidak akan bisa bersaing di masa keterbukaan ekonomi seperti sekarang ini.

2. *Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China dan negara-negara ASEAN (ACFTA)*; faktor ini mendapat nilai rata-rata sebesar 5,4. Masuknya China dalam AFTA membawa kekhawatiran tersendiri bagi bangsa Indonesia. Meskipun tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi di antara negara-negara peserta AFTA dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, namun pada kenyataannya, kondisi ini justru meresahkan bagi perdagangan domestik, karena sejak diberlakukan tanggal 1 Januari 2010 semua produk China akan bebas masuk pasar ASEAN, termasuk Indonesia. Kekhawatiran ini berdasarkan pada fakta bahwa produk-produk China jauh lebih murah dengan kualitas yang mampu bersaing dengan produk lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sendiri saat ini, dalam Rencana Kerja Pemerintah-nya, menganggap daerahnya masih belum memiliki daya saing yang tinggi dan belum banyak produk Kabupaten Klaten yang mampu bersaing di pasar nasional ataupun internasional.
3. *Kondisi sosial politik di tingkat nasional*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,3. Kondisi sosial dan politik nasional yang cenderung bergejolak tentu saja menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Dengan bergejolaknya kondisi sosial politik nasional akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan investor pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. misalnya, dengan mencuatnya kasus Bank Century, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan, akibatnya masyarakat beramai-ramai menarik uangnya dari bank, sehingga mengakibatkan menurunnya investasi.
4. *Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,25. Presiden SBY dalam pidato pembukaan rakornas Pemberdayaan Aparatur Negara pada tanggal 15 November 2005 memberikan arahan untuk (1) melaksanakan reformasi birokrasi; (2) menegakkan dan menerapkan prinsip-

prinsip *good governance*; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (4) memberantas korupsi mulai dari diri sendiri. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind set* dan *culture set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Effendi, 2007). Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten, untuk juga mewujudkan *clean and good governance*. Menurut beberapa responden, *good governance* belum tercipta di Kabupaten Klaten.

5. *Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,4. Kabupaten Klaten berada diantara daerah-daerah yang telah maju, seperti Kota Surakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun hal tersebut juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Klaten, diantaranya karena banyaknya fasilitas nasional dan internasional yang telah disediakan di daerah-daerah tersebut, namun di sisi lain, kemajuan ini juga menjadi ancaman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten harus bekerja jauh lebih keras untuk sekedar menyamai pencapaian daerah-daerah lain, padahal tentu saja daerah-daerah tersebut juga terus berusaha untuk semakin memajukan daerahnya. Ancaman lain karena kemajuan daerah lain adalah, karena posisi Kabupaten Klaten sangat dekat dengan daerah-daerah maju tersebut, maka dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa berinvestasi di daerah lain tersebut jauh lebih menguntungkan daripada berinvestasi di Kabupaten Klaten. Ancaman ini tidak hanya muncul dari pihak luar saja, tetapi juga muncul dari pihak intern Kabupaten Klaten. Banyaknya fasilitas yang lebih baik di daerah lain akan menarik masyarakat Kabupaten Klaten untuk lebih banyak menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Misalnya, dengan banyaknya pusat perbelanjaan yang lebih modern di Yogyakarta dan Surakarta, maka masyarakat Kabupaten Klaten lebih banyak berbelanja kebutuhan di daerah-

daerah lain, sehingga mematikan pasar lokal, dan perputaran uang akan lebih banyak di daerah lain tersebut.

6. *Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Klaten*, faktor ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,15. Investasi swasta sangat penting dalam membantu pembangunan sebuah daerah. Ketika tidak semua barang publik disediakan oleh pemerintah, disinilah peran investasi swasta mulai dimainkan. Secara keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat, dan PAD-nya belum dapat menyumbang banyak untuk penerimaan daerah. Dengan segala ketergantungan tersebut, porsi belanja Kabupaten Klaten lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, dan porsi untuk belanja publik semakin menurun dengan semakin banyaknya rekrutmen PNS di Kabupaten Klaten. Dengan kondisi semacam ini, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten meningkatkan investasi swasta untuk menunjang pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2008, investasi swasta di Kabupaten Klaten mencapai Rp756.027 milyar dan mampu menyerap 8.262 tenaga kerja. Untuk dapat terus meningkatkan investasi swasta ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten harus melakukan reformasi birokrasi, salah satunya dengan menyederhanakan proses birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dengan segala potensi yang dimiliki, Kabupaten Klaten akan menjadi daerah tujuan investasi.

5.1.2 Pembobotan Internal Factor Analysis System (IFAS) dan External Factor Analysis System (EFAS)

Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan IFAS – EFAS dengan hasil seperti yang disajikan dalam tabel 5.7

Dari hasil pembobotan IFAS-EFAS elemen SWOT terlihat bahwa faktor kekuatan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah Kabupaten Klaten sebagai

daerah pertanian, dengan nilai rata-rata sebesar 7,9. Hal ini, menurut penilaian responden, merupakan kekuatan utama bagi Kabupaten Klaten untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, meskipun sekarang ini sektor pertanian tidak memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur perekonomian Kabupaten Klaten, karena berbagai masalah di bidang pertanian, namun apabila pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar pada sektor ini maka akan mengembalikan Kabupaten Klaten sebagai lumbung padi utama di Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar berprofesi di bidang pertanian dan bidang lain yang berhubungan. Namun, mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang cukup lama merespon adanya perubahan, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten harus lebih tanggap dan kreatif dalam mengemas sektor pertanian menjadi sektor yang lebih responsif terhadap perubahan, misalnya dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbasis pertanian.

Tabel 5.7 Penilaian Bobot IFAS – EFAS SWOT

		Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata- rata	Bobot (%) (b/Xsi)*bs	Urgensi (rating)	Bobot x rating	
STRENGTH	1	7,75	2,75	8,99	3,35	0,30	
	3	7,55	2,55	8,33	3,55	0,30	
	4	6,95	1,95	6,37	3,65	0,23	
	5	7,9	2,9	9,48	3,65	0,35	
	6	7	2	6,54	3,1	0,20	
	7	7,35	2,35	7,68	3,2	0,25	
	9	7	2	6,54	3,35	0,22	
	12	6,9	1,9	6,21	3,15	0,20	
		Total S (Xsi)	18,4				2,04

(Sambungan)

WEAKNESS		Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata- rata	Bobot (%) (b/Xsi)*bs	Urgensi (rating)	Bobot x rating
	2	6,7	1,7	5,56	3,35	0,19
	8	6,4	1,4	4,58	3,15	0,14
	10	6,3	1,3	4,25	3,05	0,13
	11	6,55	1,55	5,07	3	0,15
	13	6,6	1,6	5,23	3,2	0,17
	15	6,2	1,2	3,92	3,2	0,13
	16	6,4	1,4	4,58	3,2	0,15
	17	6,05	1,05	3,43	3,25	0,11
	18	6	1	3,27	3,45	0,11
	Total W (Xwi)	12,2			1,28	
	Xi = (Xsi + Xwi)		30,6			
	Bs= (Xsi/xi)*100%		60,13			
	Bw= (Xwi/Xi)*100%		39,87			

OPPORTUNITY		Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata- rata	Bobot (%) (b/Xoi)*bo	Urgensi (rating)	Bobot x rating
	1	6,6	1,6	7,42	3	0,22
	2	6,7	1,7	7,89	3	0,24
	3	6,95	1,95	9,05	3,15	0,29
	6	6,6	1,6	7,42	2,8	0,21
	8	6,45	1,45	6,73	3,2	0,22
	9	6,85	1,85	12,33	3,05	0,38
	10	6,75	1,75	8,12	3,2	0,26
	12	6,65	1,65	7,66	2,85	0,22
	15	6,45	1,45	6,73	3,05	0,21
	Total O (Xoi)	15			2,23	
THREAT		Rata-rata	Penyesuaian Nilai Rata- rata	Bobot (%) (b/Xti)*bt	Urgensi (rating)	Bobot x rating
	4	6,05	1,05	4,87	3,1	0,15
	5	5,4	0,4	1,86	2,85	0,05
	7	6,3	1,3	6,03	3	0,18
	11	6,25	1,25	5,80	3,1	0,18
	13	6,4	1,4	6,50	2,9	0,19
	14	6,15	1,15	5,34	3,45	0,18
	Total T (Xti)	6,55			0,94	
	Total (Xi)		21,55			
	Bo = (Xoi/Xi)*100		69,60			
	Bt = (Xti/Xi)*100		30,394			

Sumber: Pengolahan Hasil Kuisisioner SWOT

Faktor kelemahan yang mendapatkan nilai rata-rata terendah adalah PAD dan struktur APBD Kabupaten Klaten, dengan nilai rata-rata sebesar 6. Hal ini, menurut responden, merupakan kelemahan terbesar Kabupaten Klaten. Dari tahun 2005 sampai tahun 2008, sumbangan PAD terhadap total penerimaan daerah memiliki kecenderungan menurun. Begitu juga dengan struktur belanja daerah, yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan dengan keterbatasan dana yang dimiliki, masih banyak daerah di lingkungan Kabupaten Klaten yang harus dibangun.

Faktor peluang yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dengan nilai rata-rata sebesar 6,95. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan peraturan undang-undang dan kebijakan untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah, pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, peizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Hal ini memberikan peluang kepada usaha kecil dan menengah yang saat ini sedang mulai bertumbuh kembang di Kabupaten Klaten, dan memberikan kehidupan kembali kepada usaha kecil dan menengah yang sebelumnya mengalami mati suri.

Faktor ancaman yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah kesepakatan AFTA dimana China ikut dalam kesepakatan tersebut, dengan nilai rata-rata sebesar 5,4. Artinya, kesepakatan dengan negara-negara ASEAN, khususnya China yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010 ini merupakan ancaman terbesar bagi Kabupaten Klaten. Sejak tanggal tersebut, seluruh produk China akan dengan bebas memasuki pasar domestik, dengan harga yang jauh lebih murah, dan memberikan ancaman kepada produk-produk lokal.

5.1.3. Perumusan Strategi

Untuk mengetahui prioritas dan keterkaitan antar strategi berdasarkan pembobotan SWOT-nya, maka dilakukan interaksi kombinasi strategi internal-

eksternal. Perumusan strategi-strategi tersebut disusun berdasarkan faktor internal, strength dan weakness, serta faktor eksternal opportunity dan threat ke dalam Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT seperti pada tabel 5.8.

Tabel 5.8 Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>strength</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Kabupaten Klaten. 2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. 3. Ketersediaan infrastruktur dasar 4. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian 5. Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten; 6. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro; 7. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten; 8. Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata; <p style="text-align: right;">Bobot 2,04</p>	<p>weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi topografi Kabupaten Klaten 2. Kapasitas dan kinerja kelembagaan. 3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah; 4. Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah; 5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah; 6. Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor 7. Penentuan skala prioritas pembangunan; 8. Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten; 9. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD <p style="text-align: right;">Bobot 1,28</p>
<p>opportuniy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah ; 2. Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009; 3. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 4. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional; 5. Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten; 6. Berbagai program pemerintah pusat; 7. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah; 8. Kemajuan tehnologi yang sangat pesat; 9. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten; 2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Klaten, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru; 2. Melakukan reformasi birokrasi dan melakukan promosi berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dalam rangka menarik minat investor, karena pada dasarnya kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten cukup kondusif bagi investor; 3. Memeratakan hasil-hasil pembangunan, dan membuat prioritas pembangunan yang paling tepat, mengingat kondisi topografi Kabupaten Klaten yang kurang menguntungkan, dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi dan dukungan dari pemerintah pusat, baik berupa dana transfer maupun program-program nasional yang diharapkan dapat menyentuh masyarakat luas.

	<p>3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);</p> <p>4. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten.</p>	
Bobot 2,23	BOBOT = 4,27	BOBOT = 3,51
<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia 2. Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China; 3. Kondisi sosial politik di tingkat nasional; 4. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat; 5. Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah lain, 6. Investasi swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dengan baik dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku ekonomi, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain serta sehingga mampu menghadapi globalisasi, pasar bebas, dan keterbukaan ekonomi; 2. Mempromosikan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Klaten, salah satunya potensi wisata dan potensi sumber daya alam untuk menarik investor ke Kabupaten Klaten; 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun industri kecil dan menengah yang mulai bangkit di Kabupaten Klaten, dalam rangka bersaing dengan produk-produk China yang dikawatirkan mulai menyerbu pasar Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, serta kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten serta melakukan reformasi birokrasi dalam rangka menyelaraskan diri dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat; 2. Meningkatkan PAD, memperbaiki struktur APBD, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan hasil-hasil pembangunan serta menetapkan prioritas pembangunan yang paling tepat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain, sehingga pada akhirnya Kabupaten Klaten menjadi daerah yang mampu bersaing di pasar global; 3. Melakukan sosialisasi berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Klaten.
Bobot 0,94	BOBOT = 2,98	BOBOT = 2,22

Sumber: Interaksi IFAS-EFAS

Secara ringkas hasil perumusan matriks IFAS – EFAS, berdasarkan strategi SO, ST, WO, dan WT, dilakukan pembobotan penilaian untuk menentukan skala

prioritasnya. Susunan strategi alternatif berdasarkan urutan prioritasnya yang diperoleh dari pembobotan matriks interaksi SWOT disajikan pada tabel xx.

Tabel 5.9 Pembobotan Hasil Kuisisioner SWOT

	S = 2,04	W = 1,28
O = 2,23	SO = 4,27	WO = 3,51
T = 0,94	ST = 2,98	WT = 2,22

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pembobotan kuisisioner, maka disusun prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai yang paling rendah.

Tabel 5.10 Urutan Alternatif Strategi SWOT

Prioritas	Strategi	Bobot Nilai
I	<i>Strength – Opportunity (SO)</i>	4,27
II	<i>Weakness – Opportunity (WO)</i>	3,51
III	<i>Strength – Threat (ST)</i>	2,98
IV	<i>Weakness – Threat (WT)</i>	2,22

Sumber: Matriks Interaksi IFAS-EFAS

Hasil interaksi IFAS – EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *Strength – Opportunity (SO)*, yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada. Kondisi ini menguntungkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten, karena dari sisi faktor internal, Kabupaten memiliki kekuatan

yang lebih besar daripada kelemahannya, sedangkan dari sisi faktor eksternal, peluang yang ada jauh lebih besar daripada ancaman dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11 Strategi Prioritas I: Strategi *Strength – Opportunity* (SO)

Strength	Opportuniy
<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geografis Kabupaten Klaten. 2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. 3. Ketersediaan infrastruktur dasar 4. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian 5. Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten; 6. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro; 7. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten; 8. Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah ; 2. Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009; 3. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 4. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional; 5. Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten; 6. Berbagai program pemerintah pusat; 7. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah; 8. Kemajuan tehnologi yang sangat pesat; 9. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten.
Strategi SO (Strength – Opportunity)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten; 2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Klaten, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam 	

rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas;

3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten.

Meskipun strategi SO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun untuk belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*). Penentuan prioritas kebijakan dari beberapa strategi kebijakan *Strength – Opportunity* (SO) yang dihasilkan melalui analisa SWOT pada penelitian ini dilakukan dengan *The Analytical Hierarchy Process* (AHP).

5.2. Perumusan Strategi kebijakan dengan AHP

5.2.1. Penyusunan Hirarki

Penyusunan hirarki merupakan bagian terpenting dari model AHP, karena akan menjadi dasar bagi para responden untuk memberi penilaian/pendapat secara lebih sederhana. Dengan menggunakan hirarki, diharapkan permasalahan yang kompleks akan menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami.

Dalam model AHP yang digunakan dalam penelitian ini, hirarki yang disusun terdiri dari 4 level, dengan level puncak sebagai fokus/goal dari hirarki, yaitu: “*Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten*”. Hirarki model AHP secara lengkap disajikan dalam diagram 5.1.

Pada level strategi, tidak hanya dimasukkan alternatif strategi kebijakan dari strategi terpilih, yaitu SO, tetapi dimasukkan tambahan 1 (satu) kebijakan dari strategi terbaik kedua (*second best*) yaitu strategi WO, dengan alternatif strateginya adalah

meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan. Hal ini dilakukan untuk melihat penilaian responden atas salah satu faktor intern yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, yaitu kapasitas dan kinerja kelembagaan. Penambahan strategi kebijakan ini dianggap perlu karena alternatif dari pilihan strategi SO hanya berfokus pada segala sesuatu yang ada di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, seperti sumber daya dan potensi pariwisata, tanpa adanya perhatian pada hal yang mendasar dari sebuah pemerintah secara umum, yaitu kapasitas dan kinerja kelembagaan. Selain itu, berdasarkan penilaian dalam analisis SWOT, pembobotan antara *strength* dan *weakness* tidak terlalu berbeda jauh, artinya nilai terendah dari faktor *strength* dan nilai tertinggi dari faktor *weakness* selisihnya tidak terlalu jauh.

Level 1 adalah **Skenario**, yang terbagi menjadi 3 (tiga) kemungkinan skenario yang mungkin terjadi, yaitu:

1. Skenario Optimis, merupakan skenario masa depan dimana lingkungan eksternal makro sangat mendukung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Klaten, atau kondisi masa depan lebih baik dari kondisi pada masa sekarang sehingga mendukung tercapainya sasaran yang diharapkan;
2. Skenario Status Quo, merupakan skenario masa depan, dimana kondisi lingkungan eksternal makro tetap sama dengan kondisi saat sekarang (hampir tidak ada perubahan);
3. Skenario Pesimis, merupakan skenario masa depan dimana kondisi lingkungan eksternal makro lebih buruk dibandingkan kondisi pada saat ini.

Level 2 adalah **Sasaran**, yang terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

1. Sasaran mengurangi kemiskinan dan pengangguran, adalah suatu sasaran yang bermaksud untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih merupakan masalah utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
2. Sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adalah suatu sasaran yang bermaksud untuk menciptakan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini dilihat dari PDRB dan PDRB per kapita, karena

diantara kabupaten-kabupaten sekitarnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten cenderung lambat;

3. Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, adalah suatu sasaran yang bermaksud untuk menciptakan upaya yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Klaten.

Level 3 adalah **Alternatif** strategi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang diperoleh melalui analisis SWOT, yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya----- (Alternatif 1)

Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten;

2. Memperkuat ekonomi mikro----- (Alternatif 2)

Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas;

3. Mengembangkan potensi pariwisata----- (Alternatif 3)

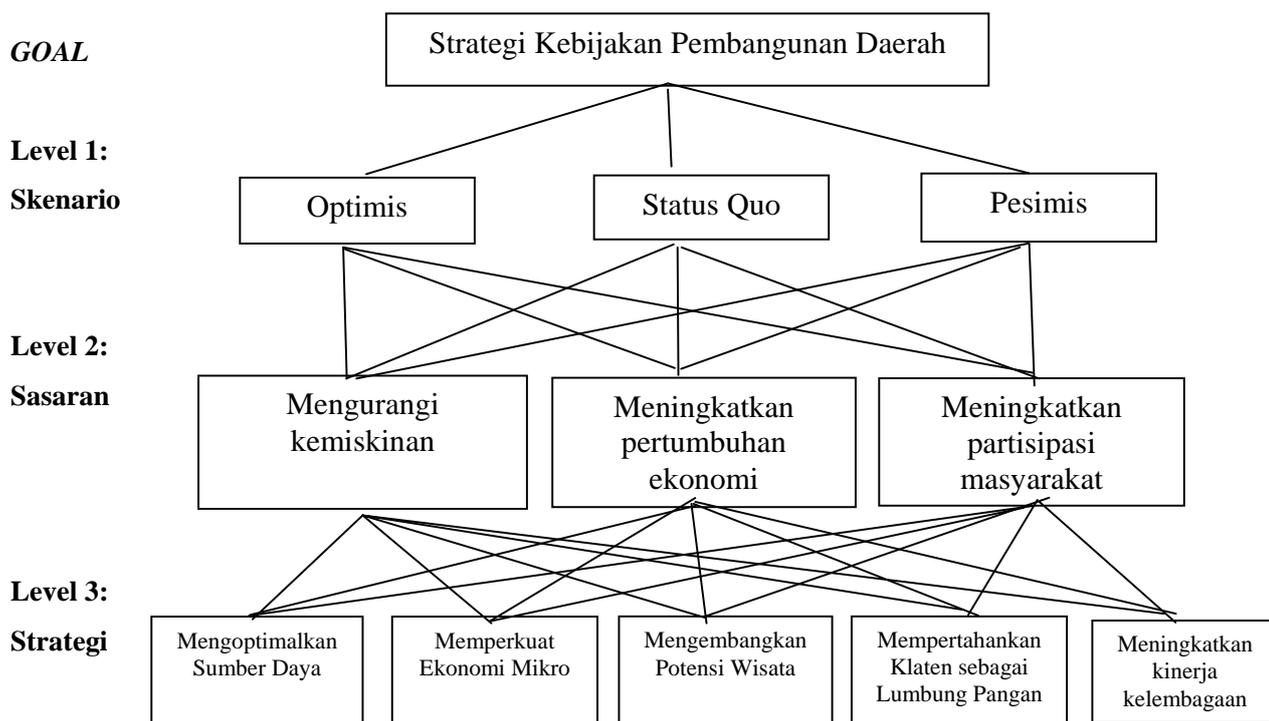
Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4. **Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai lumbung pangan-----(Alternatif 4)**

Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten;

5. **Meningkatkan kinerja kelembagaan----- (Alternatif 5)**

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru.



Gambar 5.1 Hirarki Model AHP

Sumber: Hasil Analisis SWOT

5.2.1. Penilaian Responden

Berdasarkan pembobotan yang telah diberikan sebelumnya, kemudian dilakukan pengolahan data, sehingga dihasilkan nilai konsensus seperti yang dapat dijelaskan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12 Hasil Penghitungan atas Penilaian Responden

	Deskripsi	Responden							Bobot
		1	2	3	4	5	6	7	
Skenario									
	Optimis	0,625	0,649	0,696	0,637	0,637	0,731	0,192	0,6385
	Status Quo	0,238	0,279	0,229	0,258	0,258	0,188	0,634	0,2618
	Pesimis	0,136	0,072	0,075	0,105	0,105	0,081	0,174	0,0994
	<i>IR</i>	0,02	0,06	0,07	0,04	0,04	0,06	0,01	
Sasaran	Optimis								
	Mengurangi Kemiskinan	0,508	0,279	0,135	0,258	0,281	0,169	0,157	0,2783
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0,113	0,649	0,584	0,637	0,135	0,387	0,594	0,4621
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0,379	0,072	0,281	0,105	0,584	0,443	0,249	0,2595
	<i>IR</i>	0,16	0,06	0,13	0,04	0,13	0,02	0,05	
	Status Quo								
	Mengurangi Kemiskinan	0,238	0,731	0,258	0,637	0,683	0,143	0,126	0,4439
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0,136	0,081	0,637	0,258	0,117	0,571	0,416	0,2941
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0,625	0,188	0,105	0,105	0,2	0,286	0,458	0,2618
	<i>IR</i>	0,02	0,06	0,04	0,04	0,02	0	0,01	
	Pesimis								
	Mengurangi Kemiskinan	0,226	0,649	0,258	0,258	0,648	0,122	0,126	0,3448
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0,101	0,072	0,637	0,105	0,23	0,648	0,416	0,2699
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0,674	0,279	0,105	0,637	0,122	0,23	0,458	0,3855
	<i>IR</i>	0,08	0,06	0,04	0,04	0,003	0,003	0,01	
Strategi	Optimis								
	Mengurangi Kemiskinan								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,235	0,31	0,226	0,447	0,162	0,193	0,215	0,2806
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,101	0,35	0,297	0,183	0,253	0,106	0,431	0,2322
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,213	0,212	0,099	0,075	0,038	0,112	0,088	0,1353

(Sambungan)

	Deskripsi	1	2	3	4	5	6	7	Bobot
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,051	0,085	0,189	0,255	0,452	0,049	0,11	0,1605
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,4	0,043	0,189	0,04	0,095	0,54	0,155	0,1914
	<i>IR</i>	<i>0,17</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	
	Optimis								
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,225	0,273	0,175	0,195	0,161	0,154	0,149	0,2048
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,165	0,457	0,401	0,384	0,215	0,238	0,519	0,3384
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,066	0,149	0,099	0,292	0,045	0,098	0,116	0,1373
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,083	0,046	0,104	0,048	0,513	0,051	0,101	0,1054
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,461	0,075	0,222	0,082	0,066	0,46	0,116	0,2147
	<i>IR</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	<i>0,05</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	<i>0,01</i>	
	Optimis								
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,386	0,082	0,214	0,233	0,243	0,128	0,143	0,2184
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,2	0,107	0,414	0,07	0,506	0,145	0,429	0,2274
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,063	0,107	0,089	0,436	0,038	0,108	0,143	0,1564
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,067	0,168	0,172	0,149	0,087	0,067	0,143	0,1292
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,285	0,536	0,111	0,111	0,126	0,551	0,143	0,2685
	<i>IR</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,06</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	<i>0,04</i>	<i>0</i>	
	Status Quo								
	Mengurangi Kemiskinan								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,288	0,334	0,226	0,447	0,162	0,193	0,215	0,2960
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,093	0,289	0,297	0,183	0,458	0,106	0,431	0,2348
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,117	0,093	0,099	0,075	0,041	0,112	0,088	0,0926
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,059	0,24	0,189	0,255	0,256	0,049	0,11	0,1774
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,444	0,044	0,189	0,04	0,083	0,54	0,155	0,1994
	<i>IR</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	
	Status Quo								
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,272	0,27	0,189	0,201	0,163	0,17	0,166	0,2197
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,057	0,328	0,346	0,402	0,258	0,156	0,425	0,2767
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,07	0,263	0,115	0,248	0,048	0,139	0,142	0,1598
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,13	0,098	0,12	0,058	0,449	0,064	0,125	0,1272

(Sambungan)

	Deskripsi	1	2	3	4	5	6	7	Bobot
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,47	0,041	0,23	0,091	0,082	0,47	0,142	0,2162
	<i>IR</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	<i>0,08</i>	<i>0,05</i>	<i>0,01</i>	
	Status Quo								
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,24	0,082	0,216	0,269	0,14	0,128	0,143	0,1886
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,045	0,107	0,411	0,066	0,511	0,145	0,429	0,1954
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,071	0,107	0,072	0,429	0,04	0,108	0,143	0,1534
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,136	0,168	0,164	0,154	0,235	0,067	0,143	0,1543
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,507	0,536	0,137	0,082	0,074	0,551	0,143	0,3081
	<i>IR</i>	<i>0,05</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	<i>0</i>	
	Pesimis								
	Mengurangi Kemiskinan								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,338	0,367	0,226	0,447	0,192	0,193	0,215	0,3150
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,068	0,293	0,297	0,183	0,286	0,106	0,431	0,2168
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,158	0,086	0,099	0,075	0,037	0,112	0,088	0,0990
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,04	0,217	0,189	0,255	0,398	0,049	0,11	0,1804
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,396	0,038	0,189	0,04	0,087	0,54	0,155	0,1890
	<i>IR</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	
	Pesimis								
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,291	0,25	0,189	0,156	0,118	0,17	0,166	0,2069
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,044	0,222	0,346	0,414	0,51	0,156	0,425	0,2755
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,079	0,334	0,115	0,286	0,042	0,139	0,142	0,1830
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,137	0,148	0,12	0,052	0,261	0,064	0,125	0,1224
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,45	0,044	0,23	0,091	0,07	0,47	0,142	0,2119
	<i>IR</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>	<i>0,08</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,05</i>	<i>0,01</i>	
	Pesimis								
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat								
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,302	0,082	0,223	0,251	0,118	0,138	0,143	0,1978
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,063	0,107	0,389	0,074	0,51	0,146	0,429	0,1962
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,078	0,107	0,072	0,43	0,042	0,106	0,143	0,1550
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,148	0,168	0,166	0,16	0,261	0,062	0,143	0,1600
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,409	0,536	0,15	0,085	0,07	0,549	0,143	0,2912
	<i>IR</i>	<i>0,06</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,08</i>	<i>0,07</i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>	

(Sambungan)

	Deskripsi	1	2	3	4	5	6	7	Bobot
	Global Analysis								
	Overall Inconsistency	0,01							
	Optimis	0,625	0,649	0,696	0,637	0,637	0,731	0,192	0,6385
	Status Quo	0,238	0,279	0,229	0,258	0,258	0,188	0,634	0,2618
	Pesimis	0,136	0,072	0,075	0,105	0,105	0,081	0,174	0,0994
	Mengurangi Kemiskinan	0,405	0,432	0,172	0,356	0,423	0,160	0,132	0,3249
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0,117	0,449	0,600	0,483	0,140	0,443	0,450	0,3945
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0,477	0,119	0,227	0,161	0,436	0,396	0,418	0,2803
	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,2848	0,2736	0,1955	0,2929	0,1914	0,1526	0,1609	0,2433
	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,1134	0,3498	0,3751	0,2637	0,4052	0,1667	0,4382	0,2837
	Mengembangkan Potensi Wisata	0,1198	0,1446	0,0993	0,2344	0,0396	0,1107	0,1323	0,1369
	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,0824	0,1169	0,1370	0,1395	0,2649	0,0590	0,1278	0,1262
	Meningkatkan Kinerja lembaga	0,3987	0,1152	0,1935	0,0699	0,0990	0,5101	0,1412	0,2098

Sumber: Hasil pengisian kuisioner oleh para responden (diolah dengan *software Expert Choice*)

Berdasarkan data-data dan perhitungan dari hasil penilaian responden atas kuisioner AHP tersebut, maka diperoleh hasil urutan prioritas berdasarkan nilai prioritas tertinggi ditampilkan pada tabel 5.13.

Tabel 5.13 Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Optimis

Level	DEFINISI	BOBOT LOKAL
1	Skenario	
	1. Optimis	0,6385
	2. Status Quo	0,2618
	3. Pesimis	0,0994
2	Sasaran	
	Optimis	
	1. Mengurangi kemiskinan	0,3249
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	0,3945

(Sambungan)

Level	DEFINISI	BOBOT LOKAL
	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat	0,2803
3	Alternatif Strategi	
	1. Memanfaatkan modal dasar (sumber daya) yang telah dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah dan berbagai undang-undang tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, serta undang-undang pajak dan retribusi yang baru dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan	0,2433
	2. Memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas	0,2837
	3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,1369
	4. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten	0,1262
	5. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru	0,2098

Sumber: Pengolahan penilaian responden dengan menggunakan *Software Expert Choice*

Dari Tabel 5.13 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Klaten, skenario yang dianggap paling realistis adalah Skenario

OPTIMIS, dengan sasaran yang harus diprioritaskan adalah **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI**. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka urutan prioritas kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat digambarkan dalam tabel 5.14.

Tabel 5.14 Urutan Prioritas Strategi Kebijakan Dengan Skenario Optimis

Prioritas	Strategi Kebijakan	Bobot
I	Memperkuat Ekonomi Mikro	0,2837
II	Mengoptimalkan Sumber Daya	0,2433
III	Meningkatkan Kinerja Lembaga	0,2098
IV	Mengolah Potensi Wisata	0,1369
V	Mempertahankan Klaten sebagai Lumbung Pangan	0,1262
	Total Bobot	0,9999

Sumber: Tabel 5.13

5.2.3. Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten

Pertumbuhan ekonomi, menurut hasil penilaian responden, merupakan sasaran yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa kondisi perekonomian makro Kabupaten Klaten jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan kondisi perekonomian di daerah-daerah sekitarnya. Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode AHP, untuk mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi, didapatkan prioritas strategi kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut;

- *Memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas-----***(Prioritas I)**

Industri kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah saat ini sedang tumbuh subur di lingkungan Kabupaten Klaten, mulai dari usaha mebel, konveksi, kuliner, maupun industri pengolahan berskala kecil. Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah pusat mencoba memberikan kepastian dan jaminan bagi para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di daerah, bahwa keberadaan dan kelangsungan usaha mereka akan difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing, baik dari sisi pendanaan maupun fasilitas fisik lainnya. Dengan memberikan dukungan penuh kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perekonomian mikro akan lebih kuat dalam mendukung perekonomian daerah Kabupaten Klaten.

Secara lebih mendetail, proporsi usaha mikro adalah sebesar 40%, usaha kecil sebesar 27%, dan usaha menengah sebesar 33%. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 59% bergerak di sektor industri pengolahan, 17% di sektor pertanian, 11% di sektor perdagangan, dan sisanya bergerak di sektor jasa, pertambangan, dan transportasi (www.umkm-soloraya.com)

Bank Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Regional 2010 memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan mengalami peningkatan, khususnya pada triwulan kedua. Optimisme ini apabila digabungkan dengan optimisme yang dimiliki oleh pemerintah daerah, serta keuletan dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor ekonomi mikro, maka sangat dimungkinkan bagi Kabupaten Klaten untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan akan dapat memperbaiki prestasinya di wilayah eks karesidenan Surakarta. Apalagi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dinyatakan bahwa produk UMKM di Kabupaten Klaten ini berada dalam tahap berkembang dan matang, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan;

- *Memfaatkan modal dasar (sumber daya) yang telah dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah-----***(Prioritas II)**

Saat ini, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola keuangan daerah dan potensi daerah yang dimiliki. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dengan pendekatan yang paling sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Untuk itulah perlu dilakukan optimalisasi atas segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dapat mencapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, yang salah satunya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Klaten memiliki sumber daya yang luar biasa, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, yang menurut para ahli belum dimanfaatkan secara optimal, akibatnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Klaten juga belum optimal. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten wajib memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya.

- *Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru-----***(Prioritas III)**

Terpilihnya strategi yang diambil dari faktor kelemahan ini sebagai prioritas ketiga dalam pembangunan daerah Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa bagaimanapun dalam melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kinerja kelembagaan adalah faktor yang cukup penting. Ternyata hal ini tidak disadari sebelumnya oleh para responden, sehingga mendapatkan penilaian yang relatif kecil. Meskipun kinerja kelembagaan menjadi faktor kelemahan, dan bukan berada dalam strategi terpilih, namun pemerintah daerah wajib memperhatikan faktor internal dalam diri mereka, yaitu, kinerja mereka sendiri untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten.

Pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga atau dinas-dinas daerah, memegang peranan yang cukup penting dalam merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dengan tugas berat ini, adalah mutlak bagi pemerintah untuk memiliki kinerja dan etos kerja yang baik. Oleh para responden, kinerja kelembagaan yang ada di Kabupaten Klaten dianggap masih kurang memuaskan sehingga perlu diadakan perbaikan-perbaikan. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan prioritas terbaik ketiga, apabila pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

- *Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-----***(Prioritas IV)**

Mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Klaten ternyata bukan merupakan strategi pembangunan utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten, meskipun Kabupaten Klaten memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Hal ini sangat dipahami karena memang belum ada kesiapan sarana dan prasarana di sektor pariwisata ini, sehingga apabila pengembangan sektor pariwisata dipaksakan untuk menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kabupaten Klaten, maka akan membutuhkan dana APBD atau investasi swasta yang cukup besar. Dari sisi regional pun, Provinsi Jawa Tengah tampaknya belum siap menjadi daerah pariwisata meskipun memiliki potensi wisata yang luar biasa, karena belum memadainya sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang yang sangat penting. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana salah satu program provinsi, yaitu Visit Jawa Tengah 2011 harus diundur sampai tahun 2013 sambil menunggu sempurnanya sarana dan prasarana di sektor pariwisata.

- *Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten-----***(Prioritas V)**

Mengembalikan atau mempertahankan posisi Kabupaten Klaten sebagai daerah lumbung pangan, saat ini bukan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Meskipun Kabupaten Klaten dinilai memiliki potensi untuk menjadi daerah agropolitan, namun ternyata akan lebih efisien bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten tidak memprioritaskan Kabupaten Klaten sebagai daerah lumbung pangan apabila ingin mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi. Daerah lumbung pangan yang identik dengan penanaman padi ataupun tanaman pangan lainnya membutuhkan waktu produksi yang relatif lama, dan banyak faktor eksternal yang mempengaruhi secara signifikan, namun terkadang tidak bisa kita kendalikan, seperti misalnya faktor iklim.

Para responden sendiri juga menganggap bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang cukup penting, hal ini ditunjukkan dengan penilaian responden kuisioner SWOT yang besar terhadap faktor Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian, bahkan faktor ini menjadi faktor kekuatan dengan nilai paling tinggi. Dan mengingat bahwa Kabupaten Klaten sendiri memiliki potensi yang cukup baik di bidang pertanian, didukung dengan dukungan dari berbagai pihak, maka bukan tidak mungkin bahwa Kabupaten Klaten mampu menghasilkan produk-produk pertanian sebagai produk unggulan yang juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten dan pada akhirnya mendorong Kabupaten Klaten menjadi daerah agropolitan.

5.2.4. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitifitas dipakai untuk melihat sensitifitas dari prioritas, apabila ada sedikit perubahan pada penilaian. Selain itu, analisis ini juga dapat dipakai untuk memprediksi keadaan, apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, misalnya

perubahan bobot atau ada perubahan urutan prioritas karena adanya perubahan kondisi perekonomian nasional, misalnya krisis ekonomi. Yang diharapkan adalah prioritas yang tidak terlalu berfluktuasi, apabila ada perubahan kecil dalam penilaian itu.

Untuk mencoba melakukan analisis sensitifitas, dalam penelitian ini akan membandingkan hasil pengolahan data, apabila seluruh responden menganggap skenario yang dianggap paling realistis adalah status quo atau pesimis.

- Skenario Status Quo

Apabila seluruh responden memilih skenario **STATUS QUO** sebagai skenario yang paling realistis, maka terjadi perubahan sasaran, dan sekaligus perubahan urutan prioritas kebijakannya, seperti yang dijelaskan pada tabel 5.15.

Tabel 5.15 Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Status Quo

Level	DEFINISI	BOBOT
1	Skenario	
	1. Optimis	0,0910
	2. Status Quo	0,8180
	3. Pesimis	0,0910
2	Sasaran	
	Status Quo	
	1. Mengurangi kemiskinan	0,4198
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	0,3072
	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat	0,2728
3	Alternatif Strategi	
	Sasaran Mengurangi Kemiskinan	
	Prioritas I : Mengoptimalkan sumber daya	0,2510
	Prioritas II : Memperkuat ekonomi mikro	0,2450

Sumber: Pengolahan penilaian responden dengan menggunakan *Software Expert Choice*

Dengan Skenario **STATUS QUO**, artinya kondisi perekonomian sama seperti pada saat ini, maka sasaran yang menjadi prioritas adalah **MENGURANGI KEMISKINAN**, dengan prioritas pertama yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah **MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA**. Dengan kondisi perekonomian seperti saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Masih banyak penduduk yang rentan pada masalah sosial dan berada di bawah garis kemiskinan dan belum banyak tersedia lapangan kerja yang memadai, yang mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pembangunan, apabila dikelola dengan baik. Sumber daya manusia di Kabupaten Klaten cukup melimpah, meskipun dengan kualitas yang masih sangat bervariasi. Sumber daya alam di Kabupaten Klaten juga mendukung pembangunan daerah, kekayaan alam ini bisa menghasilkan penerimaan daerah, misalnya sumber-sumber air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, maupun kebutuhan pihak lain.

Dalam rangka mengurangi kemiskinan di Kabupaten Klaten, dalam skenario status quo, mengoptimalkan sumber daya menjadi prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, misalnya transfer dari pusat dan keuntungan posisi geografis, maka pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan yang paling tepat, sektor apa yang seharusnya dikembangkan, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Klaten, dan pada akhirnya sedikit demi sedikit mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Klaten.

- Skenario Pesimis

Apabila seluruh responden memilih skenario **PESIMIS** sebagai skenario yang paling realistis, maka terjadi perubahan sasaran, dan sekaligus perubahan urutan prioritas kebijakannya, seperti yang dijelaskan pada tabel 4.19.

Tabel 5.16 Hasil Pengolahan AHP Dengan Skenario Pesimis

Level	DEFINISI	BOBOT
1	Skenario	
	1. Optimis	0,0910
	2. Status Quo	0,0910
	3. Pesimis	0,8180
2	Sasaran	
	Pesimis	
	1. Mengurangi kemiskinan	0,3478
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	0,2896
	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat	0,3628
3	Alternatif Strategi	
	Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	
	▪ Prioritas I: Mengoptimalkan sumber daya	0,2487
	▪ Prioritas II: Meningkatkan kinerja lembaga	0,2245

Sumber: Pengolahan penilaian responden dengan menggunakan *Software Expert Choice*

Dengan Skenario **PESIMIS**, yang artinya kondisi perekonomian lebih buruk dari pada kondisi saat ini, maka sasaran yang menjadi prioritas adalah **MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT**, dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah **MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA**. Dengan kondisi perekonomian yang buruk, maka partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat diharapkan semakin bisa berperan serta secara aktif mendukung pembangunan ditengah kondisi perekonomian yang mungkin kurang menguntungkan.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam pembangunan daerah, khususnya pada masa otonomi daerah seperti sekarang ini. Bentuk partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai peran aktif masyarakat untuk

ikut menjadi inisiator yang berfungsi menentukan isu-isu dalam pengambilan keputusan dan sebagai pemandu, yang berfungsi mengarahkan pengambilan kebijakan (Fagence, 1977). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berarti terlibatnya masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah walaupun saat ini, sering muncul kekhawatiran pemerintah daerah karena tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat secara umum.

Ginanjari Kartasasmita dalam Zoebir (2008) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program-program pembangunan daerah dapat dilakukan melalui tiga cara:

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional;
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbukanya akses akan membuat masyarakat semakin berdaya, seperti misalnya tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan;
- Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah, jangan sampai pihak yang lemah terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dan membela harus dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sempurna dan eksploitasi atas yang lemah.

Dengan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat membuat prioritas pembangunan dengan paling tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam kondisi perekonomian yang buruk,

pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang paling tepat, sehingga terhindar dari pemborosan keuangan daerah ataupun melakukan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat ini, maka berdasarkan penilaian para *expert*, prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

Sumber daya manusia di Kabupaten Klaten cukup berlimpah, dimana 75,69% nya merupakan penduduk usia produktif, hal ini merupakan salah satu modal dasar yang cukup baik bagi Kabupaten Klaten untuk melakukan pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan sumber daya manusia ini, antara lain dengan memberikan pendidikan, ketrampilan, dan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, maka diharapkan masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan.

Berdasarkan perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa hirarki yang dibuat dalam rangka menemukan urutan prioritas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, merupakan hirarki yang cukup tidak stabil. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam merencanakan pembangunan daerah, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya faktor intern pemerintah daerah, namun juga faktor ekstern yang tentu saja tidak bisa dikontrol, seperti misalnya kondisi nasional ataupun internasional. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan yang signifikan, maka akan terjadi perubahan pula pada sasaran pembangunan sekaligus urutan prioritas kebijakannya. Dengan memahami ketidakstabilan hirarki dalam penentuan prioritas kebijakan pembangunan daerah ini, maka pemerintah daerah dapat membuat antisipasi apabila terjadi sesuatu yang diluar perkiraan.

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap penilaian kuisisioner SWOT oleh para responden yang dianggap ahli, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

Faktor Kekuatan

Faktor Kekuatan (*Strength*) utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian;
2. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang berada diantara daerah-daerah lain yang sudah maju dan memiliki berbagai fasilitas yang sifatnya nasional maupun internasional;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Klaten;

Faktor Kelemahan

Faktor Kelemahan (*Weakness*) utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Klaten;
2. Kurangnya upaya sosialisasi potensi daerah Kabupaten Klaten kepada pihak luar;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah yang dinilai masih kurang.

Faktor Peluang

Faktor Peluang (*Opportunity*) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;

2. Berbagai program pemerintah pusat;
3. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah;

Faktor Ancaman

Faktor Ancaman (*Threat*) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)
2. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia;
3. Kurangnya investasi swasta di Kabupaten Klaten.

Alternatif Strategi

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap kuisisioner SWOT, maka usulan strategi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah Strategi *Strength – Opportunity (SO)*, yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut:

1. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten;
2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Klaten, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas;

3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten.

Prioritas Kebijakan Pembangunan

Prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ekonomi mikro;
2. Memanfaatkan segala sumber daya untuk mengoptimalkan otonomi daerah;
3. Memperbaiki kinerja lembaga;
4. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
5. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah;

Prioritas kebijakan ini sangat mungkin berubah, terutama apabila terjadi hal-hal yang diluar rencana. Apabila skenario yang paling realistis adalah skenario status quo, maka sasaran yang harus dicapai adalah mengurangi kemiskinan, dengan prioritas kebijakan yang harus diambil adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan apabila skenario yang dianggap paling realistis adalah skenario pesimis, maka sasaran yang harus dicapai adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kebijakan mengoptimalkan sumber daya.

6.2. Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membuat prioritas pembangunan yang lebih memperhatikan keberadaan dan keberlanjutan industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang di ada di lingkungan Kabupaten Klaten, karena bagaimanapun UMKM memberikan sumbangan yang cukup besar pada struktur perekonomian. UMKM yang dimaksud disini bukan hanya dari jenis kerajinan atau industri pengolahan, tapi juga termasuk UMKM yang berbasis pertanian, karena pada dasarnya Kabupaten Klaten memiliki potensi di sektor pertanian;
- Menyempurnakan berbagai infrastruktur yang mendukung sektor pertanian (seperti perbaikan irigasi dan aplikasi tehnologi) dan sektor pariwisata, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ingin menjadikan kedua sektor tersebut sebagai sektor unggulan.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambahkan responden yang lebih variatif, misalnya dengan menambahkan para pelaku usaha/pelaku perekonomian.

6.3. Keterbatasan Studi

Keterbatasan studi yang dilakukan tidak lepas dari penggunaan metode yang digunakan, yaitu:

- Metode Analisis SWOT

Metode analisis SWOT memiliki beberapa kelemahan, antara lain cenderung melihat permasalahan dari satu sudut pandang, yaitu yang dijadikan *stake holder* utama. Pada penelitian ini, *stake holder* utamanya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kelemahan lainnya adalah data yang dihasilkan sangat tergantung terhadap penilaian responden. Dampaknya adalah belum tentu semua responden memberikan penilaian yang obyektif terhadap

permasalahan yang disampaikan, sehingga subyektifitas penilaian sulit untuk dikontrol. Selain itu, penentuan responden juga menjadi kelemahan, karena tidak ada jaminan responden yang dipilih benar-benar mewakili institusi atau kelompoknya.

- Metode AHP

Penggunaan metode AHP juga memiliki kelemahan. model AHP tidak luput dari beberapa kelemahan yang dapat berakibat fatal. Ketergantungan model ini pada input berupa persepsi seorang *expert* akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila *expert* memberikan penilaian yang keliru. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya kriteria yang jelas untuk seorang *expert*, membuat orang sering ragu-ragu dalam menanggapi solusi yang dihasilkan model ini.

- Penggunaan kuisisioner

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen kuisisioner, idealnya dilakukan dengan pendampingan dari peneliti, sehingga apabila terjadi salah persepsi dapat segera ditanyakan kepada peneliti. Namun dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan berbagai permasalahan yang ditemui penulis dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dijelaskan bahwa seluruh pengisian kuisisioner dalam penelitian ini dilakukan tanpa pendampingan dari penulis.

6.4. Penutup

Terlepas dari segala kelemahan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan perbandingan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk melakukan proses perencanaan pembangunan, dan dapat memperkaya tulisan dengan topik yang serupa, sehingga pada akhirnya nanti proses perencanaan pembangunan dan penentuan prioritas pembangunan di masing-masing daerah di Indonesia dapat dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah dengan melibatkan orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Brojonegoro PS, Bambang. 1992. *AHP (the Analytical Hierarchy Process)*. Pusat Antar University – Studi Ekonomi Universitas Indonesia;
- Mankiw, Gregory. 2003. *Principles of Economics 2th Edition* (terj);
- Saaty, L. Thomas. 2000. *Decision Making For Leaders*. University of Pittsburgh;
- Susantono, Bambang. 2009. *Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta;
- Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta;
- Soesilo, I Nining. 2002. *Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Buku I*. Universitas Indonesia;
- Soesilo, I Nining. 2002. *Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis), Buku II*. Universitas Indonesia;
- Todaro, P. Michael and Smith, C. Stephen. 2006. *Economic Development 9th Edition* (terj). Penerbit Erlangga, Jakarta.

Jurnal

- Effendi Taufiq Drs. 2007. *Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Haryanto, Joko Tri. 2004. *Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah*. Departemen Keuangan Indonesia;

Mee Kam Ng. *Strategic Planning in Hongkong*;

Sala-i-Martin, Xavier. 2005. *The World Distribution of Income: Falling Poverty and Convergence Period*;

Simon, Julian Lincoln. 1981. *The Ultimate Resource*;

Stiglitz, Joseph. 1998. *Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes*;

Wilkinson, Will. 2007. *In Pursuit of Happiness Research, Is It Reliable? What Does It Imply for Policy*;

Publikasi

Badan Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten. 1986. *Mengenal Obyek Wisata di Kabupaten Klaten*;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2006. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2005*

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006*

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2007*;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008*;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007*;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007*;

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007*;
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008*;
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2008. *Boyolali Dalam Angka 2007*;
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2009. *Boyolali Dalam Angka 2008*;
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2009. *Pendapatan Regional Kabupaten Boyolali Tahun 2004 - 2008*;
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2009. *Hasil Registrasi Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2008*;
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. 2009. *Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2008*;
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008*;
- Bagian Sosial Setda Kabupaten Klaten. 2007. *Statistik dan Analisis Gender Kabupaten Klaten Tahun 2006*;
- Bank Indonesia. 2009. *Tinjauan Ekonomi Regional 2010*;
- Bappeda Kabupaten Klaten. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2008*;
- Bappeda Kabupaten Klaten. 2008. *Klaten Dalam Angka Tahun 2007*;
- Bappeda Kabupaten Klaten. 2009. *Klaten Dalam Angka Tahun 2008*;

Bappeda Kabupaten Sukoharjo. 2009. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008*;

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan. *ASEAN Free Trade Area*;

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. 2010. *Berita Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2009, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010*;

World Bank. *Poverty, Growth and Inequality*.

Tesis

Amrullah, Taufiq. 2006. *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Universitas Indonesia;

Asrori. 1986. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kemampuan keuangan Daerah Sebagai Upaya Untuk Mengembangkan Daerah tingkat II Pandeglang*. Universitas Indonesia;

Hutasoit, Donal. 2005. *Strategi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Rangka Mengurangi Laju Kerusakan Hutan: Suatu Pendekatan Analisis SWOT dan AHP*. Universitas Indonesia;

Idie, Marthen. 1999, *Konsep Perencanaan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Pemantapan Otonomi Daerah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Fakfak*. Universitas Indonesia;

Sitinjak, Robert, 2000, *Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Analisis SWOT dan AHP*. Universitas Indonesia;

Winarto, Victor. 2005. *Analisis Disparitas Pendapatan Di Kabupaten Klaten*.
Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Surat Kabar

Harian Solo Pos, 11 September 2001;

Harian Solo Pos, 8 Januari 2007;

Harian Solo Pos, 31 Juli 2007;

Harian Solo Pos, 17 Juli 2007;

Harian Solo Pos, 20 Juli 2007;

Harian Solo Pos, 26 Juli 2007;

Harian Solo Pos, 27 Juli 2007;

Harian Solo Pos, 21 Agustus 2007;

Harian Suara Merdeka, 13 Juni 2007;

Harian Suara Merdeka, 29 November 2007;

Harian Suara Merdeka, 22 Desember 2007.

Website

www.bpk.go.id

www.bpsjateng.go.id

www.google.com

www.klaten.go.id,

www.surakarta.go.id,

www.wikipedia.co.id

<http://ovalhanif.wordpress.com/2009/12/>

<http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/>

Daftar Responden Kuisisioner SWOT

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Pend
1	Ir. Anggoro Budi, W., MM	Kabid Perencanaan Ekonomi	Bappeda	S2
2	Bambang Margono, SH., Msi	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana	Bappeda	S2
3	Windri Hastuti, S.Sos., Msi	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya	Bappeda	S2
4	Konstrad Budi N, SH., Msi	Kepala Bidang Pendapatan, Evaluasi, dan Litbang	Bappeda	S2
5	Joko Handoyo HS., SSTP	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappeda	S1
6	Sri Sihwinarni, SH., Msi	Kabid Perimbangan Keuangan	DPPKAD	S2
7	Drs. Purwanto Agus R., MM	Kabid Kas dan Akuntansi	DPPKAD	S2
8	GS. Wahyu Widodo, STP., Msi	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	DPPKAD	S2
9	Sri Sumanto, SE., MM	Kabag Perekonomian	Setda	S2
10	Widowati, SE., MH	Bag. Adm pembangunan	Setda	S2
11	Yoenanto Sinung N, ST., MSE	Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM	Disperindagkop	S2
12	Ir. Etik Purwantari	Kepala Seksi PPKL	Disperindagkop	S1
13	Drs. Tri Wuryanto	Kepala Bidang Perindustrian	Disperindagkop	S1
14	Sunarto	Kepala Seksi PP	Disperindagkop	S1
15	Dwiranto Ssos., M.Si	Kepala Seksi Usaha dan Promosi Perdagangan	Disperindagkop	S2

(Lanjutan)

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Pend
16	Y. Wiwing Mardewi, S.Sos., M.Si	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen	Disperindagkop	S2
17	Wiyono., SE	Kasi Pengawasana dan Pengendalian perdagangan	Disperindagkop	S1
18	Arif Julianto Sri N., SE. Msi	Dekan Fakultas Ekonomi	Univ. Widya Dharma	S2
19	Abdul Haris, SE., MM	Dosen Fakultas Ekonomi	Univ. Widya Dharma	S2
20	Agung Nugroho, SE., Msi., Akt	Dosen Fakultas Ekonomi	Univ. Widya Dharma	S2

KUISIONER SWOT ANALISIS SWOT UNTUK STRATEGI KEBIJAKAN

Penelitian

Penelitian kuisisioner untuk menjangkau penilaian/persepsi ahli atas faktor internal dan eksternal dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, sebagai upaya pemilihan/penilaian (*judgement comparison*) untuk merumuskan rekomendasi alternatif strategi kebijakan percepatan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten.

Penjelasan

1. Maksud penelitian adalah untuk mendapatkan persepsi/penilaian ahli yang sifatnya subyektif, sehingga jawaban responden dibuat berdasarkan persepsi responden atas penilaian-penilaian faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi;
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penilaian ahli atas interaksi faktor internal dengan faktor eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk mencapai penilaian alternatif prioritas strategi pilihan;
3. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menyusun tesis (karya akhir) guna melengkapi salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
4. Bahwa untuk memperoleh masukan seperti tersebut pada poin 1 di atas, maka yang akan dijadikan responden (yang dianggap ahli) adalah para pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan akademisi pada Universitas Widya Dharma;
5. Mengingat pentingnya masukan dari Bapak/Ibu, maka kami mohon kiranya dapat membantu sepenuhnya dengan mengisi penilaian dengan sungguh-sungguh, agar hasil yang dicapai dapat memberikan alternatif kebijakan yang terbaik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
6. Karena sifatnya penelitian akademik, maka untuk menjamin keakuratan masukan yang Bapak/Ibu berikan, kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan mengisi data-data kuisisioner ini berupa identitas diri dan lembar pertanyaan di bawah ini:

(Lanjutan)

Data Responden

Nama Lengkap (beserta gelar) :
Jabatan :
Pangkat Golongan :
Unit Kerja :
Masa kerja :
No Telp/HP :
Alamat :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita*
Pendidikan Tertinggi : SMU/Akademi/S1/S2/S3*

* coret yang tidak perlu

Tanda Tangan

(Lanjutan)

Petunjuk Pengisian

- ♣ Tujuan kuisioner: menjangring persepsi penilaian responden (ahli) berdasarkan persepsi terhadap penilaian faktor internal dan faktor eksternal yang terkait dengan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
- ♣ Berilah penilaian atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan angka di bawah ini:

- Angka 9 = amat sangat baik.
- Angka 8 = sangat baik;
- Angka 7 = baik;
- Angka 6 = sedikit baik;
- Angka 5 = sedang/netral
- Angka 4 = sedikit buruk;
- Angka 3 = buruk;
- Angka 2 = sangat buruk;
- Angka 1 = amat sangat buruk.

Berilah penilaian urgensi penanganan atas faktor internal dan faktor eksternal tersebut, dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan huruf berikut ini:

- Huruf a = prioritas amat penting dilakukan penanganannya;
- Huruf b = prioritas penting dilakukan penanganannya;
- Huruf c = prioritas kurang penting penanganannya;
- Huruf d = prioritas tidak penting dilakukan penanganannya.

Bapak/Ibu bebas memberikan penilaian, asalkan berkisar antara nilai-nilai:

- Angka : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Huruf : a, b, c, d.

Selamat menjawab. Terima kasih.

(Lanjutan)

No	Faktor-faktor	Penilaian Responden												
		Penilaian atas kondisi/prestasi faktor-faktor									Urgensi Prioritas (Bobot Kepentingan)			
		Buruk			Netral			Baik			a	b	c	d
I	Faktor Internal													
1	Posisi geografis Kabupaten Klaten dalam menunjang terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
2	Kondisi topografi Kabupaten Klaten yang bervariasi (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda) dalam rangka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
3	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Klaten dalam rangka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
4	Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, dan infrastruktur jalan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang lebih baik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
5	Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian dalam rangka mendukung struktur ekonomi Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d

(Lanjutan)

No	Faktor-faktor	Buruk			Netral			Baik			Urgensi Prioritas (Bobot Kepentingan)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
6	Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
7	Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro dalam upaya mendukung pertumbuhan makro perekonomian Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
8	Kapasitas dan kinerja kelembagaan di Kabupaten Klaten dalam upaya peningkatan produktifitas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
9	Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten sebagai sumber PAD dan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
10	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
11	Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d

(Lanjutan)

No	Faktor-faktor	Buruk			Netral			Baik			Urgensi Prioritas (Bobot Kepentingan)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
12	Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata dalam rangka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
13	Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah dalam rangka memeratakan kesejahteraan masyarakat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
14	Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor) dalam upaya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
15	Penentuan skala prioritas pembangunan dalam upaya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
16	Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten dalam upaya penciptaan investasi di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
17	Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Klaten dalam upaya mendukung pembangunan daerah Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d

Tambahkan faktor internal lain yang anda anggap cukup penting dan mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Klaten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Lanjutan)

No	Faktor-faktor	Buruk			Netral			Baik			Urgensi Prioritas (Bobot Kepentingan)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
II	Faktor Eksternal													
1	Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam upaya pembangunan kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
2	Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 25 Tahun 2008 dalam upaya pembangunan di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
3	Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
4	Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia dalam upaya pembangunan daerah Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
5	Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d

(Lanjutan)

No	Faktor-faktor	Buruk			Netral			Baik			Urgensi Prioritas (Bobot Kepentingan)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
6	Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional dalam upaya mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
7	Kondisi sosial politik di tingkat nasional dalam upaya mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
8	Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten dalam upaya mendukung pembangunan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
9	Berbagai program pemerintah pusat dalam upaya mendukung pembangunan di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
10	Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah dalam upaya pembangunan Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
11	Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mendukung pembangunan di Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
12	Kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam upaya meningkatkan efisiensi di lingkungan Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d

13	Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik sekitar Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
14	Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Klaten dalam upaya mendukung pembangunan Kabupaten Klaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
15	Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d

Tambahkan faktor eksternal lain yang anda anggap cukup penting dan mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Klaten.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d

Daftar Responden Kuisisioner AHP

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Ir. Anggoro Budi, W., MM	Kabid. Perencanaan Ekonomi	Bappeda
2	Bambang Margono, SH., Msi	Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana	Bappeda
3	Konstrad Budi Nugroho, SH., Msi	Kabid. Pendapatan, Evaluasi, dan Litbang	Bappeda
4	Drs. Sri Hartanto M.Si	Kasubid Pemerintahan dan kependudukan	Bappeda
5	Arif Julianto Sri N., SE. Msi	Dekan Fakultas Ekonomi	Univ. Widya Dharma
6	Abdul Haris, SE., MM	Dosen Fakultas Ekonomi	Univ. Widya Dharma
7	Drs. FL. Tri Sumartanto	Tokoh Masyarakat/pengamat pembangunan	

KUISIONER AHP
ANALISIS AHP UNTUK STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Penelitian

Kuisisioner ini ditujukan untuk memilih prioritas kebijakan dalam rangka penelitian “Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, Pendekatan Analisis SWOT dan AHP”. Kuisisioner AHP ini merupakan lanjutan analisis SWOT yang telah dilaksanakan sebelumnya dan sudah menghasilkan beberapa alternatif strategi terpilih.

Penjelasan

7. Maksud penelitian adalah untuk mendapatkan persepsi/penilaian ahli yang sifatnya subyektif, sehingga jawaban responden dibuat berdasarkan persepsi responden atas penilaian-penilaian faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi;
8. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menyusun tesis (karya akhir) guna melengkapi salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
9. Bahwa untuk memperoleh masukan seperti tersebut pada poin 1 di atas, maka yang akan dijadikan responden (yang dianggap ahli) adalah para pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan akademisi pada Universitas Widya Dharma;
10. Mengingat pentingnya masukan dari Bapak/Ibu, maka kami mohon kiranya dapat membantu sepenuhnya dengan mengisi penilaian dengan sungguh-sungguh, agar hasil yang dicapai dapat memberikan alternatif kebijakan yang terbaik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
11. Karena sifatnya penelitian akademik, maka untuk menjamin keakuratan masukan yang Bapak/Ibu berikan, kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan mengisi data-data kuisisioner ini berupa identitas diri dan lembar pertanyaan di bawah ini:

(Lanjutan)

Data Responden

Nama Lengkap (beserta gelar) :
Jabatan :
Pangkat Golongan :
Unit Kerja :
Masa kerja pada jabatan saat ini :
No Telp/HP :
Alamat :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita*
Pendidikan Tertinggi : SMU/Akademi/S1/S2/S3*

* coret yang tidak perlu

Tanda Tangan

(Lanjutan)

Petunjuk Pengisian

Kuisisioner ini merupakan peralatan pendukung Analytical Hierarchy Process (AHP). Adapun kuisisioner yang digunakan adalah sistem rangking yang menilai besarnya pengaruh anatar satu elemen faktor dengan elemen faktor lainnya. Dengan kata lain, setiap responden dapat memilih jawaban yang berada disisi kanan ataupun kiri menurut bobot kepentingannya.

Bobot nilai yang dipakai dalam pertanyaan-pertanyaan ini diberi definisi verbal sebagai berikut:

- Nilai Bobot 1 = sama pentingnya
- Nilai Bobot 3 = sedikit lebih penting
- Nilai Bobot 5 = kuat pentingnya
- Nilai Bobot 7 = sangat kuat pentingnya
- Nilai Bobot 9 = mutlak lebih penting

Nilai 2, 4, 6, 8 adalah nilai antara dari nilai bobot 1, 3, 5, 7, 9

Setiap responden memilih jawaban dengan membandingkan tingkat prioritas kepentingan (anatar 1 samapi dengan 9) dari kedua elemen faktor dengan membubuhkan tanda silang (X) pada salah satu kolom bobot nilai tersebut, seperti contoh berikut ini:

Contoh:

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Jawaban A lebih penting dari B dengan bobot 3

Artinya: pilihan A “sedikit lebih penting” dibandingkan dengan pilihan B

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Jawaban B lebih penting dari A dengan bobot 7

Artinya: Pilihan B “sangat kuat pentingnya” dibandingkan dengan pilihan A

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Jawaban A = B, bobot = 1

Artinya: Pilihan A “sama penting” dengan pilihan B

Kuisisioner ini menggunakan metode proses analisis hirarki (*Analytical Hierarchy Process*) yang memanfaatkan skala untuk menilai pentingnya satu unsur dibandingkan dengan unsur yang lain, dalam suatu kerangka yang sedang dipertimbangkan. Struktur hirarki yang akan digunakan disusun berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya, yang telah mendapatkan hasil sebagai berikut:

Goal

Tujuan yang ingin dicapai adalah strategi terbaik bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk melakukan pembangunan daerah.

Level 1 = Skenario

- Skenario optimis, merupakan skenario masa depan dimana lingkungan internal dan eksternal di lingkungan Kabupaten Klaten sangat mendukung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Klaten, atau kondisi masa depan lebih baik dari kondisi pada masa sekarang sehingga mendukung tercapainya sasaran yang diharapkan;
- Skenario Status Quo, merupakan skenario masa depan, dimana kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Klaten tetap sama dengan kondisi saat sekarang (hampir tidak ada perubahan);
- Skenario Pesimis, merupakan skenario masa depan, dimana kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Klaten lebih buruk dibandingkan kondisi pada saat ini.

Level 2 = Sasaran

- Sasaran mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- Sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Level 3 = Alternatif Strategi

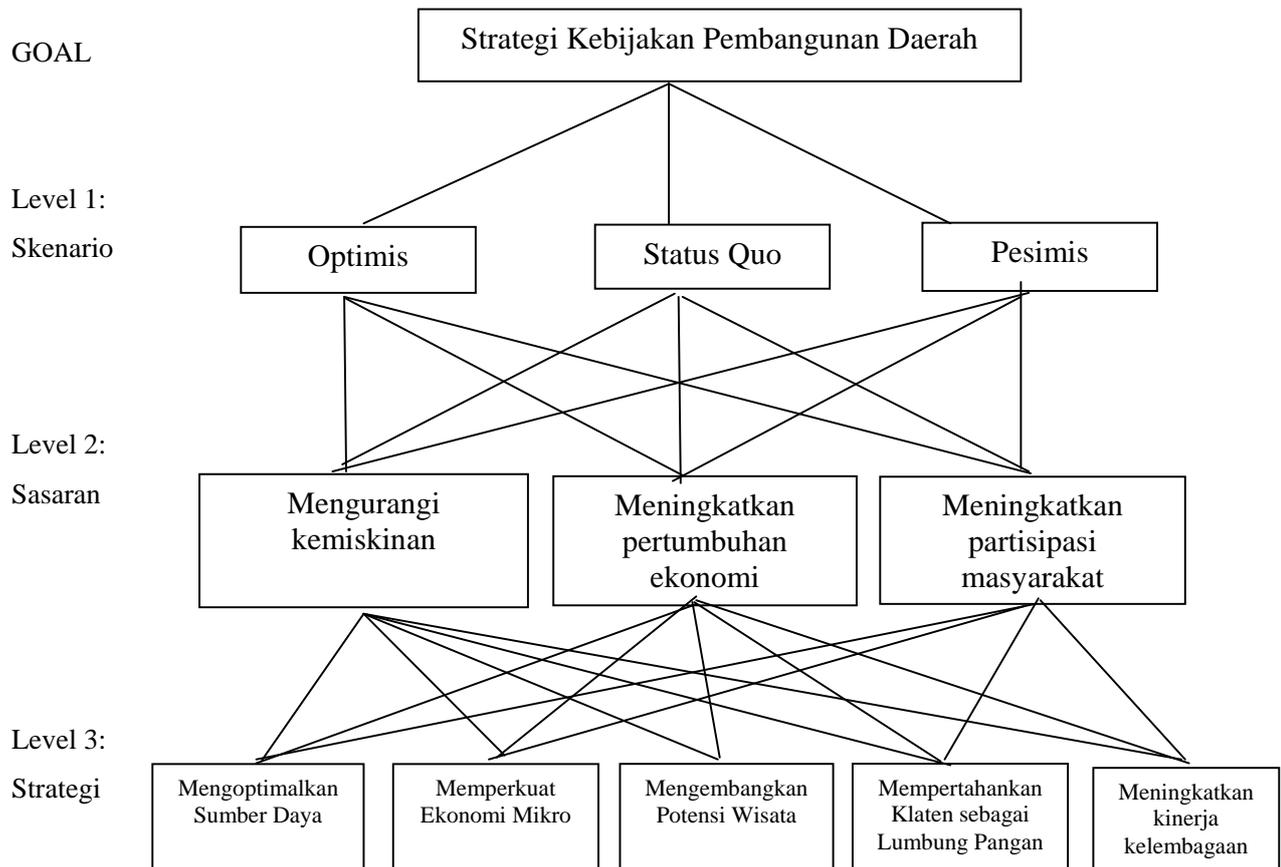
- Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang

menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, atau dapat disederhanakan dalam hirarki menjadi ***mengoptimalkan sumber daya;***

- Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Klaten, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas, atau disederhanakan dalam hirarki menjadi ***memperkuat ekonomi mikro;***
- Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau disederhanakan dalam hirarki menjadi ***mengembangkan potensi pariwisata;***
- Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten, atau disederhanakan dalam hirarki menjadi ***mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai lumbung pangan;***
- Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru; atau disederhanakan dalam hirarki menjadi ***meningkatkan kinerja kelembagaan.***

(Lanjutan)

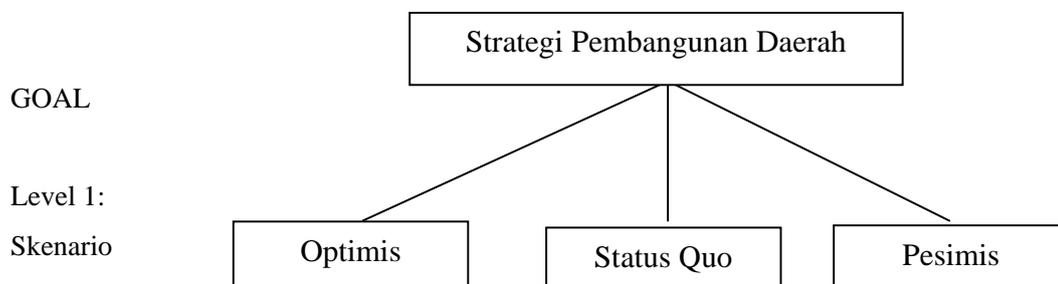
Hirarki Model AHP



Selamat menjawab.

Terima kasih.

(Lanjutan)



Berkaitan dengan pencapaian tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah, maka skenario mana yang dianggap lebih realistis untuk diprioritaskan?

1. Optimis	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Status quo
2. Optimis	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pesimis
3. Pesimis	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Status quo

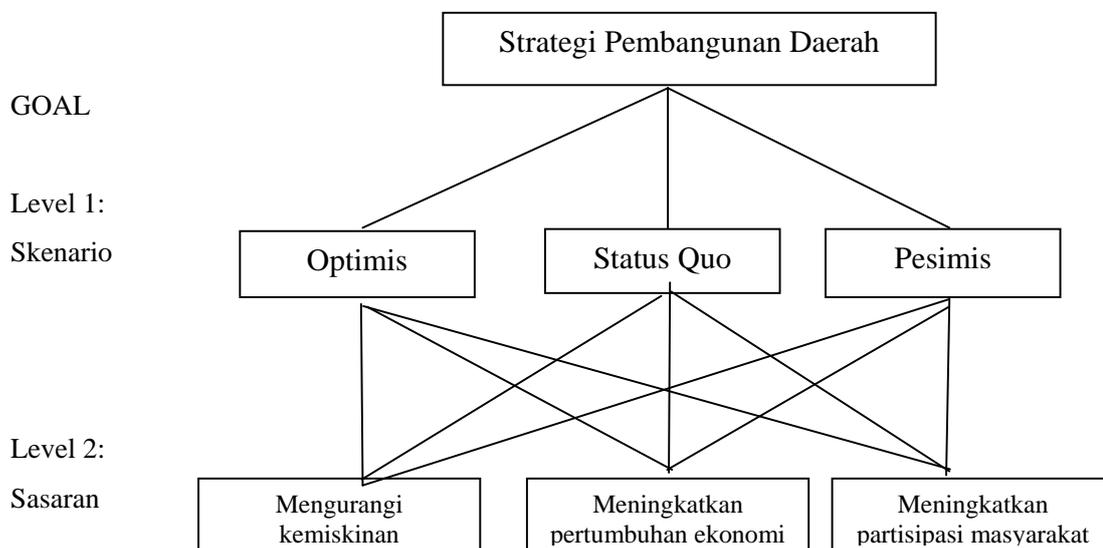
Keterangan:

Optimis: kondisi lingkungan internal dan eksternal lebih baik dari saat ini untuk mencapai tujuan di masa mendatang;

Status Quo: kondisi lingkungan internal dan eksternal tetap seperti saat sekarang ini untuk mencapai tujuan di masa mendatang;

Pesimis: kondisi lingkungan internal dan eksternal dimasa mendatang lebih buruk daripada kondisi saat ini untuk mencapai tujuan di masa mendatang;

(Lanjutan)



Bila skenario **OPTIMIS** untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah, sasaran apa yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan?

4. Mengurangi Kemiskinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningkatkan pertumb. ekonomi
5. Mengurangi Kemiskinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningk. Partisipasi masy
6. Meningkatkan pertumb. ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningk. Partisipasi masy

Bila skenario **STATUS QUO** untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah, sasaran apa yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan?

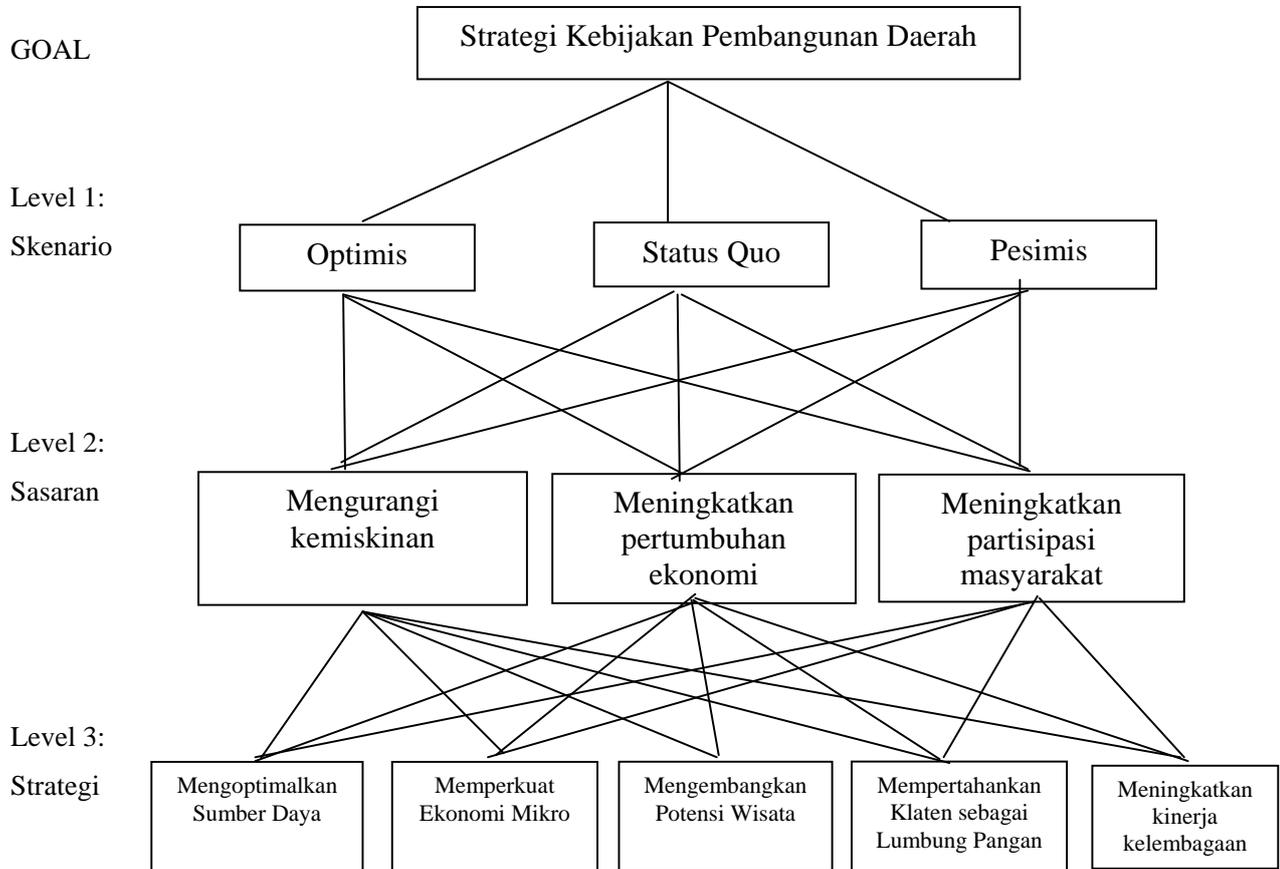
7. Mengurangi Kemiskinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningkatkan pertumb. ekonomi
8. Mengurangi Kemiskinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningk. Partisipasi masy
9. Meningkatkan pertumb. ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningk. Partisipasi masy

(Lanjutan)

Bila skenario **PESIMIS** untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah, sasaran apa yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan?

10. Mengurangi Kemiskinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningkatkan pertumb. ekonomi
11. Mengurangi Kemiskinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningk. Partisipasi masy
12. Meningkatkan pertumb. ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meningk. Partisipasi masy

(Lanjutan)



Bila **MENGURANGI KEMISKINAN** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **OPTIMIS**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

13. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
14. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
15. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lumbung Pangan
16. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

(Lanjutan)

17. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
18. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
19. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
20. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
21. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
22. Lambung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

Bila **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **OPTIMIS**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

23. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
24. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
25. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
26. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
27. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
28. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
29. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
30. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
31. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
32. Lambung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

(Lanjutan)

Bila **MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **OPTIMIS**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

33. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
34. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
35. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
36. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
37. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
38. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
39. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
40. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
41. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
42. Lambung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

Bila **MENGURANGI KEMISKINAN** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **STATUS QUO**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

43. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
44. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
45. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
46. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

(Lanjutan)

47. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
48. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lumbung Pangan
49. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
50. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lumbung Pangan
51. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
52. Lumbung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

Bila **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **STATUS QUO**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

53. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
54. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
55. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lumbung Pangan
56. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
57. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
58. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lumbung Pangan
59. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
60. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lumbung Pangan
61. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
62. Lumbung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

(Lanjutan)

Bila **MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **STATUS QUO**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai tujuan strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

63. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
64. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
65. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
66. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
67. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
68. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
69. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
70. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
71. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
72. Lambung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

Bila **MENGURANGI KEMISKINAN** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **PESIMIS**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai sasaran strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

73. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
74. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
75. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
76. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

(Lanjutan)

77. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
78. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
79. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
80. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
81. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
82. Lambung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

Bila **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **PESIMIS**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai sasaran strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

83. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
84. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
85. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
86. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
87. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
88. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
89. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
90. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
91. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
92. Lambung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

(Lanjutan)

Bila **MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT** sebagai sasaran yang lebih penting dengan skenario **PESIMIS**, maka strategi mana yang dianggap lebih penting untuk diprioritaskan untuk mencapai sasaran strategi terbaik bagi pembangunan daerah?

93. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ekonomi Mikro
94. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
95. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
96. Sumber Daya	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
97. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Potensi Pariwisata
98. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
99. Ekonomi Mikro	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
100. Potensi wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lambung Pangan
101. Potensi Wisata	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga
102. Lambung Pangan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kinerja Lembaga

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA

**HASIL PENGOLAHAN DATA
ANALISIS SWOT**

(Lanjutan)

Hasil Penilaian Responden atas Kuisisioner SWOT

FAKTOR INTERNAL

No	Bobot Penilaian Responden																				Urgensi Penanganan																									
	Responden																				Responden																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Rata2	Ket	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Rata2			
1	8	8	7	8	8	7	7	8	7	9	8	8	7	7	7	7	8	8	9	9	7,75	S	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,35
2	7	7	6	8	8	6	7	8	5	7	7	7	6	7	5	3	7	8	7	8	6,7	W	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,35	
3	9	7	8	9	8	7	8	8	8	7	8	9	7	7	6	6	7	7	8	7	7,55	S	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3,55	
4	8	7	7	8	8	7	7	7	8	8	8	6	8	7	5	6	7	4	5	8	6,95	S	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3,65		
5	9	8	8	9	8	8	7	7	7	8	8	9	8	7	7	7	8	8	8	9	7,9	S	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3,65		
6	8	7	8	8	7	7	7	7	5	8	9	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	S	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3,1		
7	8	6	8	8	8	8	7	8	7	8	9	6	6	7	8	5	7	7	9	7	7,35	S	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3,2	
8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	8	7	6	6	5	6	7	4	4	3	6,4	W	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3,15			
9	4	5	7	8	8	6	7	7	8	8	9	8	7	6	4	7	7	8	8	8	7	S	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3,35			
10	8	6	8	7	7	6	7	7	6	7	8	6	6	5	6	5	6	6	6	3	6,3	W	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3,05		
11	6	5	7	7	7	7	8	7	5	7	8	6	6	6	7	5	6	6	7	8	6,55	W	2	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	8	7	6	7	4	6	7	6	8	8	6,9	S	2	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,15		
13	7	7	7	7	7	8	7	7	7	8	8	4	7	6	6	5	6	6	5	7	6,6	W	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3,2		
14	8	7	7	6	7	6	7	7	7	7	8	4	6	6	7	5	6	3	4	6	6,2	W	3	3	4	4	3	4	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3,2		
15	7	7	8	6	7	7	7	7	7	7	8	6	5	6	5	5	6	5	5	7	6,4	W	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	4	4	3	3	3,2		
16	7	7	7	7	7	6	7	7	5	7	8	5	5	6	6	5	6	3	4	6	6,05	W	3	2	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	2	4	2	3	4	4	4	4	3,25		
17	5	5	7	6	7	9	5	5	7	7	9	7	5	6	4	5	6	3	5	7	6	W	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	2	4	3	4	3	3,45			
	Rata-rata																				6,80		Rata-rata																				3,29			

(Lanjutan)

FAKTOR EKSTERNAL

No	Bobot Penilaian Responden																				Urgensi Penanganan																								
	Responden																				Responden										Rata-rata														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Rata2	Ket	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	6	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	5	6	6	7	5	6	7	5	8	6,6	O	2	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3		
2	6	6	7	7	7	7	8	6	7	7	6	6	6	8	4	7	6	8	8	6,7	O	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3		
3	6	8	7	8	7	7	7	7	6	7	9	8	6	6	7	5	7	7	6	8	6,95	O	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3,15		
4	7	6	6	7	7	6	7	8	5	7	8	6	6	6	5	5	7	3	6	3	6,05	T	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	4	3	3	4	3,1		
5	7	6	6	7	7	6	3	6	5	7	8	6	6	4	4	5	6	3	3	3	5,4	T	2	2	3	4	2	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	4	2,85		
6	7	5	7	7	7	7	5	7	7	7	8	7	7	5	7	7	7	5	6	7	6,6	O	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,8	
7	6	5	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	5	6	5	6	6	6	3	6,3	T	2	3	4	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
8	6	6	7	6	7	8	7	7	7	7	9	7	7	6	7	4	6	6	6	3	6,45	O	2	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,2	
9	7	7	8	8	7	8	7	7	7	8	8	6	7	6	5	3	7	6	7	8	6,85	O	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,05
10	7	7	7	6	7	8	7	7	7	8	8	5	6	6	6	5	7	7	7	7	6,75	O	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3,2	
11	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	6	6	6	7	3	6	3	6	3	6,25	T	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3,1	
12	7	8	7	7	7	6	7	7	6	8	9	6	6	6	6	7	7	3	6	7	6,65	O	1	2	3	3	3	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2,85	
13	7	8	7	7	7	6	7	7	7	8	8	7	5	6	5	4	6	3	6	7	6,4	T	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	2,9		
14	7	6	7	7	7	7	7	7	5	7	8	6	5	5	4	3	7	5	6	7	6,15	T	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3,45		
15	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	6	5	6	5	5	6	6	6	7	6,45	O	1	3	4	4	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3,05	
	Rata-rata																				6,44		Rata-rata																				3,05		

(Lanjutan)

Strategi Prioritas I: Strategi *Strength – Opportunity* (SO)

<i>Strength</i>	<i>Opportuniy</i>
<p>9. Posisi geografis Kabupaten Klaten.</p> <p>10. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.</p> <p>11. Ketersediaan infrastruktur dasar</p> <p>12. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian</p> <p>13. Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten;</p> <p>14. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro;</p> <p>15. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten;</p> <p>16. Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata;</p>	<p>10. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah ;</p> <p>11. Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009;</p> <p>12. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM;</p> <p>13. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional;</p> <p>14. Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten;</p> <p>15. Berbagai program pemerintah pusat;</p> <p>16. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah;</p> <p>17. Kemajuan tehnologi yang sangat pesat;</p> <p>18. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten.</p>
Strategi SO (<i>Strength – Opportunity</i>)	
<p>5. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten;</p> <p>6. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Klaten, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas;</p> <p>7. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);</p> <p>8. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan tehnologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten.</p>	

(Lanjutan)

Strategi Prioritas II: Strategi *Weakness – Opportunity* (WO)

<i>Weakness</i>	<i>Opportunity</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi topografi Kabupaten Klaten2. Kapasitas dan kinerja kelembagaan.3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;4. Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah;5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah;6. Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor)7. Penentuan skala prioritas pembangunan;8. Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten;17. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD	<ol style="list-style-type: none">1. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah ;2. Undang-undang Pajak dan Retribusi baru Nomor 28 Tahun 2009;3. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM;4. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi internasional;5. Kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten;6. Berbagai program pemerintah pusat;7. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah;8. Kemajuan tehnologi yang sangat pesat;9. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Klaten
Strategi WO (<i>Weakness – Opportunity</i>)	
<ol style="list-style-type: none">1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan PAD melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi yang baru;2. Melakukan reformasi birokrasi dan melakukan promosi berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dalam rangka menarik minat investor, karena pada dasarnya kondisi sosial politik di Kabupaten Klaten cukup kondusif bagi investor;3. Memeratakan hasil-hasil pembangunan, dan membuat prioritas pembangunan yang paling tepat, mengingat kondisi topografi Kabupaten Klaten yang kurang menguntungkan, dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi dan dukungan dari pemerintah pusat, baik berupa dana transfer maupun program-program nasional yang diharapkan dapat menyentuh masyarakat luas;	

(Lanjutan)

Strategi Prioritas III: Strategi *Strength – Threat* (ST)

<i>Strength</i>	<i>Threat</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Posisi geografis Kabupaten Klaten.2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.3. Ketersediaan infrastruktur dasar4. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian5. Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten Klaten;6. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro;7. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Klaten;8. Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata.	<ol style="list-style-type: none">1. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia2. Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China;3. Kondisi sosial politik di tingkat nasional;4. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat;5. Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah lain,6. Investasi swasta
Strategi ST (<i>Strength – Threat</i>)	
<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola dengan baik dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain serta sehingga mampu menghadapi globalisasi, pasar bebas, dan keterbukaan ekonomi;2. Mempromosikan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Klaten, salah satunya potensi wisata dan potensi sumber daya alam untuk menarik investor ke Kabupaten Klaten;3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun industri kecil dan menengah yang mulai bangkit di Kabupaten Klaten, dalam rangka bersaing dengan produk-produk China yang dikawatirkan mulai menyerbu pasar Indonesia.	

(Lanjutan)

Strategi Prioritas IV: Strategi *Weakness – Threat (WT)*

<i>Weakness</i>	<i>Threat</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi topografi Kabupaten Klaten2. Kapasitas dan kinerja kelembagaan.3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;4. Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah;5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah;6. Upaya mensosialisasikan potensi daerah kabupaten klaten kepada pihak luar (swasta/investor)7. Penentuan skala prioritas pembangunan;8. Sistem birokrasi di Kabupaten Klaten;9. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD	<ol style="list-style-type: none">1. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia2. Ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dengan pemerintah China;3. Kondisi sosial politik di tingkat nasional;4. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat;5. Berbagai kemajuan pembangunan yang dimiliki oleh daerah-daerah lain,6. Investasi swasta
Strategi WT (<i>Weakness – Threat</i>)	
<ol style="list-style-type: none">1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD, serta menyelaraskan diri dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat;2. Memeratakan hasil-hasil pembangunan daerah dan menentukan skala prioritas, mengingat kondisi topografi Kabupaten Klaten yang bervariasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain, serta menghadapi dampak dari AFTA, globalisasi dan keterbukaan ekonomi di masa sekarang ini;3. Melakukan reformasi birokrasi dan mensosialisasikan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten dalam rangka menarik minat investor swasta;	

**HASIL PENGOLAHAN DATA
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS**

06/07/2010 21:20:53

Responden 1

Model Name: strategi kebijakan pembangunan daerah

Synthesis: Details

Level 1	Level 2	Alts	Prty
optimis (L: ,625 G: ,625)	mengurangi kemiskinan (L: ,508 G: ,317)	mengopti...	,078
		memperk...	,033
		mengemb...	,071
		memperta...	,017
		meningka...	,133
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,113 G: ,071)	mengopti...	,015
		memperk...	,011
		mengemb...	,004
		memperta...	,005
		meningka...	,030
	meningkatkan partisipasi (L: ,379 G: ,237)	mengopti...	,099
		memperk...	,051
		mengemb...	,016
		memperta...	,017
		meningka...	,073
pesimis (L: ,136 G: ,136)	mengurangi kemiskinan (L: ,226 G: ,031)	mengopti...	,011
		memperk...	,002
		mengemb...	,005
		memperta...	,001
		meningka...	,013
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,101 G: ,014)	mengopti...	,004
		memperk...	,001
		mengemb...	,001
		memperta...	,002
		meningka...	,006
	meningkatkan partisipasi (L: ,674 G: ,092)	mengopti...	,029
		memperk...	,006
		mengemb...	,007
		memperta...	,014
		meningka...	,039
status quo (L: ,238 G: ,238)	mengurangi kemiskinan (L: ,238 G: ,057)	mengopti...	,015
		memperk...	,005
		mengemb...	,006
		memperta...	,003
		meningka...	,024
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,136 G: ,033)	mengopti...	,008
		memperk...	,002
		mengemb...	,002
		memperta...	,004
		meningka...	,014
	meningkatkan partisipasi (L: ,625 G: ,149)	mengopti...	,030
		memperk...	,006
		mengemb...	,009
		memperta...	,017
		meningka...	,062

Model Name: strategi kebijakan pembangunan daerah

Synthesis: Details

Level 1	Level 2	Alts	Prty
optimis (L: ,649 G: ,649)	mengurangi kemiskinan (L: ,279 G: ,181)	mengopti...	,065
		memperk...	,073
		mengemb...	,044
		memperta...	,018
		meningka...	,009
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,649 G: ,421)	mengopti...	,101
		memperk...	,170
		mengemb...	,055
		memperta...	,017
		meningka...	,028
	meningkatkan partisipasi (L: ,072 G: ,047)	mengopti...	,003
		memperk...	,004
		mengemb...	,004
		memperta...	,006
		meningka...	,019
pesimis (L: ,072 G: ,072)	mengurangi kemiskinan (L: ,649 G: ,047)	mengopti...	,019
		memperk...	,015
		mengemb...	,004
		memperta...	,011
		meningka...	,002
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,072 G: ,005)	mengopti...	,002
		memperk...	,001
		mengemb...	,002
		memperta...	,001
		meningka...	,000
	meningkatkan partisipasi (L: ,279 G: ,020)	mengopti...	,001
		memperk...	,002
		mengemb...	,002
		memperta...	,003
		meningka...	,008
status quo (L: ,279 G: ,279)	mengurangi kemiskinan (L: ,731 G: ,204)	mengopti...	,082
		memperk...	,071
		mengemb...	,023
		memperta...	,059
		meningka...	,011
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,081 G: ,023)	mengopti...	,007
		memperk...	,009
		mengemb...	,007
		memperta...	,003
		meningka...	,001
	meningkatkan partisipasi (L: ,188 G: ,053)	mengopti...	,003
		memperk...	,004
		mengemb...	,004
		memperta...	,007
		meningka...	,021

06/07/2010 21:25:04

Responden 3

Model Name: strategi kebijakan pembangunan daerah

Synthesis: Details

Level 1	Level 2	Alts	Prty
optimis (L: ,696 G: ,696)	mengurangi kemiskinan (L: ,135 G: ,094)	mengopti...	,026
		memperk...	,035
		mengemb...	,012
		memperta...	,022
		meningka...	,022
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,584 G: ,406)	mengopti...	,065
		memperk...	,150
		mengemb...	,037
		memperta...	,039
		meningka...	,083
	meningkatkan partisipasi (L: ,281 G: ,195)	mengopti...	,037
		memperk...	,072
		mengemb...	,016
		memperta...	,030
		meningka...	,019
pesimis (L: ,075 G: ,075)	mengurangi kemiskinan (L: ,258 G: ,019)	mengopti...	,005
		memperk...	,007
		mengemb...	,002
		memperta...	,005
		meningka...	,005
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,637 G: ,048)	mengopti...	,010
		memperk...	,018
		mengemb...	,006
		memperta...	,006
		meningka...	,012
	meningkatkan partisipasi (L: ,105 G: ,008)	mengopti...	,002
		memperk...	,003
		mengemb...	,001
		memperta...	,001
		meningka...	,001
status quo (L: ,229 G: ,229)	mengurangi kemiskinan (L: ,258 G: ,059)	mengopti...	,017
		memperk...	,022
		mengemb...	,007
		memperta...	,014
		meningka...	,014
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,637 G: ,146)	mengopti...	,029
		memperk...	,054
		mengemb...	,018
		memperta...	,019
		meningka...	,036
	meningkatkan partisipasi (L: ,105 G: ,024)	mengopti...	,005
		memperk...	,009
		mengemb...	,002
		memperta...	,004
		meningka...	,003

Model Name: strategi kebijakan pembangunan daerah

Synthesis: Details

Level 1	Level 2	Alts	Prty
optimis (L: ,637 G: ,637)	mengurangi kemiskinan (L: ,258 G: ,165)	mengopti...	,068
		memperk...	,028
		mengemb...	,011
		memperta...	,039
		meningka...	,006
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,637 G: ,406)	mengopti...	,085
		memperk...	,168
		mengemb...	,127
		memperta...	,021
		meningka...	,036
	meningkatkan partisipasi (L: ,105 G: ,067)	mengopti...	,015
		memperk...	,004
		mengemb...	,028
		memperta...	,009
		meningka...	,007
pesimis (L: ,105 G: ,105)	mengurangi kemiskinan (L: ,258 G: ,027)	mengopti...	,011
		memperk...	,005
		mengemb...	,002
		memperta...	,006
		meningka...	,001
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,105 G: ,011)	mengopti...	,002
		memperk...	,005
		mengemb...	,003
		memperta...	,001
		meningka...	,001
	meningkatkan partisipasi (L: ,637 G: ,067)	mengopti...	,016
		memperk...	,005
		mengemb...	,028
		memperta...	,010
		meningka...	,005
status quo (L: ,258 G: ,258)	mengurangi kemiskinan (L: ,637 G: ,165)	mengopti...	,068
		memperk...	,028
		mengemb...	,011
		memperta...	,039
		meningka...	,006
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,258 G: ,067)	mengopti...	,014
		memperk...	,028
		mengemb...	,017
		memperta...	,004
		meningka...	,006
	meningkatkan partisipasi (L: ,105 G: ,027)	mengopti...	,007
		memperk...	,002
		mengemb...	,011
		memperta...	,004
		meningka...	,002

Model Name: strategi kebijakan pembangunan daerah

Synthesis: Details

Level 1	Level 2	Alts	Prty
optimis (L: ,637 G: ,637)	mengurangi kemiskinan (L: ,281 G: ,179)	mengopti...	,031
		memperk...	,048
		mengemb...	,007
		memperta...	,085
		meningka...	,018
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,135 G: ,086)	mengopti...	,013
		memperk...	,017
		mengemb...	,004
		memperta...	,041
		meningka...	,005
	meningkatkan partisipasi (L: ,584 G: ,372)	mengopti...	,085
		memperk...	,178
		mengemb...	,013
		memperta...	,031
		meningka...	,044
pesimis (L: ,105 G: ,105)	mengurangi kemiskinan (L: ,648 G: ,068)	mengopti...	,016
		memperk...	,023
		mengemb...	,003
		memperta...	,032
		meningka...	,007
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,230 G: ,024)	mengopti...	,003
		memperk...	,011
		mengemb...	,001
		memperta...	,006
		meningka...	,002
	meningkatkan partisipasi (L: ,122 G: ,013)	mengopti...	,001
		memperk...	,006
		mengemb...	,000
		memperta...	,003
		meningka...	,001
status quo (L: ,258 G: ,258)	mengurangi kemiskinan (L: ,683 G: ,176)	mengopti...	,030
		memperk...	,084
		mengemb...	,008
		memperta...	,047
		meningka...	,015
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,117 G: ,030)	mengopti...	,005
		memperk...	,008
		mengemb...	,002
		memperta...	,014
		meningka...	,003
	meningkatkan partisipasi (L: ,200 G: ,052)	mengopti...	,007
		memperk...	,025
		mengemb...	,002
		memperta...	,011
		meningka...	,004

06/07/2010 21:26:27

Responden 6

Model Name: strategi kebijakan pembangunan daerah

Synthesis: Details

Level 1	Level 2	Alts	Prty
optimis (L: ,731 G: ,731)	mengurangi kemiskinan (L: ,169 G: ,124)	mengopti...	,022
		memperk...	,012
		mengemb...	,013
		memperta...	,006
		meningka...	,063
	meningkatkan partisipasi (L: ,443 G: ,324)	mengopti...	,038
		memperk...	,043
		mengemb...	,032
		memperta...	,020
		meningka...	,164
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,387 G: ,283)	mengopti...	,048
		memperk...	,074
		mengemb...	,030
		memperta...	,016
		meningka...	,144
pesimis (L: ,081 G: ,081)	mengurangi kemiskinan (L: ,122 G: ,010)	mengopti...	,002
		memperk...	,001
		mengemb...	,001
		memperta...	,000
		meningka...	,005
	meningkatkan partisipasi (L: ,230 G: ,019)	mengopti...	,002
		memperk...	,003
		mengemb...	,002
		memperta...	,001
		meningka...	,009
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,648 G: ,052)	mengopti...	,010
		memperk...	,009
		mengemb...	,008
		memperta...	,004
		meningka...	,027
status quo (L: ,188 G: ,188)	mengurangi kemiskinan (L: ,143 G: ,027)	mengopti...	,005
		memperk...	,003
		mengemb...	,003
		memperta...	,001
		meningka...	,014
	meningkatkan partisipasi (L: ,286 G: ,054)	mengopti...	,006
		memperk...	,007
		mengemb...	,005
		memperta...	,003
		meningka...	,027
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,571 G: ,108)	mengopti...	,020
		memperk...	,018
		mengemb...	,016
		memperta...	,007
		meningka...	,055

Model Name: strategi kebijakan pembangunan daerah

Synthesis: Details

Level 1	Level 2	Alts	Prty
optimis (L: ,192 G: ,192)	mengurangi kemiskinan (L: ,157 G: ,030)	mengopti...	,007
		memperk...	,013
		mengemb...	,003
		memperta...	,003
		meningka...	,005
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,594 G: ,114)	mengopti...	,014
		memperk...	,050
		mengemb...	,011
		memperta...	,010
		meningka...	,011
	meningkatkan partisipasi (L: ,249 G: ,048)	mengopti...	,007
		memperk...	,021
		mengemb...	,007
		memperta...	,007
		meningka...	,007
pesimis (L: ,174 G: ,174)	mengurangi kemiskinan (L: ,126 G: ,022)	mengopti...	,005
		memperk...	,010
		mengemb...	,002
		memperta...	,002
		meningka...	,003
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,416 G: ,073)	mengopti...	,012
		memperk...	,032
		mengemb...	,011
		memperta...	,009
		meningka...	,011
	meningkatkan partisipasi (L: ,458 G: ,080)	mengopti...	,012
		memperk...	,035
		mengemb...	,012
		memperta...	,012
		meningka...	,012
status quo (L: ,634 G: ,634)	mengurangi kemiskinan (L: ,126 G: ,080)	mengopti...	,017
		memperk...	,035
		mengemb...	,007
		memperta...	,009
		meningka...	,013
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi (L: ,416 G: ,264)	mengopti...	,045
		memperk...	,115
		mengemb...	,038
		memperta...	,034
		meningka...	,038
	meningkatkan partisipasi (L: ,458 G: ,290)	mengopti...	,042
		memperk...	,127
		mengemb...	,042
		memperta...	,042
		meningka...	,042